Wahyu Agil Permana, Ulfa Novitasari, Rismayanti Khomairoh, Rahmadina Nur Safitri, Aulia Putri Alaudi, dkk.

Indonesia dalam Pusaran Sejarah: Sebuah Kajian Historis Multidimensi

Editor:
Wahyu Agil Permana

Indonesia dalam Pusaran Sejarah: Sebuah Kajian Historis Multidimensi

Wahyu Agil Permana | Ulfa Novitasari

Rismayanti Khomairoh | Rahmadina Nur Safitri | Aulia Putri Alaudi | Dkk

Editor: Wahyu Agil Permana

CV. INSPRO PUSTAKA

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i secara komersial dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (llima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Indonesia dalam Pusaran Sejarah: Sebuah Kajian Historis Multidimensi

Penulis/ Pengarang :

Wahyu Agil Permana, Ulfa Novitasari, Rismayanti Khomairoh, Elsa Silvana Amalia, Dhimas Purnomo Adjie, Rahmadina Nur Safitri, Qonita Firzatud Diyanah, Arnia Fenti Rosari, Aulia Putri Alaudi, Selviyana Saputri, Sintia Dewi Perdana, Dzulqarnaen Syajaah Saepudin, Yosua Eka Putra Hamonangan, Zaini Ahdan, Zulpan Maulana, Amanda Putri Rachel, Azizah, Halwa Khatami, Rifal Sulaiman, Fadela Nurul Aisyah, Suci Saras Wati, Ilham Fadlillah, Muhammad Bimvanka Ridho Abdhillah, Muhammad Izzul Islami Mahfud, Aldino Billy Paringga, Alfan Mawlana, Pitri Hendriyani, Wahyuni Putri, Yulita Angela Kusuma, Silvia Andriani, Mutia Maharani, Wasipa Shuhra

Penyunting Naskah : **Nuraini**

Perancang Sampul dan Tata Letak: **Nana Maulana, S.T.**

Sumber Desain: www.canva.com

QRCBN : **62-963-7532-643**

Cetakan pertama, November 2024

xi + 350 Halaman, Ukuran 14,5 x 21 cm

SANWACANA

Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami mempersembahkan buku *Indonesia dalam Pusaran Sejarah: Sebuah Kajian Historis Multidimensi.* Buku ini lahir dari semangat untuk menelusuri dan memahami perjalanan panjang bangsa Indonesia yang tidak hanya kaya akan warisan sejarah, tetapi juga sarat dengan dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang saling bertautan.

Sebagai negara dengan ragam dimensi kehidupan yang unik, Indonesia telah melewati berbagai era transformasi yang membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Dari periode kerajaan kuno, masa kolonial, hingga era modern yang serba kompleks, setiap babakan sejarah menyimpan hikmah yang layak direnungkan. Dalam buku ini, kami mencoba menghadirkan penulisan dengan

perspektif multidimensi, untuk memberikan gambaran tentang berbagai aspek yang membentuk perjalanan bangsa ini.

Proses penyusunan buku ini melibatkan riset, diskusi akademik, dan interpretasi kritis terhadap berbagai sumber sejarah, baik lisan maupun tulisan. Kami berharap buku ini mampu menghadirkan narasi yang tidak hanya informatif, tetapi juga relevan untuk khalayak umum yang memiliki minat terhadap kajian sejarah Indonesia.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik langsung maupun tidak langsung, dalam proses penulisan buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi sumbangsih kecil, bagi upaya mengenali jati diri bangsa dan membangun masa depan yang lebih baik. Kritik dan masukan dari pembaca akan menjadi bekal berharga

bagi kami untuk menyempurnakan kajian-kajian berikutnya.

Salam hangat,

Tim Penulis

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya buku *Indonesia dalam Pusaran Sejarah: Sebuah Kajian Historis Multidimensi.* Kehadiran buku ini menjadi salah satu kontribusi penting dalam kajian sejarah, khususnya dalam memperkaya kajian multidimensional mengenai perjalanan bangsa Indonesia.

Saya merasa bangga dan berbahagia, karena buku ini mencerminkan semangat mahasiswa untuk terus menggali dan mengupas sejarah Indonesia dari berbagai sudut pandang. Pendekatan multidimensi yang digunakan dalam buku ini tidak hanya memperluas wawasan pembaca tentang ragam aspek sejarah Indonesia, tetapi juga memberikan perspektif baru yang mampu memperkuat pemahaman kita tentang dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya Indonesia dari masa ke masa.

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berharga bagi publik yang tertarik pada kajian sejarah. Dengan membaca buku ini, kita dapat memahami bahwa sejarah tidak hanya berbicara tentang masa lalu, tetapi juga memberikan pelajaran berharga untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Saya mengapresiasi kerja keras tim penulis yang telah mencurahkan waktu, tenaga dan pemikiran untuk menghadirkan buku ini. Terbitnya buku ini membuktikan bahwa tradisi keilmuan dan semangat literasi terus bertumbuh di lingkungan akademik kita. Semoga buku ini dapat menjadi inspirasi bagi lahirnya karya-karya lain yang mampu memperkuat kecintaan kita pada sejarah bangsa.

Selamat membaca, semoga buku ini membawa manfaat bagi kita semua.

Yustina Sri Ekwandari,
Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah
Universitas Lampung

DAFTAR ISI

Wahyu Agil Permana, Ulfa Novitasari,
Rismayanti Khomairoh, Rahmadina
Nur Safitri, Aulia Putri Alaudi, dkk.

Indonesia dalam Pusaran Sejarah: Sebuah Kajian Historis Multidimensi

Editor:
Wahyu Agil Permana

Pengaruh Pemikiran Politik Tan Malaka terhadap Pergerakan Nasional Indonesia (1919-1945)

Wahyu Agil Permana

Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat pribumi. Pada mulanya tujuan mereka datang ke Nusantara adalah hanya untuk melakukan jual beli rempah-rempah. Namun, karakteristik orang Eropa yang serakah, mengubah tujuan awal mereka menjadi hasrat ingin menguasai dan memonopoli perdagangan yang ada di seluruh Nusantara. Hal inilah yang kemudian membuat mereka menetapkan kebijakan kolonialisme dan imperialisme di Nusantara (Putra dkk, 2020).

Penderitaan yang dialami oleh masyarakat pribumi akibat adanya kolonialisme dan imperialisme tersebut menimbulkan berbagai macam reaksi, kecaman dan juga perlawanan. Oleh karena itu, kaum kolonial merasa resah dan kemudian berniat untuk membalas jasa masyarakat pribumi dengan cara menetapkan kebijakan politik balas budi atau politik etis.

Ada tiga indikator dari politik etis, yaitu edukasi, irigasi dan transmigrasi. Dengan adanya kebijakan tersebut, membuat masyarakat pribumi memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan modern ala Eropa. Dari sinilah muncul golongan terpelajar yang memiliki kesadaran Nasionalisme, sekaligus sebagai pelopor tercetusnya pergerakan nasional yang menjadi awal pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia (Alfian, 1986).

Ada beberapa tokoh intelektual yang muncul akibat pendidikan dari kebijakan politik etis terebut, satu di antaranya adalah Tan Malaka. Tan Malaka adalah merupakan satu pendukung nasionalisme radikal, yang menekankan pembebasan Indonesia dari penjajahan kolonial secara total. Ia memberikan kontribusi dalam menguatkan pergerakan nasional Indonesia, termasuk mengadvokasi kemerdekaan politik, ekonomi, dan sosial Indonesia secara menyeluruh.

Pendidikan Barat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mempengaruhi pemikiran-pemikiran Tan Malaka, terutama dalam bidang politik (Putra dkk, 2020). Pendidikan yang diperoleh Tan Malaka juga mempengaruhi beberapa karya yang dihasilkan olehnya. Beberapa karyanya terfokus pada aspek politik, pemerintahan, sosial, ekonomi, budaya dan militer (Rambe, 2003).

Tan Malaka adalah sosok revolusioner yang dikenal melalui gagasan dan pemikirannya yang radikal. Ia memiliki pandangan bahwa revolusi merupakan satu-satunya metode yang dapat dilakukan ketika boikot dan mogok yang dilakukan oleh kaum proletar tidak diperhatikan. Menurutnya, revolusi yang harus dilakukan bukan untuk menggulingkan pemerintahan atau yang bersifat anarkis, melainkan revolusi yang sifatnya adalah sebuah gerakan, sebagai upaya mempertahankan kedaulatan serta membebaskan diri dari pengaruh-pengaruh yang membelenggu kemerdekaan (Putra dkk, 2020).

Pada masa pergerakan nasional Indonesia, Tan Malaka banyak memberikan kontribusi bagi kemerdekaan Indonesia. Ia adalah seorang pejuang yang revolusioner, radikal, militan dan juga banyak menghasilkan gagasan-gagasan yang cemerlang dan berpengaruh terhadap perjuangan

kemerdekaan Indonesia. Ide dan gagasan revolusionernya yang radikal adalah sebagai upaya untuk menentang kebijakan kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh bangsa Eropa (Dermawan, 2020).

Pemikiran yang dicetuskan oleh Tan Malaka terbukti memberikan dampak yang efektif dan signifikan. Dampak dari pemikiran yang dihasilkan olehnya dapat merambah kepada golongan muda dan golongan tua yang revolusioner, meskipun ada sedikit pertentangan antara kedua belah pihak tersebut (Alfian, 1986). Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa revolusi merupakan sebuah bentuk pengaruh dari pemikiran dan gagasan yang dicetuskan oleh Tan Malaka. Pemikirannya berfokus untuk merevolusionerkan kaum proletar, ia beranggapan bahwa kaum proletar tersebut dapat menjadi potensi kekuatan massa dalam memperjuangkan kemerdekaan yang seutuhnya.

Revolusi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dapat menjadi usaha yang dapat menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka seutuhnya (Alfian, 1986).

Biografi Tan Malaka

Tan Malaka lahir di Sumatera Barat, 2 Juni 1897. Ia memiliki nama asli Sutan Ibrahim gelar Datuk Sutan Malaka. Ayahnya bernama Rasad, sedangkan ibunya bernama Sinah. Tan Malaka mulai mengenyam pendidikan pada usia 12 tahun di *Inlandsche Kweekschool voor Onderwijzers* (Sekolah Guru Pribumi) di Bukittinggi dan lulus pada 1913. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya di *Rijkskweekschool* di Belanda (Dermawan, 2020).

Dalam menempuh pendidikannya di Belanda, Tan Malaka memperoleh banyak ilmu pengetahuan tentang politik. Hal tersebut dikarenakan Tan Malaka sangat gemar membaca buku tentang revolusi

kemerdekaan dan beberapa buku filsafat karya filsuf populer pada masa itu. Dari sinilah awal Tan Malaka berkenalan dengan teori-teori sosialisme, revolusi, marxisme dan komunisme. Dari kegemaran membacanya tersebut yang kemudian memunculkan kesadaran akan nasionalisme dengan pemikiran radikal (Susilo, 2008).

Pada 1919 dengan bekal ilmu pengetahuan yang telah didapatkan, Tan Malaka kembali ke Indonesia. Setelah pulang ke Indonesia, Tan Malaka mulai menuangkan ide dan gagasannya melalui karyanya yang berjudul *Naar de Republiek Indonesia* (Menuju Republik Indonesia).

Kemudian pada 1922 Tan Malaka mewakili Indonesia pada kongres komunis di Moscow. Di sana ia memperkenalkan ide dan gagasannya kepada para pimpinan komunis internasional dan tokoh-tokoh komunis dari seluruh dunia. Ia mengajak para tokoh-tokoh tersebut untuk tidak menganggap Pan-

Islamisme sebagai musuh dalam menentang kapitalisme dan imperialisme. Namun, ide dan gagasan Tan Mala ini tidak disetujui oleh pimpinan komunis Uni Soviet karena dianggap tidak revolusioner (Lukmantoro, 2017).

Meski Tan Malaka menganut ideologi sosialis dan sering kali terlibat konflik dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), namun ia bukanlah seorang yang menganut ideologi komunis dalam prinsip hidupnya. Ia hanya menggunakan ideologi tersebut sebagai alat pergerakan perjuangan dalam menentang kolonialisme dan imperialisme. Bahkan, Tan Malaka pernah dianggap sebagai pengkhianat di Partai Komunis Indonesia.

Hal tersebut dikarenakan Tan Malaka pernah berupaya menggagalkan rencana pemberontakan PKI terhadap pemerintah kolonial Belanda di Batavia pada 1926 yang pada masa itu, Tan Malaka adalah

seorang ketua Komunis Internasional (Komintern) di wilayah Asia Timur (Dermawan, 2020).

Hingga pada akhirnya, setelah berbagai upaya yang dilakukan oleh Tan Malaka, membuat dirinya dan sebagian kawan-kawannya memutuskan untuk memisahkan diri dari PKI. Setelah memisahkan diri, pada 1927, Tan Malaka bersama Djamaludin Tamim dan Subakat mendirikan partai sendiri, yaitu Partai Republik Indonesia (PARI) tepatnya di Bangkok. Dan sebab peristiwa itulah, kemudian Tan Malaka dianggap sebagai pengkhianat (Badruddin, 2019).

Tan Malaka dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia

Perjalanan Tan Malaka dalam konteks sejarah Indonesia bermula pada Tahun 1913, ketika G.H, Horensma salah seorang pengajarnya di sekolah guru Bukit tinggi, pertama kali mengantarnya ke Belanda selama masa cuti. Selanjutnya, Tan Malaka

mendaftar di sekolah yang bernama *Kweeluchool* yang berlokasi di Haarlem. Selama persinggahannya di Negeri Belanda, Tan Malaka memiliki hutang yang banyak kepada pemberi dana pendidikan dan kepada guru di Sumatera, selama bersekolah di negeri Belanda.

Motivasi belajarnya menurun akibat dari kondisi kesehatannya yang sering kali memburuk dan hutang yang menumpuk. Pada Tahun 1919, ia pulang ke Sumatera dan memulai kariernya sebagai pendidik dengan memperoleh ijazah guru di Belanda, kemudian ia mengajar anak-anak dari golongan buruh perkebunan tembakau di Sumatera Timur (Basundoro, 2012).

Pada Tahun 1919, Tan Malaka pulang ke Indonesia dan bekerja sebagai pengawas sekolah anak-anak kelas pekerja, di Perusahaan Senembah Deli, yang dilakukannya dari Desember 1919 hingga Juni 1921. Pada saat di Deli, ia melihat kondisi

kehidupan para pekerja perkebunan yang miskin dan dihadapkan pada kenyataan pahit dari sistem eksploitatif yang ada. Menurut Tan Malaka, kaum kapitalis menjuluki wilayah itu sebagai "tanah emas", sedangkan bagi kelas pekerja, itu adalah tempat kesengsaraan dan kesulitan (Putra, dkk., 2020).

Gagasan revolusioner Tan Malaka awalnya dikembangkan di Belanda. Tan Malaka mengembangkan rasa nasionalisme yang kuat dan secara aktif mendukung prinsip-prinsip komunisme. Kemenangan Revolusi Bolshevik di Rusia pada Tahun 1917 menjadi daya pikat yang signifikan baginya. Tan Malaka menyadari berkembangnya operasi Sarekat Islam (SI) di Jawa, yang mendorong kepergiannya dari perkebunan Senembah di Deli, Sumatera Timur pada 1921 untuk berangkat ke Jawa (Basundoro, 2012).

Tahun 1921-1922 menandai dimulainya karier politik Tan Malaka, dengan mendirikan sebuah sekolah rakyat di Semarang. Karena keadaan yang tidak memungkinkan, maka beliau hanya membatasi kegiatannya hanya dalam bidang pendidikan, tetapi beliau juga ikut dalam kegiatan politik dan buruh (Putra, dkk., 2020). Bagi Semaun, hadirnya Tan Malaka ke Jawa membawa angin segar dan memberikan semangat baru dalam persaingan dengan SI, agar semakin banyak anggota SI yang bergabung dengan PKI.

Semaun juga mengajak Tan Malaka untuk datang ke Semarang dengan maksud untuk mendirikan sekolah bagi anak-anak anggota SI dengan doktrin marxisme. Sekolah pertama berdiri pada tanggal 21 Juni 1921 dengan jumlah murid sebanyak 50 anak. Selanjutnya hingga Maret 1922, sekolah serupa berdiri dan tersebar hingga ke Bandung dengan jumlah murid sebanyak 200 anak.

Akibat dari berhasilnya mendirikan sekolah tersebut, membuat nama Tan Malaka semakin terkenal hingga pada kongres PKI ke-8 yang diadakan pada tanggal 25 Desember 1921 di Semarang, Tan Malaka terpilih menjadi ketua PKI menggantikan Semaun yang pergi ke Moskow (Basundoro, 2012).

Pada saat berada di Bandung, ketika Tan Malaka hendak memeriksa gedung Sekolah Rakyat pada tanggal 13 Februari 1922, Polisi Rahasia Belanda (PID) selalu mengawasi gerak-gerik serta kegiatan Tan Malaka dengan ketat, akhirnya dapat menangkap dan menahan Tan Malaka. Setelah itu pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan keputusan pemerintah pada tanggal 10 Maret 1922 No. 2 yang berisi desakan bahwa Tan Malaka harus secepatnya meninggalkan Hindia Belanda (Pratama, 2018).

Perjalanan perjuangan Tan Malaka di kancah Internasional dimulai setelah beliau di asingkan ke luar negeri oleh pemerintah Hindia Belanda. Tan Malaka sebagai wakil dari Indonesia, hadir dalam kongres Komintern IV yang diadakan di Moskow pada Tahun 1922. Dalam kongres tersebut Tan Malaka menentang sikap permusuhan terhadap Pan-Islamisme, sehingga beliau mendapat perhatian tajam. Tan Malaka memandang revolusi Islam memiliki potensi penting untuk mengajak mereka bekerja sama dalam menentang kolonialisme. Sejak awal penjajahan Belanda di Indonesia hingga munculnya nasionalisme, perlawanan terhadap penjajah banyak dilakukan oleh potensi Islam, seperti Sarekat Islam. Banyak dari orang Islam berprofesi sebagai buruh dan petani miskin yang tertindas dan menginginkan kemerdekaan dari genggaman kolonial (Putra, dkk., 2020).

Pada saat itu pimpinan PKI Muso, Alimin, dan Saedjono mengadakan rapat di Candi Prambanan, Yogyakarta pada Oktober 1925. Rapat tersebut menghasilkan keputusan untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Belanda yang melakukan kesewenang-wenangan dan penindasan. Tan Malaka selaku pimpinan tertinggi Komintern Asia Tenggara tidak menyetujui hasil dari rapat tersebut. Menurutnya jika dilihat dari perbandingan keadaan dan kekuatan melakukan pemberontakan pada saat itu sama seperti bunuh diri bagi PKI. Namun, pemberontakan itu akhirnya terjadi juga pada bulan November 1926 di Jawa Barat dan pada Januari 1927 di Sumatera Barat. Akibat dari pemberontakan itu hanyalah kerusuhan kecil di daerah lokal saja yang dengan gampang diatasi oleh pemerintah Hindia Belanda (Putra, dkk., 2020).

Tan Malaka menyayangkan aksi pemberontakan tersebut. Ia beranggapan bahwa aksi pemberontakan tersebut terlalu optimistis dan tidak rasional. Oleh karena itu, Tan Malaka bersama sahabatnya Djamaloeddin Tamin dan Soebakat membentuk Partai Republik Indonesia (PARI) pada 1927, sebagai bentuk upaya untuk melanjutkan perjuangan PKI dengan tetap menggunakan ideologi komunis, tetapi lebih mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia (Amran, 2018).

PARI meluaskan jaringannya hingga seluruh daerah Indonesia dan dapat bertahan hingga 10 tahun, meskipun pada akhirnya banyak pimpinannya yang ditangkap hingga masuk penjara atau bahkan dihukum mati. Di tengah-tengah penyerangan terhadap partainya, Tan Malaka memulai perjalanan yang melintasi berbagai negara Asia Tenggara, di mana ia menjadi sasaran oleh militer Jepang. Kemudian ia pergi ke Malaysia, Singapura, lalu

melintasi pulau Sumatera sebelum tiba di kota Jakarta (Kholik, 2006).

Sekembalinya ke Hindia Belanda, Tan Malaka tinggal di sebuah desa yang terletak di Jakarta. Ia menginap di sebuah rumah kecil dengan nama samaran Iljas Hussein. Tempat inilah yang kemudian menjadi asal usul lahirnya buku Madilog, yang dianggap sebagai buku yang paling penting. Tan memodifikasi kerangka teoretis Marx berdasarkan interpretasi pribadinya tentang keadaan dan situasi Indonesia.

Setelah satu tahun tinggal di Jakarta, keterbatasan keuangan mengharuskan ia untuk bekerja sebagai pengawas di pertambangan batu bara yang terletak di Bayah, pantai selatan Banten. Di sana, Tan berusaha meringankan penderitaan para *Romusha.* Selain itu, ia membentuk kelompok, terutama terdiri dari generasi muda, dengan tujuan untuk terlibat dalam musyawarah tentang berbagai

masalah politik, terutama yang berkaitan dengan pencapaian kemerdekaan Indonesia yang dijanjikan oleh Jepang (Amran, 2018).

Sebagai delegasi Banten untuk kongres pemuda, Tan Malaka menolak untuk mendukung ekspresi kemerdekaan Indonesia dengan menagih janji dari Jepang, Tan menolak kongres pemuda tersebut jika ada campur tangan Jepang. Pencapaian kedaulatan harus dijamin secara mandiri, tanpa intervensi apa pun dari Jepang. Pada pertemuan kedua, Tan Malaka berhalangan hadir karena sebelumnya ada acara di Bayah. Ketidakhadirannya mengakibatkan rasa ketertinggalan dan tidak dapat mengambil bagian dalam pendirian Republik. Pada tanggal 17 Agustus 1945 diberitakan bahwa para pemuda pimpinan Sukarni selanjutnya akan beraliansi dengan Tan Malaka.

Soekarno dan Hatta diduga diculik dengan maksud untuk mempercepat deklarasi kedaulatan Indonesia. Selama periode itu, Jepang mengalami kelumpuhan. Pada tanggal 14 Agustus 1945, menyerah tanpa syarat dari pasukan militer Jepang kepada kekuatan Sekutu dilaksanakan. Para pemuda segera memanfaatkan kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaan, tanpa menunggu janji dari Jepang (Putra, dkk., 2020). Akibatnya, pada masa momentum proklamasi, Tan Malaka tidak ikut ambil bagian. Tan memilih untuk terlibat dengan para pemuda dengan mengubah haluan politiknya (Amran, 2018).

Upaya pencarian jati diri bangsa Indonesia oleh Tan Malaka tidak semata-mata diwujudkan melalui upaya fisik, tetapi juga melalui karya sastranya yang produktif, yang terdiri dari kurang lebih 27 buku, sejumlah brosur, dan ratusan artikel. Karya sastra Tan Malaka melibatkan berbagai bidang yang meliputi

tata negara, politik, ekonomi, sosial budaya dan masalah militer.

Beberapa karyanya yang terkenal seperti *Naar de Republik, Aksi Massa*, *Madilog, Dari Penjara ke Penjara,* dan beberapa lainnya. Penerimaannya terhadap pemikiran Barat tidak memerlukan penaklukan total, melainkan menyiratkan usaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh pengetahuan dan memahami nilai-nilai budaya Barat. Untuk berhasil menaklukkan lawan, sangat penting untuk memiliki pemahaman menyeluruh tentang kekuatan dan kelemahan mereka (Putra, dkk., 2020).

Madilog dan Upaya Mencerdaskan Bangsa

Cita-cita mencapai Indonesia berdaulat yang diusung oleh Tan Malaka tidak bisa dilepaskan dari kontribusi sastranya, Madilog (Materialisme, Dialektika, dan Logika). Seperti yang dikemukakan

oleh Tan Malaka, Madilog ditulis sebagai upaya melawan cara berpikir kuno, penuh dengan mistik dan diliputi oleh kepercayaan takhayul. Madilog adalah kerangka kognitif, yang diambil dari bukti yang dapat diverifikasi dan data faktual.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Madilog mewakili jalan baru menuju pemikiran rasionalistik yang menggantikan sifat kuno filsafat Timur. Konsep Madilog mengandung pola pemikiran baru yang harus dianut oleh seluruh rakyat Indonesia, untuk mencapai kemerdekaan dan meningkatkan pembaharuan dan kemajuan bagi diri sendiri (Dharma & Yusri, 2013).

Diskursus ini berkaitan dengan konsep filosofis Dialektika Hegelian dan Materialisme Dialektika Marx-Engels. Sebelum konsepsi Madilog, ada perselisihan filosofis antara dua aliran pemikiran terkemuka di Eropa selama pengejaran akademik Tan Malaka. Aliran pertama, yang ditopang oleh

prinsip-prinsip idealisme, didirikan oleh Hegel. Sedangkan aliran kedua yang berpedoman pada prinsip-prinsip materialisme, dipelopori oleh Marx Engels. Namun, menurut Tan Malaka, setiap aliran filsafat telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi analisis komprehensif pemikiran yang tergabung dalam Madilog.

Kontribusi penting dari G.W.F Hegel, dari 1770 hingga 1831, terkenal karena filosofi dialektisnya yang digunakan untuk memahami dan mengkontekstualisasikan jalannya sejarah. Bidang sejarah mencakup proses yang terus berkembang, seperti yang dikemukakan oleh Hegel, yang menegaskan perkembangannya pematangan tanpa henti dari suatu ide atau entitas yang dianggap absolut. Konsep yang absolut, mewakili kebenaran tertinggi dan pasti, yang berada di luar segala bentuk ketidakpastian atau skeptisisme (Islam, 2016).

Filsafat Hegelian terkenal dengan pendekatan dialektisnya, yang memerlukan perkembangan melalui tahapan tesis, antitesis, dan sintesis. Ketiga tahap ini saling terkait erat, membentuk satu kesatuan yang tak terpisahkan. Pendekatan dialektis terhadap pemikiran menonjolkan prinsip memprioritaskan intelek di atas entitas material, menggarisbawahi pentingnya posisi mental di atas keberadaan materi. Penalaran dialektis Hegel terlibat dengan upaya untuk mengatasi kebingungan keterbatasan manusia dalam memahami kebenaran, yang dianggap sebagai solusi pamungkas untuk semua tantangan yang menimpa kehidupan manusia, baik secara individu maupun kolektif (Dharma & Yusri, 2013).

Setiap kali sintesis baru dipahami oleh akal manusia, ia dicirikan oleh tingkat konstituen kebenaran yang lebih besar dan lebih komprehensif. Proses kognitif yang disebutkan di atas, bertahan

dalam jiwa manusia sampai penggabungan yang optimal dan sempurna dari konstituen yang benar tercapai. Selama periode ini, intelek manusia telah mencapai pemahaman tentang kebenaran menyeluruh yang dinyatakan oleh Hegel sebagai Ide Absolut. Dapat dikatakan bahwa dialektika adalah proses progresif yang melampaui dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi, yang dicirikan oleh pola siklus konflik dan harmoni (Islam, 2016).

Karya sastra yang dikenal dengan nama Madilog ini dikarang di daerah Rawajati, yang terletak di sekitar Kalibata dan Cililitan, Jakarta. Dikerjakan dengan total kumulatif 259 hari, selama periode mulai dari 15 Juli 1942 hingga 30 Maret 1943. Usaha ini berlangsung selama 8 bulan dan 720 jam, dengan harian rata-rata 3 jam. Tersusun di tengah kemelaratan, keterasingan, dan isolasi yang ditimbulkan oleh imperialisme Jepang, dalam

sebuah hunian bobrok yang tidak layak huni (Malaka, 1951).

Konsep materialisme dijelaskan melalui bahan-bahan ilmiah, yang berfungsi sebagai sarana untuk menghindari ranah penalaran mistik. Pembahasannya menyangkut konsep logika mistik, yang menunjukkan proses kognitif yang sangat menekankan pada keyakinan tentang kemanjuran individu, roh, atau benda tertentu yang memiliki kemampuan supranatural dalam membawa perubahan pada tingkat makrokosmik dan mikrokosmik. Dalam ranah sains, setiap perubahan dalam sistem tertentu dapat tunduk pada pengamatan, analisis, dan pengujian empiris yang cermat. Proses ini membutuhkan pemanfaatan kecerdikan manusia untuk menyelidiki seluk-beluk fenomena tertentu hingga batas maksimalnya. Bab kelima dan keenam teks menjelaskan konsep dialektika dan logika.

Setelah pemeriksaan menyeluruh atas wacana komprehensif Madilog yang mencakup prinsip inti materialisme, dialektika, dan logika, seseorang dapat menarik perbandingan dengan cara kita mendekati buku teks logika pengantar di ranah ilmu alam fundamental. Kurangnya kejutan tentang tujuan utama Tan Malaka melalui Madilog, berakar pada penekanannya pada arah rasionalitas dalam realitas untuk menyelidiki realitas material secara empiris melalui sarana ilmiah. Pada bab ketujuh, eksplorasi isu-isu ontologis yang telah lama menjadi titik fokus wacana manusia, dilakukan melalui pemeriksaan penggabungan unsur-unsur penyusun Madilog. Bagian puncak dari Madilog menampilkan bab terakhir, yang disebut sebagai bab delapan, yang mengarahkan penekanannya pada gambaran utopis masyarakat Indonesia dengan ideologi Madilog (Dharma & Yusri, 2013).

Upaya Tan Malaka menuju kemajuan pada dasarnya berakar pada dua pesan perjuangan yang berbeda, yang ia kejar dengan sungguh-sungguh. Pertama, tantangan awalnya adalah mendamaikan praksis intelektual yang tercakup dalam Madilog dengan ruang lingkup operasionalnya dalam batas-batas negaranya sendiri, dan bukan dengan daerah atau negara lain, di mana Tan Malaka sebelumnya beroperasi menggunakan berbagai nama samaran. Di tengah-tengah konflik yang sulit ini, Tan Malaka menunjukkan tingkat ketelitian ilmiah yang melebihi seorang intelektual kursi belaka, yang kemampuan pemecahan masalahnya terbatas hanya pada pengaturan ruang kerja mereka yang maju dan estetis.

Kedua, identitas budaya Minangkabau yang dicirikan oleh gaya berpikir dialektis dan ketaatan pada pola *alue patuik* (yang mendikte tatanan logis dan ketaatan pada aturan yang telah ditetapkan)

berperan penting dalam pencarian Tan Malaka akan nilai-nilai budaya yang kongruen, setibanya di Belanda untuk pendidikan. Meski berada di ranah yang sangat berbeda, Tan Malaka berusaha menyelaraskan pemikirannya dengan budaya yang memiliki nilai dan cara berpikir yang sama. Kedua hal ini terjadi dalam konteks kejadian sejarah yang signifikan, berkaitan dengan kejatuhan kapitalisme dalam gelombang revolusi sosial yang menonjol, sebagai dampak dari doktrin dasar Marxis dari unsur-unsur utamanya, yaitu Materialisme Dialektis dan Materialisme Historis (Islam, 2016).

Kesimpulan

Tan Malaka merupakan tokoh kemerdekaan yang dikenal melalui gagasan dan pemikirannya yang radikal. Ia memiliki pandangan bahwa revolusi merupakan satu-satunya cara yang dapat dilakukan ketika boikot dan mogok yang dilakukan oleh kaum proletar tidak diperhatikan. Menurutnya, revolusi yang harus dilakukan bukan untuk menggulingkan pemerintahan atau yang bersifat anarkis, melainkan revolusi yang sifatnya adalah usaha yang dilakukan oleh rakyat untuk mempertahankan kedaulatan dan membebaskan diri dari pengaruh-pengaruh yang membelenggu kemerdekaan.

Pada masa pergerakan nasional Indonesia, Tan Malaka banyak memberikan kontribusi bagi kemerdekaan Indonesia. Ia adalah seorang pejuang yang revolusioner, radikal, militan dan juga banyak menghasilkan gagasan-gagasan yang cemerlang dan berpengaruh terhadap perjuangan

kemerdekaan Indonesia. Ide dan gagasan revolusionernya yang radikal adalah sebagai upaya untuk menentang kebijakan kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh bangsa Eropa.

Pemikiran yang dicetuskan oleh Tan Malaka terbukti memberikan dampak yang efektif dan signifikan. Dampak dari pemikiran yang dihasilkan olehnya dapat merambah kepada golongan muda dan golongan tua yang revolusioner, meskipun ada sedikit pertentangan antara kedua belah pihak tersebut. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa revolusi merupakan sebuah bentuk pengaruh dari pemikiran dan gagasan yang dicetuskan oleh Tan Malaka.

Pemikirannya berfokus untuk merevolusionerkan kaum proletar, ia beranggapan bahwa kaum proletar tersebut dapat menjadi potensi kekuatan massa dalam memperjuangkan kemerdekaan yang seutuhnya. Revolusi yang

dilakukan oleh masyarakat pribumi Indonesia, dapat menjadi usaha yang dapat menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka seutuhnya.

Daftar Pustaka

Alfian. (1986). *Transformasi Sosial Budaya dalam Pembangunan Sosial.* Jakarta: UI Press.

Amran, R. N. P. (2018). *Tan Malaka, Bapak Republik Yang Terlupakan (Studi Eksploratif Perspektif Non-Western Komunikasi Instruksional dan Komunikasi Politik Tan Malaka).* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

Badruddin. (2019). *Misteri Pembunuhan Tan Malaka dan Catatan-Catatan Revolusioner Dari Balik Penjara.* Yogyakarta: Araska.

Basundoro, P. (2012). Tan Malaka, Persatuan Perjuangan dan Historiografi Indonesia Kontemporer. *Historia Jurnal Ilmu Sejarah, 7*(2).

Dermawan, A. S. (2020). *Perjuangan Tan Malaka Dalam Kemerdekaan Indonesia 1919-1949.* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).

Dharma, R., & Yusri, A. (2013). Pemikiran Politik Tan Malaka Menuju Kemerdekaan Indonesia. *Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah, 11*(1).

Islam, M. F. (2016). Pemikiran Politik (Madilog) Tan Malaka Menuju Kemerdekaan Indonesia. *El-Banat, 6*(2).

Kholik, A. (2006). *Pemikiran Politik Tan Malaka Tentang Revolusi Dan Islam Di Indonesia.* Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah.

Lukmantoro, T. (2017). Menertawakan Fobia Komunis di Era Reproduksi Digital. *Profetik: Jurnal Komunikasi, 10*(1).

Malaka, T. (1951). *Madilog, Materialisme, Dialektika, Logika.* Jakarta: Widjaya.

Pratama, A. S. (2019). *Pemikiran Politik Ekonomi Tan Malaka Dan Relevansinya Di Indonesia*. (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

Putra, A. F. A., Zuriatin, Z., & Rosdiana, R. (2020). Usaha Perjuangan Pahlawan Datuk Ibrahim Tan Malaka dalam Mencapai Pembebasan Nasional Indonesia Tahun 1919-1949. *Jurnal Pendidikan IPS, 10*(2).

Rambe, S. (2003). *Pemikiran politik Tan Malaka: Kajian terhadap Perjuangan "Sang Kiri Nasionalis": Jalan Penghubung Memahami Madilog.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Susilo, T. A. (2008). *Tan Malaka: Biografi Singkat 1897-1949.* Yogyakarta: Penerbit Garasi.

Profil Penulis

Wahyu Agil Permana lahir di Pringsewu, Lampung. Saat ini sedang menikmati ketersesatannya di rimba akademik Universitas Lampung. Minat kajiannya meliputi sejarah, sosial, budaya, dan filsafat juga politik. Ia memiliki semangat tinggi dalam mengeksplorasi dinamika kehidupan manusia, baik dalam perspektif masa lalu maupun masa kini.

Dalam perjalanan akademiknya, Agil telah menulis sejumlah artikel ilmiah, di antaranya *Kebudayaan Indis: Hasil Akulturasi Budaya antara Jawa dengan Kolonial Belanda* (Pustaka: Jurnal Ilmu-ilmu Budaya, 2023) dan *From Pesantren to Nation: KH. Ghalib's Contribution to Islamic Education in Pringsewu* (Jurnal Tarikhuna, 2024).

Selain menulis artikel ilmiah, Agil juga aktif menulis di berbagai media massa, seperti *Lampung Post, Indonesiana.id, Thecolumnist.id, Historicalmeaning.id, Omong-omong.com* dan lain-lain. Dedikasinya terhadap dunia literasi dan jurnalistik tercermin melalui perannya sebagai anggota tim redaksi di *NU Online Lampung* dan *Satupena Lampung.* Bertukar sapa di ruang maya: Akun Instagram: @azvagen

Indonesia dalam Pusaran Sejarah: Sebuah Kajian Historis Multidimensi

Editor:
Wahyu Agil Permana

Pengaruh Penerapan Undang-undang Agraria terhadap Pedesaan pada Masa Orde Baru

Ulfa Novitasari

Agrarische Wet adalah hukum tentang pembagian penguasaan tanah oleh pemerintah kolonial antara pemerintah, masyarakat hukum adat dan masyarakat non adat. Hukum agraria yang diselenggarakan oleh pemerintah, terbatas pada peraturan perundangan yang memberikan dasar hukum bagi penguasa untuk penegakannya. *Agrarische Wet* 1870 tampaknya menjadi kabar baik bagi masyarakat adat, karena masyarakat adat akan mendapatkan hak milik, namun Agraria Basah 1870 hanyalah alasan untuk membuka jalan bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Sejak diberlakukannya *Agrarische Wet* Tahun 1870, para pekebun di Belanda dan negara-negara Eropa yang telah memperoleh penghasilan luar biasa berdasarkan laba surplus kolonial. Istilah ini merujuk kepada akumulasi modal yang tidak biasa dari pemilik modal yang mempekerjakan pekerja bergaji rendah dengan jam kerja yang panjang.

Selain itu, pemodal tidak harus merasakan atau menanggung sebagian besar pembangunan infrastruktur, mirip jasa transportasi dan komunikasi, namun semuanya didanai negara, yang bersumber dari pajak yang di pungut negara dari penduduk kolonial. Pelaksanaan Undang-undang Agraria 1870, menjadi landasan hukum dan politik pemerintah kolonial Belanda selama lebih dari 70 tahun untuk memfasilitasi 75 tahun perusahaan kapitalis sewa-meretas di Eropa (Luthfiyah, 2018).

Di Indonesia, sistem perkebunan sudah ada sejak 1870-an. Pendudukan kolonial Hindia Belanda, menjadikan Indonesia ketika itu mengenal dua sistem perkebunan krusial, yaitu sistem pertanian negara dan sistem pertanian swasta bebas. Sebelum diterapkannya kebijakan agraria ini, masyarakat pedesaan menanam tanaman di lahannya untuk kebutuhan sehari-hari dan di bawah tekanan para pemerintah kolonial.

Masyarakat yang menanam tanaman komoditi ekspor untuk kebutuhan negara penjajah tanpa diberi imbalan atau upah yang setimpal, sehingga masyarakat pedesaan pun merasakan dampak kesengsaraan dan kemiskinan. Setelah adanya kebijakan agraria serta masuknya modal dari Barat ke dalam bisnis perkebunan, mengubah status perkebunan dan juga status tanah rakyat dan bentuk relasi sosial yang dominan (Nurbaity & Saring, 2015).

Sebagai negara pasca kolonial, Indonesia juga telah melakukan reorganisasi diri, struktur dan pengelolaan sumber daya pertanian yang tidak adil oleh sistem kolonial. Penataan ini dikenal dengan Reforma Agraria, yang berarti tanah reformasi dengan berbagai program lanjutan seperti pelatihan teknologi pertanian, produksi, kredit atau modal, serta pemasaran.

Pelaksanaan pembangunan di Indonesia selama Pemerintah Orde Baru sangat dipengaruhi modernisasi-pemikiran teoretis yang dibentuk oleh pembangunan ekonomi yang terarah pada struktur perekonomian nasional (Wiradi, 2009). Kondisi di atas diperkirakan membutuhkan tenaga pekerja di bidang pertanian menjadi semakin tidak fleksibel dan perlu untuk meninggalkan tenaga kerja di bidang industri pertanian.

Pemerintah Orde Baru masih sejalan dengan semangat penguatan industri bertani di pedesaan, dan sayangnya kegiatan ini tidak seiring dengan perbaikan struktur pertanian publisitas. Padahal, sejak 1975 telah terjadi perubahan bahan dasar kebijakan pembangunan Indonesia, memprioritaskan tindakan percepatan pertumbuhan (Suhendar, 1996). Hal itu bisa dilihat dalam Permendagri tentang Aturan Prosedur Pembebasan Tanah, yang pada dasarnya menawarkan kemudahan bagi investor untuk memperoleh tanah (Kartodirdjo, 1988).

Reorganisasi tidak hanya memengaruhi operasi dan kegunaan area, tetapi juga strukturnya kehidupan sosial yang diciptakan oleh struktur pertanian. Sehingga pada masa sekarang, pemerintah berupaya memberikan performa kepada masyarakat yang ada di pedesaan, karena pada dasarnya pedesaan merupakan organisasi

pembangun administrasi negara di bawah pimpinan pemerintahan. Dalam pembangunan desa, pemerintah menghadirkan beberapa kebijakan agraria untuk kemajuan pedesaan, yang diharapkan mampu menjadi pendongkrak ekonomi negara dengan diterapkannya beberapa kebijakan dari pemerintahan.

Meskipun bersifat prosedural, perencanaan pembangunan selama ini dapat diartikan bergerak dari tingkat desa ke tingkat nasional (di bawah). Namun dalam praktiknya, pelaksanaan pekerjaan pembangunan tetap dibentuk, diputuskan dan dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Tak heran, kasus seperti Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) sering dianggap sebagai "kasus gantung" (Bahri & Shohibuddin, 2020).

Menurut undang-undang ini, perangkat desa memiliki kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengembangan kawasan sesuai dengan potensi desa. Mengikuti Pasal 78 ayat (1) UU Desa, tentang tujuan pembangunan desa untuk meningkatkan kemakmuran serta kualitas hidup masyarakat desa dan pengentasan kemiskinan dengan pemenuhan kebutuhan pokok, pengembangan sarana dan keperluan desa, pengembangan dan pemanfaatan potensi ekonomi daerah serta sumber daya alam secara jangka panjang. Sehingga, dari masa orde baru hingga kepemimpinan era Jokowi, pemerintah mencanangkan berbagai kebijakan yang diperuntukkan untuk masyarakat, terutama masyarakat desa.

Masa Orde Baru

Di Indonesia, penggunaan kata Orde Lama untuk menyebut sistem pemerintahan di bawah Presiden Soekarno. Sedangkan Orde Baru adalah sistem pemerintahan “baru” yang diperkenalkan di Indonesia sejak 11 Maret 1966 dan diakhiri sebagai sistem pemerintahan baru dalam pemilihan umum tahun 1998. Merujuk “secara murni dan runtut” pada Pancasila dan UUD 1945, Orde Baru adalah sistem pemerintahan di Indonesia, yang menggantikan era sebelumnya berdasarkan koreksi berbagai penyimpangan yang terjadi.

Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto, lahir pada pertengahan 1960 dalam suasana krisis ekonomi, gejolak politik dan kerusuhan sosial. Namun, sebagian besar masyarakat Indonesia pada awalnya menyambut kehadiran pemerintahan Orde Baru dengan suka cita dan kehangatan. Mahasiswa, aktivis dan partai-

partai lain di bawah pemerintahan Orde Lama di bawah Presiden Soekarno merasa kecewa. Banyak orang yang menunggu pemerintahan baru ini. Mereka berharap pemerintahan Orde Baru dapat membawa masyarakat Indonesia ke kehidupan yang lebih baik (Pamungkas, 2014).

Menurut Poesponegoro (1982), pemerintahan Orde Baru menuntut adanya perbaikan peralatan penting yang tertinggal dalam keadaan kacau balau dan terabaikan saat itu. Maka dalam hal ini diperlukan pemahaman tahapan pertama dari jalan hidup rezim Orde Baru yang ditegakkan. Tahap pertama adalah konsolidasi pertama pemerintahan Orde Baru (1967-1972). Pada titik inilah sistem Orde Baru terbentuk, membangun persekutuan secara internal. Nilai-nilai modernisasi mulai menyebar dan ideologi pembangunan juga mulai berkembang.

Politik Orde Baru meliputi tiga bidang, yaitu bidang politik, ekonomi, dan sosial. pada Bidang politik adalah kembalinya Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB, pembentukan perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN, pemulihan hubungan dengan Malaysia, dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai organisasi internasional. Bidang Ekonomi adalah Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS 1966, MPRS menerbitkan beberapa program pembangunan dan dalam masalah sosial adalah pemerintah membentuk NKK dan BKK pada 1978 untuk bisa mengendalikan gerakan.

Pemikiran politik masa Orde Baru mempunyai cara dan strategi sendiri dalam membangun dan mengelola kehidupan masyarakat yang memiliki sumber agraria. Pemikiran tersebut yang mencetuskan terjadinya sebuah pembangunan masa Orde Baru. Terdapat beberapa visi dan tujuan dari

pelaksanaan landreform di Indonesia, salah satunya pembagian tanah yang dilakukan secara transparan dan adil, agar terciptanya keadilan sosial sesuai dengan Pancasila serta memberikan hak milik atas tanah bagi pemilik tanah dan tanah bukan cuman sebagai objektivitas spekulasi belaka. Kebijakan pelaksanaan agraria tersebut diambil berdasarkan asas-asas yang ada dalam UU agraria Tahun 1870, yang menjamin hak para pemilik tanah dan juga sistem pembagian tanah.

Ada tiga pokok utama yang mendasari terjadinya pembangunan pada masa Orde Baru. Pertama, mengutamakan stabilitas politik. Istilah tersebut merupakan visi politik yang mengarah pada terciptanya stabilitas yang dapat ditegakkan sebagai wahana pertumbuhan ekonomi melalui *Security Approach*.

Kedua, pembangunan ekonomi nasional dengan menghadirkan investasi asing. Dasar hukum adanya penanaman modal ini yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967, tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang tentu saja dalam praktiknya ada program untuk mendukung modal asing dalam bentuk utang luar negeri. Dengan demikian, faktor kepemilikan modal menjadikan peran swasta lebih dominan. Pertumbuhan adalah parameter utama dari kinerja pembangunan (Suhendar, 1966).

Ketiga adalah pengingkaran terhadap realitas sosial. Ini merupakan masalah sosial yang mendasar, seperti halnya dalam masalah ketimpangan struktur pertanian, yang pada dasarnya mendasari pembangunan dalam suatu pemerintahan negara. Bagi para penyelenggara negara Orde Baru, hal ini sangat kontras, menurut pemerintahan politik sebelumnya, tanah hanyalah sumber bahan mentah yang dapat digunakan untuk meningkatkan mata

uang negara. Tingkat pertumbuhan semakin cepat ketika negara menjadi ibu kota negara. Semua kebijakan, strategi dan intervensi penyelenggaraan negara lebih berorientasi pada penggunaan tanah. Tentu saja ini manipulasi penafsiran UU PA Tahun 1960 dalam konteks akumulasi. Orde baru menguasai dan memiliki (setiap jam) segala sesuatu atas nama negara sumber daya alam termasuk kandungannya (Arisaputra, 2021).

Latar Belakang Kebijakan Agraria

Pada Tahun 1830, Belanda mampu menguasai seluruh Nusantara. Hal ini memudahkan mereka untuk mencapai tujuan utama pelayaran pertama mereka, yaitu memperoleh dan menguasai daerah tropis untuk mendapatkan keuntungan. Gubernur Jenderal Van Den Bosch menerapkan sistem *Cultuurstelsel* (tanam paksa) atas persetujuan Ratu Belanda. Sistem ini merupakan seperangkat aturan

yang terutama mewajibkan masyarakat desa menyisihkan seperlima dari tanahnya untuk diekspor, yang kemudian dijual kepada negara untuk membayar tanah.

Dalam kegiatan ini, pemerintah tidak hanya meminjamkan uang kepada pengusaha melalui kontrak, tetapi juga membantu menyediakan tenaga kerja dan bahan baku seperti batang tebu. Mengalami pertumbuhan pesat seiring dengan perkebunan swasta dan beberapa di antaranya bahkan mulai membuka perkebunan baru untuk keluarganya. Mereka pikir, mereka akan berhasil jika pemerintah tidak mencegah penaburan. Hal ini menyebabkan promosi ekonomi liberal di Hindia Belanda, didukung oleh kelompok liberal di pemerintahan. Dengan demikian, sistem budidaya dapat dihapuskan, diganti dengan "kebijakan pintu terbuka". Untuk memprakarsai hal tersebut, diperkenalkan Undang-undang Pertanian

(Agrarische Wet). Tahun 1870 merupakan tonggak yang sangat penting dalam sejarah pertanian, karena sejak saat itu investor asing dari Eropa berangkat secara massal ke Hindia Belanda (Luthfiyah, 2018).

Negara adalah pemilik tanah pada masa itu, karena menguasai semua tanah bebas dan tanah tak bertuan. Hal ini memungkinkan pemerintah menjual hak milik atas tanah kepada pihak swasta. Menurut Guntur dkk (2014), ketentuan ini adalah tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Agraria Tahun 1870, yang mengatur tentang asas deklarasi tanah dan menyatakan bahwa negara menguasai seluruh tanah yang tidak bisa dibuktikan hak-hak kepemilikannya. Sudah menjadi misteri umum bahwa Indonesia ialah negara agraris, yang sebagian penduduknya memanfaatkan sumber daya yang ada (kesuburan tanah, perikanan, dan lainnya). Telah sebagai misteri umum bahwa maka, agar sumber daya alam dan lahan Indonesia dapat dimanfaatkan semaksimal

mungkin untuk kepentingan rakyat Indonesia, peraturan harus dilaksanakan.

Tanah mempunyai tempat yang sangat penting pada kehidupan manusia dalam arti hukum, karena dapat menentukan adanya dan kelangsungan hubungan hukum dan perbuatan hukum, dan dalam hal pengaruhnya terhadap orang pribadi dan orang lain. Agar urusan pertanian tidak menimbulkan konflik kepentingan sepihak dalam masyarakat, maka dibutuhkan pengaturan, serta penguasaan dan penggunaan tanah, yaitu yang disebut hukum tanah. Pada Tahun 1960 diundangkan Undang-undang Nomor 5 mengenai Peraturan Pokok Pertanian (UUPA). UUPA berlaku pada berarti sejak saat itu telah ada undang-undang pertanian nasional di Indonesia, warisan kemerdekaan setelah penjajahan Belanda.

Pembukaan Undang-undang Pokok Perbekalan Pertanian No. 5 Tahun 1960 menegaskan peran sentral tanah, bahwa tanah, air dan ruang angkasa memegang peranan yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur. Kontrol tanah dan hak terutama berfokus pada realisasi keadilan dan kekayaan dalam pembangunan masyarakat (Suhendar, 1966).

Bumi adalah kebutuhan dasar hidup manusia. Manusia hidup di bumi, berfungsi sedemikian rupa sehingga manusia selalu bersentuhan dengan bumi, dapat dikatakan hampir semua aktivitas kehidupan manusia selalu membutuhkan bumi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tanah mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia Indonesia, atau dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang dilakukan sebagai upaya berkelanjutan, untuk mewujudkan

masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Hanya di Indonesia, kasus sengketa pertanahan, khususnya sengketa pertanian sektor perkebunan tidak kunjung usai, bahkan cenderung semakin kompleks dan jumlah persoalannya semakin bertambah sesuai dengan dinamika Indonesia. Ekonomi, sosial dan politik. Sebagai contoh, saat ini ada orang di Indonesia, dan akibat situasi ekonomi yang melemah, orang yang benar-benar merasakan dampaknya. Tanah memegang peranan penting dalam dinamika pembangunan, oleh karena itu Pasal 33(3) UUD 1945 menyatakan: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan harus dipergunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran negara-negara rakyat".

Gambaran dari latar belakang UUD di atas dapat dilihat, bahwa tanah sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia, yang terutama tanah pertanian dengan sangat tinggi intensitas penggunaan lahan dan sarana lainnya. Namun, UU Pokok Pertanian selama ini belum berjalan efektif, banyak dilakukan oleh kerabat untuk kepentingan pribadi atau kelompok selain untuk kepentingan rakyat. *Agrarische Wet* 1870 menawarkan jaminan kebebasan serta keamanan pada pengusaha (investor). Undang-undang ini menekankan bahwa warga tata cara bisa mempunyai tanah. Akan tetapi, orang asing bisa menyewanya, berasal negara selama 75 tahun atau berasal pemilik lokal selama 5-20 tahun (sinkron menggunakan syarat kepemilikan tanah).

Sesudah sosialisasi human Basah di Agraria di tahun 1870, perkebunan partikelir bisa dibuat di pulau Jawa dan di wilayah pada luar Jawa. Di saat

yang sama, serta pengembangan transportasi kapal uap (sebagian milik Inggris) mendorong pengembangan partikelir dengan bisa memperbaiki sistem komunikasi menggunakan Eropa (Ricklefs, 2008).

Salah satu kebijakan aturan pemerintah kolonial Belanda yang berdampak besar terhadap keberadaan tanah ulayat adalah dikeluarkannya *Agrarisch Wet 1870,* serta peraturan pelaksana *Agrarisch Besluit* Tahun 1870 yang menerapkan asas dominasi tanah. Landasan aturan tanah wilayah jajahan, lalu dirumuskan pada pasal 1 dalam *Agrarische Besluit* 1870, yang merupakan penjelasan UU Agraria Tahun 1870. Pasal 1 UU Agraria 1870 menegaskan bahwa semua tanah adalah milik negara *(Landsdomein),* jika tidak dapat dibuktikan dengan kepemilikan “tanah”.

Dengan demikian, struktur kepemilikan tanah yang dipertahankan oleh pemerintah Hindia Belanda di daerah jajahan, berarti hanya mengakui dua badan hukum sebagai pemegang “hak milik” atas tanah, yaitu negara dan rakyat sebagai badan hukum eksklusif (Sudrajat, 2019). Dengan disahkannya Undang-undang Pertanian Tahun 1870, maka terbentuklah perkebunan-perkebunan swasta di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Sementara perkebunan swasta di Sumatera, pengusaha diberikan izin membuka lahan perkebunan. Ekonomi liberal yang didasarkan pada Undang-undang Agraria 1870, memberikan hak khusus kepada perusahaan swasta. Perubahan ini dimulai dengan kebijakan ekonomi pemerintah kolonial yang menerbitkan Undang-undang Pertanian *(Agrarische Wet Staatblad)* pada Tahun 1870, di mana undang-undang tersebut tidak hanya meringankan setengah dari beban pemerintah kolonial dalam membiayai

kegiatan ekonomi di Hindia Belanda, tetapi di sisi lain, juga memberi ruang untuk mempertimbangkan kepentingan kemitraan komersial barat untuk berinvestasi di sektor perkebunan.

Namun, Undang-undang Agraria Tahun 1870 tidak bisa dijadikan rujukan untuk negara yang ingin membebaskan diri dari penjajahan. Oleh karena itu, untuk membuat sebuah regulasi tentang dasar hukum agraria untuk pengganti hukum agraria dari kolonial yang eksploitatif, maka dicetuskanlah oleh rezim masa orde lama dengan membuat kebijakan yang berkaitan dengan agraria mengenai sistem pertanahan nasional menjadi RUU Agraria, yaitu peraturan dasar pokok-pokok agraria atau yang disebut dengan UU PA tahun 1960 yang mengatur tentang sumber daya alam dan di dalamnya. Namun dalam penerapannya mendapatkan beberapa hambatan, salah satu penyebabnya adalah petani yang ada di pedesaan tidak ingin adanya pembagian

hak tanah, sehingga kebijakan turunan tersebut tidak dapat terealisasikan dengan baik, terlebih runtuhnya orde lama dan masuknya orde baru.

Di bawah pemerintahan rezim orde baru, UU PA yang mulanya untuk penataan agraria bertujuan memberikan keadilan untuk para petani, justru pemerintahan pada masa orde baru banyak membuat kebijakan UU sektoral lain yang memuat tentang pengadaan lahan dengan skala besar untuk mendapatkan sebuah modal, salah satunya memperbolehkan para pihak asing atau investor untuk menanam modal. Hal tersebut terinspirasi dari kebijakan Undang-undang Agraria tahun 1870. Pada masa orde baru, banyak melahirkan peraturan seperti kebijakan agraria, pemerintahan orde baru tidak melakukan suatu perubahan struktur dari birokrasi yang pernah dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda, namun melainkan terus saja melanjutkannya struktur birokrasi tersebut.

Pemerintah orde baru yang telah membangun sebuah birokrasi yang bertingkat dan sulit di jangkau oleh masyarakat, justru malah menghambat terciptanya masyarakat serta struktur masyarakat yang egaliter. Pelayanan birokrasi yang hanya berdasar loyalitas pada pihak elite dan kroninya, terkhusus para kalangan pemilik modal. Sejak berkuasanya orde baru, Direktorat Jenderal Agraria menjadi sarana konsolidasi pertanahan (Sudrajat, 2019).

Orde baru yang telah melakukan sebuah lompatan dengan melakukan percepatan industrialisasi, yang itu tanpa penyelesaian penataan sumber-sumber agraria yang jauh lebih adil. Hal itu tidak saja menyangkut kekuatan ekonomi yang ada dalam masyarakat, tetapi juga kesiapan pemerintah itu sendiri. Prioritas program pada saat itu, yaitu yang pertama untuk meningkatkannya taraf kehidupan rakyat dengan titik tekan bidang

ekonomi, yang meliputi sektor pertanian atau irigasi, industri dan pertambangan, tenaga listrik, perhubungan dan pariwisata serta desa. Kemudian untuk prioritas yang ke dua, bidang sosial yang meliputi kesehatan atau keluarga berencana, pendidikan atau kebudayaan, agama, tertib hukum lain-lain. Dengan adanya program tersebut, kemudian memberikan peluang bagi ketertiban para pemodal besar dalam proses pembangunan nasional. Tentu saja peluang tersebut dimanfaatkan oleh pemodal besar yang melihat dari keterbatasan anggaran pada pemerintahan Orde Baru (Maschab, 2013).

Dampak Penerapan Kebijakan Agraria

Berkat kebijakan ekonomi liberal pemerintah Belanda melalui *Agrarische Besluit* Tahun 1870, sistem perkebunan skala besar mulai muncul di negara jajahannya. *Agrarische Wet* 1870 dan *Suiker*

Wet 1870 disahkan dan menjadi dasar pembukaan perkebunan swasta di Pulau Jawa. kebijakan kolonial, yaitu periode liberal (1870-1900), dimulai dengan pembukaan perkebunan swasta.

Sistem perkebunan swasta pada saat itu umumnya memiliki empat ciri, yaitu: pertama, berorientasi pada ekspor skala besar. Kedua, kebutuhan akan pekerjaan sangat besar dibandingkan dengan apa yang dapat disediakan oleh pasar domestik. Ketiga, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan mekanisme non-pasar (paksaan aparat pemerintah) sangat besar dibandingkan dengan apa yang dapat ditawarkan pasar domestik. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mekanisme Non pasar (pemaksaan aparat pemerintah) sangat dominan dalam memaknai relasi sosial masyarakat. Dan keempat, tumbuhnya budaya khusus yang memperkuat relasi sosial yang muncul (Wiradi, 2009).

Agrarisch Wet negara tidak memiliki tanah, maka menurut asas kedaerahan, negara menguasai semua tanah kecuali yang dapat diperlihatkan sebagai hak milik dan hak milik agraria. Domein Verklaring memimpin Indonesia menurut sistem hukum yang asli. kalimat properti dalam Pasal 1 AB 1870 menciptakan 3 (tiga) pengertian: Pertama, tanah yang disebut sebagai hak milik dan hak milik pertanian dalam hukum perdata dapat diartikan sebagai hak milik. Kedua, berarti tanah ialah segala bentuk kepemilikan eksklusif, termasuk hak, tetapi tak termasuk hak milik adat (milik komunal) yang dianggap hak ulayat. Ketiga, hak properti sipil dan hak hukum umum setara dengan properti, termasuk hak hukum umum, dapat dimasukkan. Dalam praktiknya, pertama digunakan.

Setelah pengenalan lahan basah Agraria di Jawa pada 1870, budidaya dimaksimalkan semaksimal mungkin. Di daerah dengan demografis

dataran tinggi, ladang dibudidayakan kopi, teh, kina, dan singkong, sedangkan tebu, kakao, dan tembakau dibudidayakan di dataran rendah (Arisaputra, 2021).

Pertumbuhan yang paling terlihat dalam privatisasi perkebunan yang ada di Jawa, ialah peningkatan industri gula (saat itu merupakan komoditas penting di Hindia Belanda) ketika modal swasta melimpah. Perkebunan gula serta banyak mandor lainnya dapat mengimpor perangkat keras dan peralatan berbeda yang dapat menambah efisiensi produksinya. Misalnya, perluasan area produksi dan metode produksi yang digunakan dalam industri ini telah menghasilkan peningkatan pesat dalam produksi di perkebunan gula (Sudrajat, 2019).

Di Pulau Jawa, tebu ditanam pada 54.176 hektar pada 1870. Kemudian lagi, produksi gula berkembang lebih cepat, dari 2.440.000 pikul pada

1870 menjadi 12.050.544 pikul pada 1900. Budidaya juga berkembang pada 1900an, terutama ketika perusahaan perkebunan mulai menanam teh asam Jawa. Tanaman ekspor lain yang produksinya meningkat adalah tembakau. Jauh sebelum itu, tembakau dibudidayakan di daerah Yogyakarta dan Surakarta. Pada era liberal, para pengusaha Belanda juga mendirikan perkebunan tembakau di sekitar Basuk di Jawa Timur yang kemudian berkembang pesat.

Selain itu, perkebunan tembakau besar didirikan di Sumatera Timur, dekat Deli, oleh bisnis dan modal Belanda. Kopi dan kina adalah dua tanaman komersial tambahan yang memiliki perkebunan besar dan juga berkembang pesat. Sebab hampir 90% kina digunakan pada semua global pada ketika itu, asal berasal perkebunan kina di pulau Jawa. Hindia Belanda menjadi produsen kina terkemuka pada dunia. Namun, perkembangan kopi

lebih lambat dibandingkan menggunakan sistem tanam paksa saat ini (Poesponegoro, 1982).

Pada akhir Abad ke-21, terjadi perubahan baru pada kehidupan ekonomi Hindia Belanda: sistem liberal yang asli, dengan persaingan bebas ditinggalkan dan dialihkan dengan tatanan ekonomi yang lebih terkontrol. Kehidupan sosial ekonomi di Hindia Belanda, khususnya di Jawa, mulai didandani dengan ekonomi yang ada di masyarakat serta industri Belanda. Perkebunan besar tak lagi memiliki wewenang yang mendiami daerah di Jawa (Daliman, 2012).

Agrarische Wet 1870 memberikan jaminan kebebasan dan keamanan pengusaha (investor). Undang-undang tersebut menegaskan bahwa masyarakat adat dapat memiliki tanah, tetapi orang asing dapat menyewanya dari negara selama 75 tahun atau dari pemilik aslinya selama 5-20 tahun

(tergantung kondisi kepemilikan tanah) (Ricklefs, 2008).

Setelah diperkenalkannya *Agrarische Besluit* 1870 di Jawa, penanaman dimaksimalkan semaksimal mungkin. Teh, kina, kopi, dan singkong ditanam di kebun di daerah dengan struktur populasi pegunungan yang tinggi, sedangkan tebu, kakao dan tembakau ditanam di perkebunan di dataran. Kebijakan Undang-undang dan ekonomi liberal tersebut juga berdampak terhadap pedesaan khususnya di Jawa. Pengaruh pembebasan Jawa liberalisasi, modal swasta di Jawa membawa dampak, salah satunya adalah beralihnya penguasaan negara dari tangan rakyat ke tangan korporasi. Meski disewa, banyak petani yang menjadi buruh perkebunan, karena masa sewa yang panjang. Ada pekerjaan, tapi harus ditukar dengan petani mandiri yang bertani sendiri (Arisaputra, 2021).

Para petani menjadi tergantung pada sistem pengupahan dan tidak bisa lagi berdiri sendiri. Masalahnya, para petani yang beralih menjadi pekerja ini juga memiliki tugas lain. Mereka masih dibebani dengan kerja paksa, yang meskipun tidak berstatus kerja paksa, namun tetap mengisi waktu luangnya, sehingga sisa waktu untuk bekerja di lahan penghidupan yang tersisa juga habis.

Penelitian Anne Booth menunjukkan bahwa penanaman padi menurun tajam antara 1885 dan 1899. Sensus yang dilakukan di Kutoharjo pada 1886 dan 1888, menunjukkan betapa miskinnya penduduk pada waktu itu. Kajian ini dilakukan oleh H.G. Heyting, seorang insinyur yang bekerja sebagai pengawas lalu lintas udara. Dia menemukan bahwa setiap rumah tangga hanya memiliki 0,75 ha sawah, 0,5 ha kebun pekarangan, dan 0,1 ha lahan kering.

Keluarga Heyting yang beranggotakan lima orang, termasuk kepala keluarga, menemukan bahwa pendapatan tahunan para petani hanya 63 gulden, 13 di antaranya dipinjam dari rentenir. Masuknya modal swasta dan asing secara tiba-tiba ini, sering kali disertai dengan terbukanya kesempatan kerja, sering kali tampaknya tidak meningkatkan taraf hidup masyarakat, masyarakat pada umumnya sangat memperburuk kualitas tanahnya. Iming-iming lapangan kerja muncul kembali saat ini, ketika perusahaan besar berupa pabrik semen, perkebunan kelapa sawit dan perusahaan air minum dalam kemasan menyerbu desa-desa terpencil (Matanasi, 2017).

Semakin majunya perkembangan zaman, kebijakan Undang-undang Agraria tahun 1870 yang dicanangkan oleh pemerintah kolonial semakin memudar, bahkan dihapuskan dan digantikan oleh kebijakan agraria yang baru seperti UUPA dan

beberapa kebijakan sektoral yang merupakan turunan dari UU Agraria tahun 1870. Kebijakan tersebut lebih di fokuskan pada masyarakat pedesaan yang memiliki lahan tanah.

Munculnya orde baru membawa perubahan yang signifikan di pedesaan. Karena proses peralihan dengan syok berat, termasuk semua dasar-dasar kebijakan pedesaan program transformasi pertanian. Kekuatan orde baru benar-benar kontras. Pada masa orde baru, pertimbangkan kekayaan dan sumber daya alam, kebijakan pertanian berdasarkan Revolusi Hijau yang bertujuan untuk meningkatkan produksi tanaman pangan (Bahri & Shohibuddin, 2020).

Warisan terpenting dalam masa orde baru setidaknya menyisakan tiga masalah besar yang dihadapi masyarakat pedesaan saat ini, yaitu ketidaksamaan terkait dengan kepemilikan, penggunaan dan eksploitasi sumber daya alam, terutama konflik tanah dan agraria. Pada

pemerintahan orde baru, kebijakan struktur negara berada pada tatanan makro militer. Demikian pula, struktur administrasi para pemimpin pertanian yang mengembangkan pemahaman *top-down* tentang militerisme. Hampir semua pembantu presiden diawasi dan diarahkan oleh perwira militer senior.

Orde baru mengambil lompatan ke depan untuk mempercepat proses industrialisasi yang tidak melengkapi pengaturan sumber daya pertanian yang lebih adil. Proses industrialisasi masyarakat pedesaan saat itu tidaklah mudah. Hal ini tidak hanya terkait dengan kekuatan ekonomi masyarakat yang ada, tetapi juga dengan kehendak pemerintah itu sendiri.

Pengalaman yang terjadi pada kolonial, mengungkapkan kelas ekonomi yang menjadi tulang punggung perekonomian Hindia Belanda adalah kaum bangsawan. Akibatnya, proses perubahan sosial masyarakat pada saat itu tidak

berlangsung. Fokusnya hanya pada kapitalis dan bangsawan asing, tapi pengalaman sejarah itu tidak menjadi acuan Orde Baru untuk melaksanakan pembangunan nasional. Sengketa pertanian dan sengketa tanah merupakan titik gesekan yang mengganggu efisiensi kehidupan pertanian dan perikanan (Suhendar,1966).

Setidaknya ada dua hal pemicu konflik pertanian, yang pertama adalah belum adanya undang-undang dan kebijakan khusus yang mengatur masalah pertanian, baik yang berkaitan dengan pandangan tentang tanah, statusnya, penguasaannya, dan hak-haknya, serta cara memperoleh hak atas lahan tanah. Selanjutnya, terjadi ketidakpedulian dan ketidakadilan dalam menyelesaikan sengketa tanah, yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik.

Akibatnya, banyak nelayan dan petani yang merugi dan menjadi reaksioner. Mayoritas mereka yang hidup dalam kemiskinan di daerah terdalam, seperti pedesaan adalah petani dan nelayan akibat pengangguran. Akibatnya, tujuan Reforma Agraria adalah untuk membuat pemilikan dan pemilikan tanah menjadi lebih setara, yang sebenarnya memberikan harapan baru bagi masyarakat akan perubahan dan pemerataan sosial ekonomi. Salah satu prioritas utama pemerintahan adalah Reforma Agraria, yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan taraf hidup Indonesia berdasarkan UU Pertanian tahun 1960.

Pertama, untuk memenuhi ketimpangan yang terjadi di struktur pertanian, kedua, untuk menyelesaikan konflik pertanian, dan ketiga, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat setelah pelaksanaan reformasi pertanian. Reforma Agraria pada hakikatnya menawarkan program-program

untuk mengatasi masalah kemiskinan masyarakat pedesaan, meningkatkan kesejahteraan melalui swasembada pangan nasional, dan meningkatkan produktivitas lahan, mengakui hak kepemilikan pribadi, negara, dan publik atas tanah yang dimaksudkan untuk digunakan dalam memenuhi kepentingan pedesaan.

Masyarakat Reformasi agraria mengambil tiga bentuk: legalisasi properti, redistribusi tanah dan perhutanan sosial, berupa Reforma Agraria yang dilakukan pada 9 juta hektar rencana pembangunan jangka menengah dan legalisasi secara sistematis terhadap 4,5 juta hektar tanah milik, adalah kebijakan pemerintah Orde baru, hanya sebatas pembinaan dan kepemimpinan dengan harapan dapat berkembang secara sehat dan berakal.

Pemerintah seolah memberikan kebebasan kepada pemilik modal dalam proses pembangunan nasional. Sebagian besar investasi dibiayai dan

dilaksanakan oleh investor sendiri tanpa keterlibatan negara. Tentu saja, ini adalah langkah yang sangat menguntungkan bagi investor besar. Namun, Menurut Bahri & Shohibuddin (2020) untuk konflik pertanian dalam 11 tahun terakhir, 2004-2015, bagi masyarakat yang menjadi korban konflik pertanian. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa rata-rata konflik pertanian terjadi setiap hari di Indonesia.
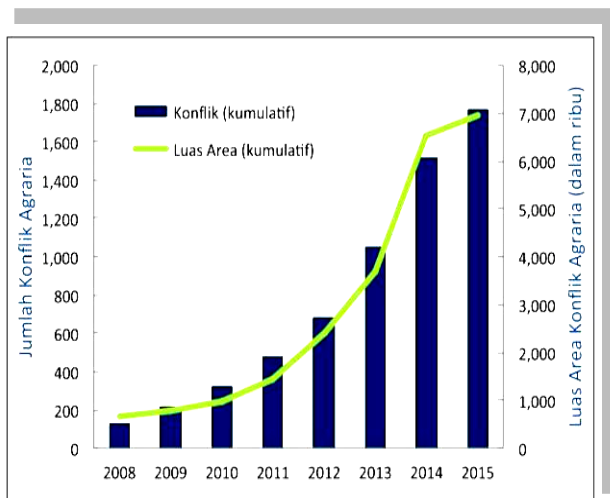
Gambar 1. Konflik Agraria Tahun 2008-2015

Sumber: Konsorsium Pembaharuan Agraria

Pada grafik tersebut dapat diartikan bahwa, mayoritas kebanyakan setiap harinya telah terjadi konflik pertanian di Indonesia. Bahkan dikaitkan dengan kemiskinan, Maret 2013 orang miskin di negeri ini mencapai 17,74 juta orang atau sekitar 14,32 persen seluruh penduduk Indonesia. Dari informasi ini, perlu juga dicatat bahwa sebagian besar orang miskin bekerja di pedesaan dan sebagai petani kecil dan nelayan.

Selama 20 tahun (1993-2013), jumlah petani yang semula 10,8 juta jumlah rumah tangga, tumbuh menjadi 13,7 juta. Dari tahun 2003 sampai 2013, terjadi penurunan dengan 5,04 juta pemilik tanah kurang dari 0,1 ha (Sensus Pertanian, BPS; 1993, 2003, 2013). Pengurangan ini belum termasuk penambahan luas bangunan rumah tangga petani miskin, tetapi juga terbentuk perubahan pekerjaan dari bertani ke sektor lain, seperti sektor informal, pekerja lepas, pekerja migran dan lain-lain. Sehingga

pada masa orde baru, perlu dilakukan perubahan dengan beberapa kebijakan, mengacu pada Perpu MPR, pedoman kebijakan reformasi pertanian adalah:

a. Pemeriksaan peraturan perundang-undangan yang terkait, disinkronkan dengan pertanian, langkah-langkah lintas sektoral untuk implementasi peraturan perundang-undangan berdasarkan prinsip-prinsip peraturan MPR
b. Melakukan pengalihan kejuaraan, kepemilikan, penggunaan dan pemakaian
c. Hanya Reforma Agraria yang memperhatikan kepemilikan tanah orang
d. Organisasi pengumpulan data negara melalui inventarisasi dan pendaftaran properti, kepemilikan, penggunaan dan pemakaian komprehensif dan sistematis, terkait dengan pelaksanaan agraria

e. Penyelesaian konflik yang relevan dengan sumber daya pertanian yang terkait
f. Pada saat yang sama, ini dapat memberi pertanda potensi melindungi dari konflik di masa depan, penegakan hukum sesuai dengan asas-asas yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan
g. Kelembagaan kewenangannya terkait pelaksanaan Reformasi Agraria dan resolusi konflik atas sumber daya pertanian itu
h. Mengajukan permohonan dana untuk melaksanakan program reformasi pertanian dan Arbitrase Sengketa Tanah terjadi.

Kesimpulan

Orde Baru adalah sistem pemerintahan “baru” yang diperkenalkan di Indonesia sejak 11 Maret 1966 dan diakhiri sebagai sistem pemerintahan baru dalam pemilihan umum tahun 1998. Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Suharto, lahir dalam suasana krisis ekonomi, gejolak politik dan kerusuhan sosial. Pemikiran politik masa orde baru mempunyai cara dan strategi sendiri dalam membangun dan mengelola kehidupan masyarakat yang memiliki sumber agraria.

Beberapa visi dan tujuan dari pelaksanaan landreform di Indonesia salah satunya, pembagian tanah yang dilakukan secara transparan dan adil, agar terciptanya keadilan sosial sesuai dengan Pancasila, serta memberikan hak milik atas tanah bagi pemilik tanah dan tanah bukan cuma sebagai objektivitas spekulasi saja.

Ketentuan ini dituangkan pada Pasal 1 Undang-undang Agraria tahun 1870, yang mengatur tentang asas pencanangan tanah, menetapkan bahwa segala tanah yang tidak dapat ditunjukkan kepemilikannya adalah milik negara (Guntur dkk, 2014). Pemerintah kolonial yang menerbitkan UU Pertanian *(Agrarische wet Staatblad)* pada 1870, di mana undang-undang tersebut meringankan setengah dari beban pemerintah kolonial dalam membiayai kegiatan ekonomi di Hindia Belanda.

Untuk membuat sebuah regulasi tentang dasar hukum agraria, untuk pengganti hukum agraria dari kolonial, dicetuskanlah oleh rezim masa orde lama dengan membuat kebijakan peraturan dasar pokok-pokok agraria atau yang disebut dengan UUPA 1960, yang mengatur tentang sumber daya alam dan di dalamnya. Dan runtuhnya orde lama serta masuknya orde baru. Pada masa orde baru, banyak membuat kebijakan UU sektoral lain, yang memuat tentang

pengadaan lahan dengan skala besar untuk mendapatkan sebuah modal, salah satunya memperbolehkan para pihak asing atau investor untuk menanam modal, hal tersebut terinspirasi dari kebijakan Undang-undang agraria tahun 1870.

Kebijakan pemerintah Orde Baru hanya sebatas penyuluhan dan bimbingan dengan harapan dapat berkembang secara sehat dan cerdas. Pemerintah seolah memberikan kebebasan kepada pemilik modal dalam proses pembangunan nasional. Sebagian besar investasi dibiayai dan dilaksanakan oleh investor sendiri tanpa keterlibatan negara. Tentu saja, ini adalah langkah yang sangat menguntungkan bagi investor besar. Era Orde Baru memiliki banyak peraturan seperti kebijakan pertanian. Pemerintah Orde Baru tidak melakukan perubahan (amandemen) struktur birokrasi yang diperkenalkan oleh pemerintah Hindia Belanda, melainkan melanjutkan struktur birokrasi.

Pada masa Orde Baru terjadi peralihan dari masyarakat dengan model pertanian tradisional yang eksklusif, ke hubungan sosial ekonomi baru, yang secara alami dapat menyejahterakan rakyat dan bangsa. Malseka Agraria 1870 *(Agrara Malseka)* dan Malseka Gula *(Suiker Malseka)* 1870, disahkan dan menjadi dasar pembukaan perkebunan swasta di pulau Jawa.

Kehidupan ekonomi Hindia Belanda telah mengalami perubahan baru pada abad ke-21. sistem persaingan bebas yang hanya bersifat liberal ditinggalkan dan digantikan oleh tatanan ekonomi yang lebih terkontrol. Selama Orde Baru, pertimbangkan kemakmuran dan sumber daya alam. Kebijakan pertanian didasarkan pada Revolusi Hijau dan bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan. Namun, ada dua kendala pelaksanaannya yang memicu terjadinya konflik agraria, pertama, tidak adanya undang-undang dan kebijakan yang

tepat mengatur masalah pertanian, baik terkait pandangan tentang tanah, status dan penguasaan tanah, hak atas tanah, dan cara. Proses penyelesaian konflik lahan yang kemudian menimbulkan konflik.

Oleh sebab itu, banyak petani dan nelayan kehilangan mata pencaharian dan menjadi pengangguran. Pengangguran telah menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk miskin di daerah terpencil, seperti pedesaan, yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan nelayan. Oleh karena itu, *landreform* digagas untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah dan properti, serta membawa harapan baru bagi perubahan sosial dan pemerataan sosial ekonomi bagi seluruh rakyat, tanpa adanya ketimpangan sosial dalam kehidupan masyarakat, terutama Indonesia.

Daftar Pustaka

Arisaputra, M. I., & SH, M. K. (2021). *Reforma agraria di Indonesia*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).

Bahri, A. D., & Shohibuddin, M. (Eds.). (2020). *Perjuangan Keadilan Agraria: Inspirasi Gunawan Wiradi*. Sajogyo Institute.

Daliman, A (2012). *Sejarah Indonesia pada abad ke-19 hingga ke-20: sistem politik kolonial dan administrasi Belanda.* Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Guntur, I. G., Widowati, D. A., & Luthfi, A. N. (2014). Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Penguasaan Masyarakat Adat di Kawasan Hutan Adat.

Kartodirdjo, S. (1988). *Pengantar sejarah Indonesia baru: 1500-1900*. Jakarta: Gramedia.

Luthfiyah, W. (2018). Pengaruh Undang-undang Agraria 1870 Terhadap Eksistensi Komunitas Arab di Ampel Surabaya Pada Tahun 1870-

1930 M. *Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya*.

Maschab, M. (2013). *Politik pemerintahan desa di Indonesia*. Research Centre of Politics and Government, Department of Politics & Government, FISIPOL UGM.

Matanasi, P. (2017). Kejamnya Penggusuran Warga Kedung Ombo dengan Dalih Pembangunan. *tirto. id, Satelit di: https://tirto. id/kejamnya-penggusuranwarga-kedung-ombo-dengan-dalihpembangunan-cBfv*.

Nurbaity, N., & Saring, S. (2015). SWASTANISASI PERKEBUNAN TEH DI BOGOR 1905-1942. *Sosio e-Kons*, *7*(3).

Pamungkas, S. B. (2014). *Ganti Rezim Ganti Sistim-Pergulatan Menguasai Nusantara*. Sri-Bintang Pamungkas.

Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (1982). *Sejarah Nasional Indonesia IV*. Proyek

Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*. Penerbit Serambi.

Sudrajat, M. (2019). Penerapan Agrarische Wet (Undang-Undang Agraia) 1870: Periode Awal Swastanisasi Perkebunan Di Pulau Jawa. *HISTORIA*, *7*, 2.

Suhendar, E. (1996). *Tanah Sebagai Komoditas: kajian kritis atas kebijakan pertanahan Orde Baru*. ELSAM.

UU No. 1 Tahun 1958 tentang Pembuangan Partikel Tanah. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Aturan Pokok Pertanian.

UU No. 13 Tahun 1948 Ketentuan yang mengubah Peraturan Vorstenlands Grondhuur.

Wiradi, G. (2009). *Reforma agraria: dari desa ke agenda bangsa*. IPB Press.

Profil Penulis

Ulfa Novitasari lahir di Lampung Selatan, 23 November 2002. Seorang mahasiswi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung yang aktif berorganisasi. Saat ini, ia menjabat sebagai Ketua Bidang Pendidikan dan Penelitian di Forum Komunikasi Mahasiswa Pendidikan Sejarah (Fokma) Unila, sekaligus Ketua Laboratorium Pendidikan Sejarah Unila. Ulfa juga memimpin proyek sosial "Lampung Sikam" di bawah naungan Dompet Dhuafa, sebagai wujud nyata kontribusinya terhadap pengabdian masyarakat.

Selain itu, Ulfa dikenal sebagai mahasiswa berprestasi di Universitas Lampung 2024, dengan berbagai pencapaian di tingkat nasional dan internasional, khususnya dalam bidang karya tulis ilmiah. Karya tulisnya berjudul *Sejarah Perkebunan Tembakau Lampung* telah diterbitkan menjadi buku. Dengan semangat belajar yang tinggi dan tekad

yang kuat, Ulfa terus berupaya memberikan dampak positif melalui akademik, organisasi, serta kegiatan sosial lainnya. Media sosial akun Instagram: @ulfanvtra

Indonesia dalam Pusaran Sejarah: Sebuah Kajian Historis Multidimensi

Editor:
Wahyu Agil Permana

Melk Oorlog: Perseteruan Bisnis Dalam Industri Susu di Bandung Tahun 1927-1936

Rismayanti Khomairoh, Elsa Silvana Amalia,
Dhimas Purnomo Adjie

Hindia Belanda menjadi negara koloni yang menguntungkan bagi pemerintah kolonial, karena dukungan sumber daya alam yang melimpah. Pulau Jawa menjadi fokus bagi pemerintah kolonial, karena memiliki potensi yang besar dalam berbagai aspek. Kondisi tersebut mulai terlihat pasca terjadinya Perang Jawa pada abad ke-19, yang menyebabkan perekonomian Belanda mengalami defisit besar, sehingga diperlukan terobosan baru khususnya dalam bidang ekonomi untuk mengisi kekosongan

kas Belanda. Diawali dari kebijakan *Cultuurstelsel* hingga dikeluarkannya *Agrarische Wet* pada paruh abad ke-19, mendorong terjadinya sirkulasi penduduk yang cepat ditandai dengan peningkatan jumlah penduduk Eropa di Jawa (Handinoto, 2004).

Guna mendukung kebutuhan orang-orang Eropa untuk bekerja dan rekreasi, kemudian muncul kota-kota *Garnizun* di Jawa sebagai tempat produksi, distribusi dan perdagangan hingga kota peristirahatan. Salah satu Kota *Garnizun* adalah Bandung dengan *Garnizun* di Cimahi untuk pedalaman Jawa Barat (Handinoto, 2004). Aktivitas produksi dan pusat pekerjaan beroperasi di daerah dataran rendah dengan cuaca panas, sedangkan aktivitas rekreasi dan tempat peristirahatan dilakukan orang-orang Eropa di dataran tinggi termasuk di kawasan Bandung.

Aktivitas ekonomi banyak dilakukan di daerah pegunungan, salah satunya peternakan. Sektor ini yang cukup penting bagi perekonomian penduduk desa sekaligus memainkan peranan penting dalam pembangunan pertanian. Akan tetapi, peternakan belum menjadi sentra yang familier bagi masyarakat pribumi, khususnya peternakan sapi perah yang menghasilkan susu (Nawiyanto, 2018). Pada masa kolonial Belanda, usaha peternakan pertama kali didirikan di daerah pegunungan Jawa Barat.

Bandung menjadi salah satu daerah yang menjadi fokus usaha peternakan sapi perah, karena memiliki iklim yang cocok dengan suhu dingin seperti di Eropa. Selain itu, faktor lain yang mendukung didirikannya peternakan sapi perah di Bandung, ialah ketersediaan rumput sepanjang tahun, serta biaya operasional rendah, karena posisi mudah dijangkau daerah lain (*Nederlandsch*

Weekblad voor Zuivelbereiding en-Handel, September 18, 1934).

Peternakan sapi perah di Bandung memiliki kualitas unggul, seperti peternakan di Cisarua yang mendatangkan sapi perah dari Friensland, Belanda (Herlinawati, 2011). Peternakan *Generaal de Wet* merupakan salah satu peternakan di Hindia Belanda yang sukses fokus beternak sapi perah Belanda dan awal beroperasi pada tahun 1903 yang terletak di ketinggian 4.500 kaki di Tjisaroea, sekitar 16 Km dari Bandung (*Nederlandsch weekblad voor zuivelbereiding en-handel,* Desember 9, 1924).

Akan tetapi, belum ada catatan sejarah secara pasti yang menyebutkan kapan pertama kali peternakan sapi perah berdiri di Bandung. Hanya saja, setiap peternakan memiliki perusahaan susu masing-masing dan keduanya saling bersinergi. Di daerah Bandung terdapat 35 peternakan sapi kecil yang berdiri di samping beberapa peternakan besar

lainnya (*Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indie,* 14 September, 1927).

Pada tahun 1921, penelitian yang dilakukan di berbagai peternakan sapi perah di daerah Bandung, menunjukkan bahwa rata-rata hasil per ekor sapi dan per hari dapat ditetapkan maksimal 3 liter, yaitu 5 fl. 600 cc (*Ploegman, V.W.C, Het Melkveehoudersbedrijf: rond een Indischen Middenstand*, 1935).

Kemudian dari Indian Farm, menyebutkan rata-rata harian 4 hingga 5 liter untuk produksi sapi lokal. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi peternakan di dataran tinggi Bandung telah berkembang ke arah yang baik. Perusahaan lain memproduksi hampir 9000 liter dalam satu bulan dengan 56 ekor sapi perah, sehingga mencapai rata-rata 5 1/2 liter (*Ploegman, V.W.C, Het Melkveehoudersbedrijf: rond een Indischen Middenstand*, 1935).

Tingginya angka produksi susu di Bandung menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi, karena terjadi surplus. Produksi susu segar yang setiap hari dihasilkan harus terjual pada hari itu juga dan belum ada pengolahan ke produk lain, sehingga ancaman harga menjadi taruhannya. Kondisi tersebut yang kemudian memicu terjadinya permainan harga di pasaran dan dikenal dengan fenomena *Melk Oorlog* atau Perang Susu.

Perkembangan Perusahaan Susu Tahun 1927-1936

Terdapat peternakan besar di Bandung bernama *Generaal de Wet* milik Tuan Hirschland dan Zijn dan peternakan susu milik keluarga Ursone bernama *Lembangsche Melkerijen* (*Bataviaasch nieuwsblad,* Desember 11, 1931). *Lembangsche Melkerijen* sebagai peternakan besar di Lembang yang didirikan oleh Ursone bersaudara pada tahun

1895. (*Bloem, F.A.C, Rapport over de studiereis* November 1928-April 1929 *door Nederlandsch-Oost-Indië;* 1929). Perusahaan ini diakui sebagai perusahaan modern, dengan pendapatan terbesar di Hindia Belanda (*Algemeen Indisch dagblad: de Preangerbode,* Januari 1, 1931). Pada 1929, Perusahaan Ursone memiliki 2.000 ekor sapi yang didominasi jenis sapi Frisian (*De RK boerenstand: Officieel orgaan van den Nederlandschen Boerenbond,* Desember 23, 1929).

Posisi Lembang yang berupa kawasan dataran tinggi sangat potensial untuk didirikan peternakan sapi perah, sehingga hal tersebut menjadi fondasi utama dalam mendirikan peternakan. Awal berdirinya *Lembangsche Melkrijen* dengan 30 ekor sapi perah yang terdiri dari sapi perah impor dan peranakan sapi hasil kawin silang mampu menghasilkan 100 botol susu per hari (*Algemeen Indisch dagblad: de Preangerbode,* 4 Januari 1931).

Pada 1929 dalam laporan studi banding di Bandung, *Lembangsche Melkerijen* tercatat memiliki jumlah sapi sebanyak 550 sapi dan 27 sapi pejantan, 450 ekor sapi di antaranya adalah sapi Friesian dan sisanya adalah sapi Jersey atau hasil persilangan. Sapi Friesian dapat menghasilkan lebih banyak susu dibandingkan sapi Jersey, akan tetapi sapi Jersey juga memiliki kandungan lemak lebih tinggi. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Ursone bersaudara, serius dalam mengelola peternakan sapi di Bandung. Ursone bersaudara juga sangat memperhatikan kondisi sapi perah yang mereka miliki, karena berpengaruh pada kualitas dari susu yang akan mereka perdagangkan.

Strategi yang mereka lakukan adalah seleksi sapi perah yang sangat ketat, *screening* kesehatan dan memantau proses kawin silang. Besarnya perusahaan ini juga diikuti dengan fasilitas memadai, seperti kandang yang bersih, ruang pendingin dan

ruang pemerahan susu di Lembang (*Bloem, F.A.C, Rapport over de studiereis* November 1928-April 1929 *door Nederlandsch- Oost-Indie,* 1929).

Posisi geografis Bandung yang memiliki suhu rendah, menjadikan lokasi sentra dari peternakan sapi perah. Hal tersebut juga menjadi fondasi terbentuknya perusahaan susu besar lainnya, seperti Perusahaan *Hirschland dan Van Zijn* (*Een onverkwikkelijke melk-oorlog, Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie,* September 3, 1925). Tuan Hirschland dan Van Zijn, memprakarsai peternakan besar di Bandung pada 1907 dengan nama *Generaal de Wet* (*Nederlandsch weekblad voor zuivelbereiding en- handel,* Juli 12, 1927).

Dalam memasok hewan ternak dengan kualitas yang unggul, Tuan Hirschland dan Van Zijn gencar melakukan importasi sapi perah dengan jenis Friesian. Mereka juga gencar melakukan pembiakan sapi-sapi dengan kawin silang, dari sapi impor dan

sapi lokal. Kandang yang dimiliki *Generaal de Wet* sangat sederhana, yang terbuat dari kayu dan dilapisi ubin (*Nederlandsch weekblad voor zuivelbereiding en-handel,* Juli 12, 1927). Selain itu, Tuan Hirschland dan Van Zijn sangat memperhatikan kehigienisan dari produk susunya. Sapi yang akan diperah, harus dimandikan terlebih dahulu kemudian dikembalikan ke kandang yang juga telah bersih (lihat gambar 2 pada lampiran). Area Ambing dan area sekitar sapi dalam memerah sapi dibersihkan dengan air hangat dan air sabun, setelah itu ambing dikeringkan dengan kain bersih (*Nederlandsch weekblad voor zuivelbereiding en-handel,* Juli 12, 1927).

Pemerah susu biasa dilakukan oleh wanita, karena lebih lembut dalam bekerja dibanding laki-laki. Para Pemerah susu menggunakan jubah yang bersih dan dicuci dengan benar. Hal tersebut menjadi bukti keseriusan Tuan Hirschlan dan Van

Zijn dalam mengelola peternakan sapi, hingga berhasil menjadi salah satu peternakan besar di Bandung.

Pada 1921, peternakan ini tercatat memiliki 200 ekor sapi perah, dengan produksi susu sampai 25 liter. Hasil produksi tersebut menjadi pemasok utama perusahaan susu Hirschland dan Van Zijn. Lambat laun, Perusahaan Hirschland dan Van Zijn bertransformasi menjadi perusahaan model besar, dengan menggunakan mesin pemerah susu modern, sehingga jumlah produksi susu yang dihasilkan meningkat (*Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie,* Desember 31, 1928). Dalam persaingan pasar, perusahaan ini menjadi salah satu perusahaan besar yang ada di Bandung kala itu.

Pada 1927, hasil susu perah yang dimiliki Perusahaan Hirschland dan Van Zijn sangat melimpah dan menyebabkan surplus susu, hal ini menjadi awal petaka persusuan di Bandung.

Perusahaan ini harus menjual kelebihan produksi susu sebanyak 1.100 botol per harinya, apabila tidak terjual, susu tersebut akan basi dan berimplikasi pada kerugian Perusahaan Hirschland dan Van Zijn. Untuk mengontrol kondisi tersebut, perusahaan ini harus menurunkan harga jual yang awalnya 25 sen, turun menjadi 10 sen per botol (*Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indie,* September 14, 1927). Hal tersebut menjadi pemicu ketidakstabilan pasar persusuan di Bandung.

Peternak kecil harus terancam hancur posisinya, yang juga sebagai produsen susu. Pasalnya banyak konsumen yang lari ke perusahaan besar milik Tuan Hirschland dan Van Zijn, karena harga jual yang lebih pasar dan kualitas susu yang terjamin, sedangkan peternak kecil tetap mempertahankan harga jual susu, karena menyesuaikan surplus susu yang dimiliki. Lambat laun, ketidakstabilan harga di pasar persusuan

Bandung menarik perhatian dari Pemerintah Bandung.

Peran Pemerintah dalam Perang Susu

Perkembangan peternakan sapi perah di Bandung memiliki pengaruh besar terhadap keberadaan industri susu. Dalam menjalankan roda ekonomi, terdapat beberapa pihak yang terlibat salah satunya pemerintah. Peran pemerintah utamanya dalam membuat kebijakan sangat menentukan keberlanjutan industri susu di Bandung.

Dalam hal ini, pemerintah Kota Bandung yang dipimpin Walikota J. M. Wesselink memiliki andil dalam mengentas permasalahan perusahaan susu di Bandung, yang mengalami ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi, sehingga menimbulkan fenomena permainan harga pasar atau yang disebut sebagai perang susu, akibatnya harga susu bisa di bawah 20 sen per botol.

Melalui Departemen Urusan Perekonomian Bandung, akan dibuat rancangan peraturan untuk stabilisasi keadaan di sektor peternakan sapi perah di Bandung (*Algemeen Handelsblad voor Nederlandsch-Indie,* Mei 19, 1936). Rencana tersebut masih dibahas oleh Dewan Kota Bandung untuk menciptakan dasar pembangunan lebih lanjut dengan peluang keberhasilan yang lebih besar.

Perang Susu yang ada di Bandung terjadi secara fluktuatif. Melihat persaingan dagang yang tidak sehat pada 1928, terdapat inisiasi pendirian pusat susu yang mengelola susu di Bandung. Adanya perang susu menimbulkan keresahan di kalangan pengusaha. Hal tersebut dibuktikan dengan usulan salah satu pengusaha susu di Bandung, yaitu Ursone pada 1931, dengan meminta Wali kota mengakhiri perang, melalui pembentukan Pusat Susu (*Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie,* Agustus 12, 1931).

Akan tetapi, pendirian *Bandoengsche Melk Centrale* tidak berjalan lancar, dalam koran *Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië* 1931, karena ketidaksepahaman antara dua peternak besar (*Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indie,* Januari 05, 1931). Tuan Ursone sebagai penggerak BMC, masih gagal dalam menghimpun seluruh peternakan kecil yang ada di Bandung, sehingga sebagai sebuah organisasi yang menghimpun peternakan sapi di Bandung, masih tidak cukup kuat.

Hingga akhirnya pada 1933, organisasi *Bandoengsche Melkcentrale* mulai menampakkan eksistensinya dalam persusuan di Bandung. *Bandoengsche Melkcentrale* nantinya menjadi pusat susu yang menghimpun seluruh susu, yang dari kalangan peternak untuk kemudian didistribusikan, sekaligus mengontrol harga jual susu. Selain itu, *Bandoengsche Melkcentrale* mulai menginisiasikan

pengelolaan produk susu menjadi produk turunan, seperti mentega dan keju. Pada akhir 1934, *Bandoengsche Melkcentrale* menjual secara terbuka aset yang dimiliki, lantaran kreditur mulai mengajukan pailit pada 6 Oktober 1934 (*Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië;* September 27, 1934).

Alasan *Bandoengsche Melkcentrale* harus mengalami kemunduran, adalah karena tidak adanya tenaga ahli yang berkutat dalam pengelolaan berkelanjutan, sebagai sebuah wadah peternak di Bandung. Kurangnya rasa saling percaya antar peternak dan gagal dalam menghimpun seluruh peternakan kecil di Bandung, sehingga menciptakan persaingan antar peternak yang terafiliasi oleh *Bandoengsche Melkcentrale* dengan peternak non afiliasi (*Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië;* September 27, 1934).

Pendirian Pusat Susu, nyatanya bukan sebagai satu-satunya solusi, karena tidak semua peternakan sapi perah yang mau bergabung, baik peternakan di Bandung maupun di luar Bandung. Di sisi lain, ketidakseimbangan ekonomi terjadi karena produksi meningkat, tetapi penjualan menurun, sehingga peternakan yang tidak bergabung dapat mempertahankan penjualan mereka dengan terus menurunkan harga dan membebani Pusat Susu dengan kelebihan pasokan. Saat situasi di dataran tinggi Bandung memuncak, pemerintah tidak lepas tangan.

Departemen Urusan Perekonomian, menghadapi tugas yang sulit untuk menyatukan para pihak yang saling bertarung dan akan berujung pada saling menghancurkan. Namun, Departemen Urusan Perekonomian dengan tepat mengambil posisi, bahwa proses semacam itu tidak akan

menguntungkan para peternak sapi perah, apalagi bagi kepentingan publik.

Keterlibatan pemerintah juga terlihat dengan pembentukan sebuah dewan direksi baru, yang antara lain terdiri dari Dr. J. Kok, selaku kepala *Burgerlijke Veeartsenijkundige Diens*t (BVD) atau Dinas Sipil untuk kesehatan hewan (Jawatan Kehewanan), Tuan M. F. Tydeman selaku Residen Priangan dan Tuan J. M. Wesselink selaku Walikota Bandung (*Algemeen Handelsblad voor Nederlandsch-Indie,* Mei 19, 1936).

Pada Oktober 1935, segenap jajaran pemangku kepentingan melakukan rapat terbuka untuk melakukan reorganisasi *Bandoengsche Melkcentrale* yang ingin pailit (*Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie,* September 11, 1935). Rapat tersebut juga menghadirkan Tuan Hirschland, Van Zijn dan Tuan Ursone sebagai pemilik peternakan terbesar di Bandung. Kedua peternakan tersebut

akan menjadi mitra utama dalam memasok ketersediaan susu *Bandoengsche Melkcentrale.*

Alasan pemerintah menggaet dua peternakan tersebut, agar dapat menghimpun hasil surplus susu dari peternakan untuk kemudian diolah dan didistribusikan, sehingga harga tidak dipatok secara personal. Hasil reorganisasi ini menjadikan perusahaan yang berpayung hukum dan tentunya memiliki struktur organisasi yang baru.

Seluruh peternakan di Bandung diwajibkan untuk tergabung dalam *Bandoengsche Melkcentrale,* apabila tidak, peternak tersebut dilarang memperdagangkan hasil susunya di kawasan Bandung. Hal tersebut merangsang peternak kecil untuk tergabung dalam satu himpunan pusat susu.

Di sisi lain, agar persaingan susu tidak lagi terjadi antar peternak, melainkan antar produk impor ekspor yang singgah di Bandung. Dalam

menjalankan reorganisasi ini, pemerintah memberlakukan sistem monopoli, sebagai upaya menstabilkan kondisi persusuan di Bandung. Reorganisasi ini juga menjadi perbaikan pusat susu, salah satunya dalam hal tenaga ahli. Pada 1936, Departemen Urusan Perekonomian merencanakan pengiriman ahli susu dari Belanda untuk industri susu, salah satunya *Bandoengsche Melkcentrale* (*Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indie,* Juni 06, 1936).

Akhir *Melk Oorlog* di Bandung

Perang susu atau *Melk Oorlog* di Bandung memiliki dinamika yang kompleks. Permasalahan perang susu tidak cukup memuncak dalam satu kali. Ada masalah dengan pihak-pihak di dalam dan di luar Pusat Susu, serta dengan masyarakat, yang tampaknya kurang memahami seluk-beluk permasalahan tersebut. Inti utama dari perang susu

adalah bahwa Pusat Susu Bandung harus tetap beroperasi, dan semua perusahaan yang ingin menjual susu di kota Bandung juga harus menanggung bagian mereka dalam surplus.

Intinya adalah untuk menempatkan semua perusahaan ini pada basis yang sama dan menyatukan mereka dalam Pusat Susu. Solusi yang paling ideal adalah penggabungan secara sukarela, meskipun sangat sulit untuk diwujudkan. Oleh sebab itu, satu-satunya cara adalah dengan menerapkan paksaan melalui pemberian monopoli penjualan untuk kota Bandung kepada Pusat Susu. Dengan demikian, perusahaan di dalam atau di luar Bandung yang tidak ingin bergabung dengan Pusat Susu tidak akan diizinkan menjual susu di Bandung (*Algemeen Handelsblad voor Nederlandsch-Indie,* Mei 19, 1936). Jika peraturan monopoli tersebut sudah diberlakukan, maka Pusat Susu akan distabilkan sebagai perusahaan bersama, dan dari dasar yang

kokoh ini akan diupayakan pengembangan lebih lanjut.

Pada dasarnya, jumlah susu yang diproduksi di Bandung telah mengalami *Overschotmelk* (berlebihan) dengan 60% susu konsumsi dan 40% sisanya sebagai kelebihan, sehingga monopoli sebagai salah satu cara untuk meningkatkan produksi tanpa menambah sapi dan pengaturan harga serta distribusi yang stabil (*Bataviaasch nieuwsblad,* 13 Januari 1936). Hal tersebut sesuai dengan konsep dalam perekonomian saat hasil produksi melimpah, namun permintaan terbatas maka harga barang akan turun. Pertimbangan monopoli digunakan untuk menghindari pasar bebas yang menurunkan harga susu dan berdampak pada munculnya perang susu kembali.

Monopoli susu yang direncanakan oleh pemerintah mendapat sambutan yang tidak baik utamanya di masyarakat. Turunnya harga susu akibat

perang susu menjadikan banyak kalangan bisa minum susu dengan harga murah. Selain itu, Hindia Belanda juga mengalami masa krisis ekonomi yang berdampak pada masyarakat. Pada mulanya, susu di Hindia Belanda termasuk Bandung, sebagai salah satu barang yang mahal dan hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu. Adanya perang susu dengan penjualan harga yang terjangkau memberikan keuntungan bagi masyarakat, sehingga kebijakan monopoli sebagai langkah penyelesaian perang harga mendapat penolakan, utamanya perhimpunan ibu rumah tangga atau *De Vereeniging van Huisvrowen Bandoeng* (*De Koerir,* Januari 25, 1936). Mereka meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali monopoli susu dan memberikan saran berupa pengurangan jumlah ternak bagi perusahaan yang melakukan ekspansi paling besar.

Guna mengatasi surplus susu yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan *Bandoengsche Melk Centrale* maka diperlukan kerja sama dengan investor lain. Beberapa mitra diajukan, namun Nestle menjadi satu-satunya perusahaan yang bisa mengelola susu segar di daerah tropis. Kemampuan tersebut juga menjadi salah satu alasan Nestle bermitra dengan mengakuisisi *Bandoengsche Melk Centrale* untuk mengolah surplus susu menjadi produk susu kental manis melalui pendirian pabrik (*De avondpost,* Januari 07, 1935).

Kesimpulan

Pada masa kolonial Belanda susu menjadi kebutuhan utamanya bagi masyarakat Eropa. Kebiasaan konsumsi susu di kalangan masyarakat Eropa terus dibawa hingga ke negeri jajahan. Hal tersebut menimbulkan adanya peternakan susu di beberapa wilayah, salah satunya Bandung dengan dukungan iklim dan geografis yang cocok. Dua peternakan besar di Bandung adalah *Lembangsche Melkerij* milik Ursone dan *Geneeral de Wet* milik Hirschland dan Zijn.

Akan tetapi, banyaknya usaha susu di Bandung tidak berimbang dengan pasar susu yang ada, karena sebagian susu hanya untuk kegiatan konsumsi rumah tangga. Jumlah yang tidak sesuai ini menimbulkan permainan harga atau perang susu di kalangan pengusaha yang menjual susu dengan harga rendah.

Gejolak perang susu mulai terlihat pada 1928, yang diawali oleh penjualan harga susu secara murah oleh *Geneeral de Wet*, tentunya hal tersebut merugikan peternak besar maupun kecil di wilayah Bandung. Pada 1931, Ursone mengajukan pada pemerintah untuk membangun *Melk Centrale* karena merasa dirugikan akibat persaingan harga, namun baru terealisasi pada 1933. Akan tetapi, *Melk Centrale* mengalami pailit di 1934, akibat permasalahan internal utamanya surplus susu yang masih terjadi di Bandung. Pada 1935, dilakukan reorganisasi menjadi *Bandoengsche Melk Centrale* dengan melibatkan pemerintah.

Akhir dari perang susu pada 1936 guna stabilisasi harga, pemerintah menerapkan kebijakan monopoli yang diserahkan pada *Bandoengsche Melk Centrale* untuk mengelola susu sebelum didistribusikan. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu

pengetahuan, khususnya dalam bidang kajian sejarah perekonomian. Kajian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan kepedulian masyarakat luas terhadap sejarah susu di Bandung, utamanya mengenai objek-objek sejarah perusahaan susu Bandung.

Daftar Pustaka

Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië, 05 Januari, 1931, 19 Mei 1936, 06 Juni 1936, 14 September 1927, 21 September 1934, 27 September, 1934.

Algemeen Indisch dagblad: de Preangerbode, 1 Januari, 1931, 4 Januari, 1931.

Bataviaasch nieuwsblad, 13 Januari, 1936, 11 Desember 1931.

Boerenstand, De RK, Officieel orgaan van den Nederlandschen Boerenbond, 1929. F.A.C, Bloem, Rapport over de studiereis November 1928-April 1929 door

De avondpost, 07 Januari, 1935.

De Koerir, 25 Januari, 1936.

Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 12 Agustus, 1931, 03 September 1925, 11 September 1935, 15 Desember 1931, 31 Desember 1928,

Nederlandsch weekblad voor zuivelbereiding en - Handel, 12 Juli 1927. 18 September, 1934, 9 September 1934, 18 Desember 1924.

Nederlandsch-Oost-Indie, 1929.

Ploegman, V.W.C, Het melkveehoudersbedrijf: Rond een Indischen Middenstand, 1935.

Soerabaijasch handelsblad, 13 Januari, 1936.

Handinoto, H. (2004). Kebijakan Politik dan Ekonomi Pemerintah Kolonial Belanda yang Berpengaruh Pada Morpologi Bentuk dan Struktur Beberapa Kota di Jawa. *Dimensi: Jurnal Arsitektur dan Lingkungan Buatan, 32* (1).

Herlinawati, L. (2011). Ngaruwat Solokan di Desa Cihideung Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat. *Patanjala, 3* (2).

Nawiyanto. (2018). T*erbentuknya Ekonomi Perkebunan di Kawasan Jember.* Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Profil Penulis

Rismayanti Khomairoh lahir di Mojokerto, 18 Juli 2002. Seorang mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Jember. Memiliki motto hidup *"mimpi itu gratis, silakan ambil yang paling mahal—Raim Laode".* Dapat dihubungi melalui email khomairoh18@gmail.com dan No. HP 081615993471.

Elsa Silvana Amalia lahir di Jember, 27 April 2003. Seorang mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Jember. Memiliki motto hidup *"aku mungkin tidak punya materi (harta) seperti apa yang kamu banggakan, tetapi aku punya kemampuan (akal) dari Tuhan yang jauh lebih berharga dari apa yang kamu banggakan".* Dapat dihubungi melalui email elsasilvana27@gmail.com dan No. HP 082331653662.

Dhimas Purnomo Adjie lahir di Madiun, 26 Mei 2003. Seorang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Jember. Memiliki motto hidup *"be profesional, still profesional".* Dapat dihubungi melalui email dhimasadjie23@gmail.com dan HP 0899-0128-138.

Indonesia dalam Pusaran Sejarah: Sebuah Kajian Historis Multidimensi

Editor:
Wahyu Agil Permana

Antara Simbol Identitas dan Integrasi Bangsa: Eksistensi Kebaya Perempuan Indonesia Tahun 1900an hingga1990an

Rahmadina Nur Safitri, Qonita Firzatud Diyanah,
Arnia Fenti Rosari

Sejak Abad ke-6 M, wilayah Nusantara telah dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam dan warisan budaya yang melimpah. Kawasan ini juga memiliki sejarah panjang, yang erat kaitannya dengan pelayaran dan perdagangan internasional. Selain itu, Nusantara berperan sebagai titik pertemuan berbagai bangsa dari Asia Selatan, Timur Tengah, Asia Timur, hingga Eropa, menjadikannya sebagai pusat perdagangan yang penting (Turner, 2008).

Nusantara bukan hanya pusat perdagangan, tetapi juga tempat pertukaran budaya yang intensif. Pelabuhan-pelabuhan tempat berlabuh kapal dari berbagai negara, memungkinkan para pedagang dari Asia hingga Eropa berinteraksi, membawa dan memperkenalkan berbagai elemen budaya, agama, dan seni. Interaksi ini menciptakan akulturasi serta asimilasi yang memperkaya identitas budaya lokal dengan pengaruh asing yang beragam.

Pertemuan budaya ini memperkuat Nusantara sebagai wilayah kosmopolitan, yang berkontribusi terhadap keberagaman budaya dan tradisi yang tetap bertahan hingga kini (Chrisswantra, 2021). Salah satu yang menarik dari pertemuan kedua budaya ini adalah busana atau pakaian yang sampai saat ini masih eksis di kalangan anak muda, busana tersebut adalah kebaya.

Kebaya menjadi pakaian tradisional perempuan Indonesia, yang berfungsi sebagai simbol identitas perempuan Indonesia, yang berarti mencerminkan kepribadian perempuan Indonesia dalam kodratnya yang meliputi menstruasi, mengandung, melahirkan dan menyusui (Suciati dkk, 2015). Pakaian tradisional ini memiliki asal keturunan yang menarik, pasalnya dalam catatan sejarah nama kebaya memiliki kaitan yang erat dengan 3 bahasa bangsa yaitu, bahasa Arab, Tiongkok dan Portugis.

Dalam bahasa Arab, kebaya bersumber dari kata *habaya*, pendapat lain mengatakan bahwa kebaya merupakan pakaian panjang perempuan yang dipakai pada masa kaisar Ming Tiongkok. Sedangkan dalam pandangan Portugis, kebaya merupakan atasan pakaian atau *blouse.* Sebelum Abad ke-15, masyarakat Jawa kuno berpakaian dengan kain panjang, tenun ikat atau *kemben*.

Penyebaran agama Islam pada Abad ke-15 memiliki dampak signifikan dalam berpakaian, yaitu dengan pergeseran dalam berbusana, di mana masyarakat dituntut untuk menutupi aurat sesuai dengan anjuran agama Islam, sehingga pada 1600-an, kebaya dikenakan secara resmi oleh keluarga kerajaan hingga menjadi simbol status dalam masyarakat. Lalu pada Abad ke-19, kebaya mengalami perkembangan menjadi pakaian sehari-hari bagi semua kalangan sosial baik perempuan Jawa ataupun Belanda.

Di Indonesia, kebaya bukan hanya menjadi bagian dari budaya Jawa Tengah dan Jawa Timur, tetapi juga merupakan bagian dari wilayah lainnya, seperti Jawa Barat (Sunda), Madura, Bali, Lombok, Maluku, Minahasa, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal ini terlihat dari kesamaan dalam rancangan dasar busana kebaya di daerah-daerah tersebut (Suciati dkk, 2015).

Pada 1940-an, kebaya terpredikat sebagai busana identitas nasional Indonesia setelah melewati masa yang panjang, kebaya akhirnya menjadi busana identitas bangsa. Nilai dan status kebaya mulai naik ketika dijadikan sebagai busana di acara-acara resmi maupun kenegaraan (Pentasari, 2007). Kebaya dianggap mewakili penampilan perempuan Indonesia, terlihat dari Ibu Negara Fatmawati yang kerap menggunakan kebaya dalam berbagai acara kenegaraan. Selain itu, sebelum kemerdekaan, kongres perempuan pertama yang dilaksanakan pada 22-25 Desember 1928 menggunakan busana kebaya dalam pertemuannya (Kusrianto, 2023).

Kebaya kemudian menjadi simbol integrasi nasional yang tercermin dalam beragam acara formal dan nonformal di seluruh Indonesia. Dalam berbagai kesempatan ini, perempuan mengenakan kebaya bukan hanya sebagai lambang identitas

perempuan, tetapi juga sebagai representasi dari kesatuan bangsa. Kebaya menghadirkan unsur tradisi yang melekat pada budaya Indonesia, menjadikannya simbol persatuan yang melintasi batasan etnis dan daerah, serta memperkuat rasa kebersamaan dan keutuhan bangsa.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk menelusuri proses historis kebaya yang tidak hanya berfungsi sebagai simbol identitas perempuan, tetapi juga sebagai simbol integrasi bangsa.

Asal Usul Kebaya

Kebaya adalah pakaian tradisional Indonesia yang umumnya dikenakan oleh perempuan. Kebaya memiliki ciri khas berupa blus longgar dengan potongan yang fit di tubuh, sering kali dihiasi dengan bordir, payet, atau hiasan lainnya. Munculnya kebaya secara pasti belum diketahui dari

mana asalnya dan pertama kali dibuat. Namun asal usul istilah kata kebaya dijelaskan dalam bahasa tiga negara yaitu Arab, Cina, dan Portugis.

Robyn Maxwell (dalam Pentasari, 2007) menjelaskan, kata kebaya memiliki ragam pengertian, catatan sejarah mengatakan kebaya dalam bahasa arab memiliki asal kata *habaya,* yang artinya busana yang memiliki labuh dan belahan di bagian depan. Selain itu, dalam buku *Nusa Jawa* karya Denys Lombard menjelaskan bahwa, kata kebaya berasal dari bahasa arab *kaba* yang berarti pakaian. Ada juga catatan, bahwa kata kebaya diperkenalkan melalui bahasa Portugis saat bangsa ini mendarat di kawasan Asia Tenggara, yang merujuk pada atasan atau *blouse* yang dikenakan perempuan Abad 15-16 Masehi (Azrin, 2019).

Dapat dikatakan bahwa kebaya yang ada di Indonesia merupakan akulturasi secara bertahap, yang nantinya menjadi kebaya sekarang ini.

Pendapat lain mengatakan bahwa kebaya disamakan dengan baju panjang yang dikenakan pada masa kekaisaran Ming di Tiongkok. Pengaruh ini kemudian tersebar luas di Asia Selatan dan Tenggara pada Abad ke-13 sampai 16 Masehi dan menyebar di wilayah Malaka, Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi.

Sebelum adanya kebaya, perempuan Nusantara menggunakan kain panjang seperti tenun maupun *kemben,* yang berfungsi untuk dijadikan pakaian. Masa ini masih menggunakan bahan-bahan dari alam seperti daun atau serat kayu yang diolah menjadi selembar kain (Miftakurjana, 2024).

Pada masa awal Islam masuk dan menyebar di Nusantara, terjadi juga pergeseran budaya berpakaian khususnya pada kebaya. Kebaya menjadi busana populer yang hanya dipakai oleh kalangan bangsawan yang juga dijadikan sebagai simbol status dan dianggap sebagai pakaian suci, selain

bangsawan, tetap menggunakan *kemben* dan kain lipat.

Berbagai kerajaan seperti Kerajaan Islam Cirebon, Surakarta, Yogyakarta menggunakan kebaya sederhana, model atasan kebaya dengan bahan tipis dipadukan dengan bawahan jarit batik. Perkembangan Islam selanjutnya, banyak masyarakat Indonesia yang sudah mulai memeluk agama Islam. Tokoh-tokoh agama Islam memandang bahwa berpakaian dengan *kemben* dan kain lipat tidaklah pantas, maka para tokoh pun menyarankan menggunakan pakaian lebih tertutup dan memilih kebaya sebagai pakaian yang lebih sopan.

Pada kurun Abad ke-19 atau ketika masa penjajahan Belanda, kebaya menjadi busana resmi perempuan Eropa. Bahan yang digunakan untuk membuat kebaya berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu menggunakan bahan tenunan

mori kemudian dikembangkan menggunakan sutera dengan sulaman warna-warni. Banyak penyesuaian dilakukan, misalnya kebaya untuk kalangan bangsawan dan keluarga keraton dibuat dari bahan sutra, beludru, dan brokrat yang dihiasi sulaman emas. Sementara itu, masyarakat umum mengenakan kebaya dari bahan katun atau tenun yang lebih sederhana.

Kaum keturunan Eropa biasanya mengenakan kebaya berbahan katun halus dengan pinggiran renda. (Adiyani, 2023). Sedangkan komunitas Tionghoa memakai kebaya dengan potongan lebih pendek dan sederhana, dihiasi ornamen berwarna cerah, kebaya ini disebut dengan sebutan *Nyonya Kebaya* atau sering disebut dengan *Kebaya Encim.* Kebaya ini merupakan perkembangan dari kebaya sebelumnya, yang mana merupakan hasil akulturasi budaya Indonesia dan Cina.

Pada Abad ini, komunitas cina semakin berkembang di wilayah Melayu, bahkan banyak di antara mereka menikah dengan pribumi yang menghasilkan pencampuran, disebut dengan Peranakan Cina. Peranakan Cina ini akhirnya mengenakan kebaya, dan kebaya yang dipakai mengalami modifikasi sesuai dengan kekhasan gaya berbusana Tionghoa atau Cina. (Putri & Hidayat, 2021).

Pada 1920-an di beberapa daerah, khususnya Jambi mengalami peningkatan dalam perbaikan tempat tinggal hingga gaya berpakaian. Masyarakat mulai menggunakan sepatu dan mengikuti model yang berkembang, sehingga sempat penggunaan kebaya menurun. Ketika Jepang menduduki Jambi, rakyat mengalami kemiskinan yang memengaruhi cara berpakaian mereka, banyak yang harus menggunakan karung goni sebagai pakaian.

Pada masa ini, gadis-gadis di Jambi berhenti menenun, karena suara alat tenun yang terdengar akan mengisyaratkan keberadaan gadis di rumah tersebut, sehingga tentara Jepang dapat merekrut mereka sebagai *Geisha* atau perempuan penghibur bagi tentara. Kemudian pada masa kemerdekaan, masyarakat mulai kembali berpakaian dengan lebih layak, dan kebaya serta sarung pun muncul kembali sebagai bagian dari busana yang menjadi ciri khas perempuan Indonesia. (Emillia & Mursal, 2021).

Perubahan estetika pada tekstil kebaya awalnya berbahan katun polos kini menjadi lebih beragam, seperti penggunaan bahan sintetis poliester dan *lace.* Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi tekstil di Bandung dan tingginya impor tekstil dari luar ke daerah tersebut. Tekstil yang semula polos mulai dihiasi motif, baik berupa ragam flora (seperti bunga kecil dan besar) maupun pola geometris.

Selain itu, terdapat perubahan pada posisi *neck line* yang semakin rendah, sehingga bagian dada lebih terbuka, serta bentuk *neck line* yang mengalami variasi. Teknologi pembuatan kebaya yang berkembang, termasuk model pakaian dalam seperti long torso, turut mendorong perubahan desain, terutama pada konstruksi kebaya, sehingga menghasilkan siluet yang lebih pas dan mengikuti bentuk tubuh. (Russanti, 2007).

Kebaya memiliki berbagai jenisnya, yang dipakai di seluruh bangsa Indonesia. Kebaya Kutu Baru adalah salah satu jenis kebaya tradisional atau klasik yang memiliki ciri khas berupa pembatas di antara lipatan kanan dan kiri, dengan bagian leher yang lebih terbuka. Pada masa penjajahan, jenis kain dan motif pada kebaya ini menjadi penanda kelas sosial seseorang. Kebaya Kartini juga termasuk kebaya klasik, namun berbeda dengan Kutu Baru

karena memiliki potongan leher berbentuk "V" dan desain yang lebih panjang, memberi kesan anggun.

Selanjutnya, Kebaya Encim memiliki desain leher "V" seperti Kebaya Kartini, namun dihiasi dengan bordiran atau renda bunga pada bagian kerah dan lengan. Kebaya ini menunjukkan pengaruh budaya Tiongkok, terlihat dari hiasan bunga-bunga yang khas. Berbeda lagi dengan Kebaya Bali, yang berasal dari Bali dan memiliki ciri khas kain obi yang diikatkan di pinggang, memberikan sentuhan keanggunan khas Bali. Terakhir, Kebaya Minangkabau yang berasal dari Minangkabau, dikenal dengan potongan kebayanya yang panjang, sering disebut kebaya labuh, dan biasanya terbuat dari kain bludru atau satin, yang menambah kesan mewah dan elegan khas budaya Minangkabau (Fitria & Wahyuningsih, 2019).

Simbol Identitas Perempuan

Kebaya adalah busana nasional Indonesia yang telah dikenakan oleh perempuan Indonesia sejak zaman dahulu hingga masa kini. Secara historis, kebaya tidak hanya dipakai oleh perempuan di Jawa sebagai busana sehari-hari, tetapi juga dikenakan oleh perempuan Belanda dan keturunan Belanda yang tinggal di pulau Jawa. Menurut Taylor (dalam Nordholt, 2005) kebaya menjadi simbol bagi perempuan Jawa yang berfungsi untuk membedakan kelas dan status sosial antara kaum priyayi dan rakyat biasa, di mana perbedaan ini ditunjukkan melalui jenis kain yang digunakan untuk kebaya dan kain bawahannya.

Sementara itu, antara perempuan Belanda dan perempuan pribumi di Jawa, perbedaan terlihat pada model kebayanya. Kebaya yang dikenakan perempuan non-pribumi berwarna putih dan dihiasi renda, dipadukan dengan kain batik yang motifnya

dipengaruhi oleh budaya Eropa. Sebaliknya, kebaya perempuan pribumi tidak memiliki renda, berwarna selain putih, dan dipadukan dengan kain batik yang mengikuti pola tradisional. Selain itu kebaya mencerminkan kepribadian perempuan yang berfungsi sebagai simbol identitas perempuan Indonesia, yang berarti mencerminkan kepribadian perempuan Indonesia dalam kodratnya yang meliputi menstruasi, mengandung, melahirkan dan menyusui (Suciati dkk, 2015).

Pada Abad ke- 19 kebaya mengalami perkembangan, yang di mana awalnya untuk menentukan kelas sosial, berubah menjadi pakaian sehari-hari bagi semua kelas sosial baik perempuan Jawa atau keturunan Belanda di Jawa (Pentasari, 2007). Kebaya menjadi simbol identitas perempuan yang bukan hanya digunakan sebagai busana sehari-hari, tetapi juga sebagai seragam sekolah pada masa pemerintahan Hindia Belanda.

Tifada (2020) mencatat bahwa kebaya mulai diperkenalkan melalui jalur pendidikan, dimulai dari inisiatif Sultan Hamengku Buwono VII (1839-1921), yang mendirikan sekolah modern bernama *Sultanaats School*. Pada 1922, Ki Hajar Dewantara bersama perkumpulan Selasa Kliwon memperkuat peran kebaya dalam pendidikan, dengan mewajibkannya sebagai pakaian siswi di National *Onderwijs Instituut* Taman Siswa atau Lembaga Perguruan Nasional Taman Siswa.

Gambar 2. Siswi mengenakan kebaya di sekolah

Sumber: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia

Menurut Kusrianto (2023), pada masa kemerdekaan kebaya dianggap sebagai simbol penampilan perempuan Indonesia, yang tercermin dari Ibu Negara Fatmawati yang kerap mengenakannya dalam berbagai acara kenegaraan. Hal ini menjadi titik awal di mana kebaya sebagai atasan dan batik sebagai bawahan ditetapkan sebagai busana nasional bagi perempuan Indonesia. Sedangkan pada masa Orde Baru, pemerintahan Soeharto memanfaatkan kebaya sebagai alat untuk membatasi kebebasan perempuan melalui konsep ibuisme. Tien Soeharto yang menduduki status "Ibu Negara" berperan sebagai panutan bagi perempuan Indonesia dalam berbusana kebaya, memperkuat citra ideal perempuan yang diharapkan oleh rezim saat itu (Suryakusuma dkk, 2011).

Kebaya bukan hanya sekadar pakaian namun ada makna filosofis yang mendalam di baliknya. Kebaya melambangkan nilai kepatuhan, kelembutan, dan sikap halus yang diharapkan dari perempuan. Biasanya dipadukan dengan *jarik* atau kain yang membebat tubuh. Kebaya secara alami membatasi ruang gerak dan membuat pemakainya sulit bergerak cepat, menciptakan citra perempuan Jawa yang anggun dan lemah gemulai. Nilai-nilai ini tercermin dalam pemakaian kebaya oleh sosok-sosok penting seperti Fatmawati dan Tien Soeharto, yang masing-masing dalam era yang berbeda menggunakan kebaya untuk mencerminkan dan menegaskan identitas perempuan Indonesia. Fatmawati mengenakan kebaya dalam acara kenegaraan sebagai simbol nasionalisme dan keanggunan perempuan Indonesia. Sementara Tien Soeharto memperkuat citra perempuan ideal versi Orde Baru dengan peranannya sebagai panutan

perempuan dalam berpakaian kebaya (Yuastanti, 2016).

Simbol Integrasi Bangsa

Busana kebaya adalah pakaian tradisional yang sering digunakan pada acara tertentu yang memiliki motif serta warna yang beraneka ragam. Nilai-nilai kehidupan berupa kepatuhan, kehalusan dan tingkah laku perempuan yang senantiasa lembut terkandung di dalamnya. Kebaya mengalami kemerosotan status pada masa penjajahan Jepang. Namun, pada masa kemerdekaan kebaya menjadi simbol perjuangan dan nasionalisme karena busana kebaya digunakan secara resmi dalam acara kenegaraan (Fitria & Wahyuningsih, 2019).

Kongres Wanita Indonesia (Kowani) adalah gabungan dari organisasi kemasyarakatan perempuan Indonesia yang didirikan pada 1928 di Yogyakarta. Organisasi ini didirikan untuk

membicarakan berbagai masalah di Indonesia mulai dari pendidikan, sosial budaya, ekonomi, tenaga kerja, hingga politik yang hingga saat ini menjadi program Kowani. Pada Juni 1950, Presiden Soekarno dan Ibu Fatmawati mengundang anggota Kowani ke Istana Merdeka. Pada konferensi tersebut tampak sebagian besar perempuan mengenakan busana kebaya.

Gambar 3. Presiden Soekarno dan Ibu Fatmawati mengundang anggota Kowani ke Istana Merdeka

Sumber: *https://collectie.wereldmuseum.nl*

Busana kebaya ditetapkan sebagai busana nasional perempuan Indonesia pada 1976, dalam lokakarya di Jakarta yang dihadiri oleh seluruh perwakilan provinsi di Indonesia. Selain itu, kebaya juga ditetapkan sebagai busana nasional dalam Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1972 tentang Djenis-djenis Pakaian Sipil dan Undang-undang No. 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan Kebaya.

Ibu Tien adalah istri Presiden Soeharto yang biasanya mengenakan busana kebaya, baik pada acara formal maupun non formal. Dari sini dapat diasumsikan bahwa kebaya bukan hanya sekadar sebagai busana perempuan, akan tetapi memiliki makna jauh lebih luas. Tanggal 16 Maret 1979, pada pembukaan Penataran Kaum Perempuan Gereja sidang 2 Jemaat Allah se-Indonesia di Tawangmangu yang dihadiri tiga ratus orang perwakilan dari Maluku, Sulawesi Utara, Sumatra Utara, Jawa Barat, DKI Jaya, Jawa Timur, Irian Jaya, dan dari Jawa

Tengah, memperlihatkan bahwa sebagian besar perempuan menggunakan busana kebaya dalam acara tersebut.

Gambar 4. Pembukaan penataran kaum perempuan gereja sidang 2 Jemaat Allah se-Indonesia di Tawangmangu

Sumber: Kartika No. 420 Tahun 1979

Busana kebaya juga tidak menghalangi umat muslim dalam menutup aurat, meskipun kebaya memiliki model yang terbuka pada bagian depan, namun umat muslim dapat menutupi auratnya

dengan dipadukan kerudung, seperti gambar yang diambil pada 1979, tampak pada foto di bawah ini umat muslim yang mengenakan busana kebaya dan dipadukan dengan kerudung.

Gambar 5. Juara umum MTQ Nasional

Sumber: Kartika No. 523 Tahun 1979

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat sejarah panjang kebaya yang tidak hanya sekedar busana yang melambangkan identitas perempuan, namun lebih dari itu kebaya telah menjadi bagian sejarah Indonesia yang menyimbolkan Integrasi bangsa

bukan hanya Jawa. Kebaya merupakan ekspresi budaya tradisional yang merupakan warisan budaya tak benda dan harus dilindungi negara.

Kebaya sebagai warisan tak benda disebutkan dalam tiga sumber hukum yaitu: Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Selain itu, alam rapat kerja Direktur Jenderal Kebudayaan dengan komisi X DPR membahas persiapan pendaftaran kebaya ke UNESCO, menyebutkan Kebaya bisa didaftarkan ke UNESCO mulai Maret 2023 dan sesuai prosedur akan dibahas dua tahun kemudian, yakni pada 2025. Kebaya harus masuk dalam daftar warisan budaya Nasional untuk memenuhi syarat nominasi UNESCO yang bertujuan untuk melestarikan warisan budaya tak benda (Winuriska, 2024). Hal ini menjadi penting sekaligus

tugas kita bersama untuk mempertahankan kebaya sebagai simbol Integrasi Bangsa.

Kesimpulan

Kebaya memiliki sejarah panjang yang mencerminkan interaksi budaya antara Nusantara dan bangsa asing, seperti Arab, Tiongkok, dan Eropa, yang turut mempengaruhi perkembangan desainnya. Dalam sejarahnya, kebaya tidak hanya menjadi simbol status sosial dan budaya, tetapi juga simbol perlawanan, persatuan, dan nasionalisme, terutama pada masa kemerdekaan Indonesia.

Kebaya sebagai busana tradisional Indonesia yang tidak hanya berfungsi sebagai simbol identitas perempuan, tetapi juga sebagai simbol integrasi nasional. Setelah Indonesia merdeka, kebaya diakui sebagai busana identitas nasional. Kebaya tidak hanya menjadi simbol keanggunan perempuan Indonesia, tetapi juga lambang persatuan bangsa.

Dalam berbagai acara resmi maupun nonformal, kebaya dikenakan oleh perempuan dari beragam latar belakang etnis, menjadikannya simbol integrasi nasional yang memperkuat rasa kebersamaan. Kebaya dianggap sebagai simbol identitas perempuan Indonesia yang menunjukkan kepribadian, nilai, dan peran penting perempuan dalam budaya nasional. Pemerintah, organisasi wanita, dan tokoh-tokoh nasional, termasuk Ibu Negara pada berbagai era, berperan dalam memperkuat kedudukan kebaya sebagai busana nasional.

Daftar Pustaka

Adiyani, Y. P., Sheva Felissa, A., Oktav Berliana, A., Sari, D. R., & Aziz, N. A. (2023). Akulturasi Budaya Cina-Indonesia dalam Pakaian Tradisional Kebaya Encim. In *Jurnal Kultur 2*(1).

Azrin, M. A. (2019). K*ebaya Sebagai Identitas Perempuan Jawa Muslim*. (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).

Chrisswantra, F. (2021). Jepara Wood Carving and the Cultural Influences of the Nusantara Maritime Spice Route. *Serat Rupa Journal of Design*, *5*(2), 254-269.

Emillia, E., & Mursal, I. F. (2021). Sejarah Gaya Berbusana Perempuan Kota Jambi Tahun 1900–1970. *Siginjai: Jurnal Sejarah*, *1*(2), 45-64.

Fitria, F., & Wahyuningsih, N. (2019). Kebaya kontemporer sebagai pengikat antara tradisi dan gaya hidup masa kini. *ATRAT: Jurnal Seni Rupa*, *7*(2), 128-138.

Jabar Untuk Kedua Kalinya Juara Umum MTQ Nasional. (1979). *Kartika,* No. 523.

Kusrianto, A. (2023). *Pesona Kebaya & Batik: Busana Nasional Wanita Indonesia nan Cantik & Anggun*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Miftakurjana, I. (2024). Akulturasi Melalui Kebaya. *Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam*, *1*.

Nordholt, H. G. C. (20015). *Outward Appearances. Dressing state and society in Indonesia.* Yogyakarta: LKiS.

Pentasari, R. (2007). *Chic in Kebaya: Catatan Inspriratif untuk Tampil Anggun Berkebaya.* Jakarta: Esensi.

Peranan Wanita Dalam Menentukan Masa Depan Bangsa Tidaklah Kecil. (1979). *Kartika*, No. 420.

President Soekarno en zijn vrouw met deelnemers aan een KONAWI-congres. (n.d.). Wereldmuseum Collectie.

Putri, N. A., & Hidayat, A. A. (2021). Budaya Indis Pada Kebaya Abad Ke-20. *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah*, *5*(1).

Russanti, I. (2007). Desain Kebaya Sunda Abad Ke-20 Studi Kasus di Bandung Tahun 1910-1980. *Journal of Visual Art and Design*, *1*(2).

Suciati, S., Sachari, A., & Kahdar, K. (2015). Nilai Femininitas Indonesia Dalam Desain Busana Kebaya Ibu Negara. *Ritme*, *1*(1), 52-59.

Suryakusuma, J. I., Katjasungkana, N., Notosusanto, T., & Chabibah, U. (2011). *Ibuisme negara: Konstruksi sosial keperempuanan orde baru*. Depok: Komunitas Bambu.

Tifada, D. A. (2020). *Meluasnya Budaya Kebaya Lewat Tubuh Perempuan Sekolahan.*

Turner, J. (2008). *Spice: the History of a Temptation*. New York: Vintage.

Wasino, & Hartatik, E. S. (2018). Metode Penelitian Sejarah (Dari Riset hingga Penelusuran. *Seri Publikasi Pembelajaran*.

Winuriska, W. (2024). Pelindungan Busana Kebaya Dalam Perspektif Ekspresi Budaya Tradisional dan Warisan Budaya Bangsa. *UNES Law Review*, *6*(3).

Yuastanti, E. (2016). Gaya busana Siti Hartinah Soeharto sebagai ibu negara Indonesia Tahun 1968-1996. *Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah, 4*(2).

Profil Penulis

Rahmadina Nur Safitri lahir di Jepara, 06 Desember 2004. Seorang mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Semarang. Memiliki motto hidup *"the more i learn, the more i eran, the more i have to return".* Dapat dihubungi melalui email rahmafitri5000@gmail.com dan No. HP 081215403672.

Qonita Firzatud Diyanah lahir di Demak, 30 Juni 2005. Seorang mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Semarang. Memiliki motto hidup "*yang penting coba dulu".* Dapat dihubungi melalui email qonita300605@gmail.com dan No. HP 085712518409.

Arnia Fenti Rosari lahir di Semarang, 10 Mei 2003. Seorang mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Semarang.

Penulis memiliki motto hidup *"kerja keras akan sia-sia jika tidak dengan doa".* Dapat dihubungi melalui email arniarosa04@gmail.com dan No. HP 085729417312.

Indonesia dalam Pusaran Sejarah: Sebuah Kajian Historis Multidimensi

Editor:
Wahyu Agil Permana

Koffie in Lampongsche: Pengaruh Perkembangan Perkebunan Kopi terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi di Lampung Abad ke-19

Aulia Putri Alaudi, Selviyana Saputri, Sintia Dewi Perdana

Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera. Secara geografis, provinsi ini berada antara 3°54' Lintang Selatan dan 103°50'-105°50' Bujur Timur, dengan luas wilayah mencapai 35.376,50 km². Dengan kondisi alam yang subur, sektor pertanian dan perkebunan menjadi andalan perekonomian Lampung. Salah satu makanan pokok di daerah ini adalah kopi. Sebagai salah satu penghasil kopi

terkemuka di Indonesia, Lampung memiliki konsentrasi produksi kopi terbesar di wilayahnya (Rizkillah dkk, 2020).

Kopi menjadi komoditas unggulan pada masa VOC dan Hindia Belanda (1800-1942). Penanaman kopi dimulai di Jawa melalui sistem *Preangerstelsel* dan *Culturstelsel.* Pada awal penerapan politik etis, penanaman kopi juga diperluas ke Sumatera, termasuk daerah Lampung. Selama periode penjajahan tahap pertama antara 1905 hingga 1911, pemukim dari Jawa dan Tionghoa mulai membuka lahan untuk mengembangkan tanaman kopi.

Tanah Lampung dikenal subur dan luas, memungkinkan penanaman kopi dalam jumlah besar melalui perkebunan rumah tangga kecil yang mulai berkembang sejak pemerintahan Belanda hingga masa kemerdekaan Indonesia (Budiman, 2012).

Perkembangan kopi dimulai pada akhir 1880-an, ketika salah satu lahan di kawasan Teluk Betung dilelang kepada pihak asing untuk dieksploitasi. Kawasan Onder Teluk Betung yang menjadi *Western Private Equity Area,* awalnya bernama Way Layap. Sekitar 1880-an, kawasan Way Layap menjadi bagian dari sistem *Cultuuronderneming* yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dalam arsip, tentang Way Layap disebutkan bahwa bahan baku utama perkebunan tersebut adalah lada dan kopi. Perkebunan Way Layap mempekerjakan masyarakat lokal dari Lampung dan Sumatera Selatan dengan gaji ƒ. 0,25 hingga ƒ. 0,50 sen sehari (*De Indische Courant,* 30 Oktober 1939).

Way Lima dipilih sebagai area penanaman kopi karena kesuburan tanah andesit yang tinggi, yang ditandai dengan warnanya yang coklat dan lengket. Way Lima menjadi salah satu daerah di Lampung yang berkembang hingga berbasis modal swasta

Barat, dan perkembangan tersebut merupakan terbesar di Lampung pada saat itu. Kopi menjadi komoditas yang dikembangkan di Way Lima yang dibuka sekitar 1890-an. Perkebunannya sendiri diberi nama sesuai dengan lokasi wilayah ataupun daerahnya. Sebenarnya dengan dibukanya perkebunan kopi di Way Lima tersebut, membuka jalan bagi dibukanya beberapa perkebunan kopi di berbagai daerah di Lampung (Broersma, 1916).

Awal Mula Perkebunan Kopi di Lampung

Kopi mulai menjadi komoditas berharga di Eropa pada Abad ke-16 dan ke-17. Meluas di Eropa, kopi perlahan menjadi bagian dari imperialisme dan kolonialisme lama, seperti *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) yang datang ke Indonesia dan memperkenalkan kopi pada pertengahan Abad ke-16. VOC ternyata menjadi importir utama pertama kopi. Setelah mendapatkan kopi, VOC

membudidayakan kopi di Jawa dan Sri Lanka pada 1711.

Kopi dibawa ke Hindia Belanda pada 1669, tetapi biji kopi pertama mati, karena banjir Batavia mempengaruhi kopi yang diangkut. Gelombang kopi berikutnya tiba pada 1699 dan menjadi sumber kopi yang ditanam di seluruh Jawa dan seluruh nusantara hingga Abad ke-21 (Budiman, 2012).

Pada 1800-an, Lampung menjadi wilayah yang diperebutkan oleh Kesultanan Banten dan juga Hindia Belanda. Meskipun pada akhirnya tetap dimenangkan oleh Hindia Belanda. Hal tersebut sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Herman Williem Daendels yang berisi pernyataan tentang pelepasan wilayah Lampung dari Banten (Arifin, 2021). Untuk mendorong perdagangan, bea impor dan ekspor di Lampung akhirnya dicabut pada 1832 dan dibuat peraturan baru untuk meningkatkan perdagangan dengan Jawa.

Beberapa Tahun kemudian, Steyn Parvé ditugaskan untuk melakukan penyelidikan terhadap situasi umum, institusi, dan adat istiadat Lampung dengan berkonsultasi dengan Letnan Gubernur yang berada di Lampung. Dia melaporkan dan membuat proposal tentang bagaimana budaya dan adat istiadat di sana, dan geografis Lampung. Laporan tersebut sampai ke Pemerintah pada 1841, selain hal-hal tersebut, tindakan pertama bagi pemerintah Hindia-Belanda adalah mengirim pengawas dan spesialis dari Jawa menjadi untuk mengajar tentang menanam padi dan kopi (Broesma, 1916).

Kopi menjadi komoditas penting pada masa VOC dan Hindia Belanda (1800-1942). Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, *Preangerstelsel* dan *Culturstelsel* membudidayakan kopi di Pulau Jawa. Pada masa politik etik budidaya kopi sampai ke Sumatera, salah satunya meluas ke wilayah Lampung. Bersamaan dengan proses kolonisasi

tahap pertama (perpindahan penduduk) Lampung (pada 1905 sampai 1911), para pendatang asal Jawa dan Tionghoa mulai membuka lahan dan menanam tanaman kopi. Tanah Lampung yang subur dan luas memungkinkan penanaman kopi dalam jumlah besar oleh petani kecil yang tersebar di seluruh penjuru. Perkebunan itu terus berkembang sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda hingga kemerdekaan Indonesia (Budiman, 2012).

Gambar 6. Perkebunan kopi di Lampung masa Kolonial Belanda

Sumber: KITLV A292-Ir J.H. *Brinkgreve bij de eerste koffie onder schaduwbomen*

Way Lima menjadi salah satu daerah di Lampung, sekitar 1890-an yang mulai membuka perkebunan kopi, yang mana hal tersebut membuat perkebunan kopi di sana dapat dikatakan sudah tua, karena memang mulai dari pembukaan perkebunan kopi di Way Lima itulah mulai dibuka pula perkebunan kopi di berbagai daerah di Lampung. Akan tetapi, perkebunan kopi di Way Lima tersebut tidak bertahan lama, karena pada 1909 sahamnya dibeli oleh perusahaan lain (Broersma, 1916).

Perkebunan kopi di Way Lima baru berdiri sekitar 1892, meskipun demikian kawasan tersebut sudah ditanami kopi sebagai komoditas ekspornya. Dipilihnya Way Lima sebagai daerah penanaman kopi tidak terlepas dari wilayah tersebut yang memiliki letak geografis yang subur, dengan

kandungan tanah andesitnya tinggi, kemudian juga letak dari wilayahnya juga jauh dari pusat pengamatan kota, sehingga penanaman kopi di wilayah tersebut dapat dikatakan cukup berhasil pada saat itu. Akan tetapi, selain kawasannya yang subur tersebut, tentu saja terdapat beberapa kekurangan di daerah Way Lima tersebut, di antara kekurangan tersebut yaitu letaknya di wilayah perbukitan, tidak adanya sungai sebagai transportasi air, serta kurangnya tenaga kerja, karena pada saat itu populasi di daerah tersebut dapat dikategorikan cukup rendah (Mustafa, 2022).

Di wilayah Way Lima juga terlihat kebun besar dengan karet merah *(Ficus Elastica)* milik perusahaan Langkapoera (kebun karet tua) yang masih melakukan produksi. Perusahaan menanam Hevea dan Robusta di atas 370 bahoe, tanaman yang tidak terpisahkan juga di Lampung, namun lambat laun akan menjadi lahan karet. Pada 1914, 1600 kopi dan

25.000 kilogram karet dijual di pasaran, tetapi hasil pada 1917, dihitung menjadi 500 kilogram kopi dan 50.000 kilogram karet (Broersma, 1916).

Perkembangan Kopi di Lampung

Pada Abad ke-16 hingga 17, kopi menjadi primadona menarik di pasar Eropa. Ketika kopi disambut secara luas di Eropa, kopi mulai jadi bagian dari imperialisme dan kolonialisme lama, *semacam Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC*) yang datang ke Indonesia pada pertengahan Abad ke-16 dan memperkenalkan kopi.

VOC diketahui sebagai importir pertama kopi dalam skala besar. Setelah memperoleh kopi, VOC membudidayakan kopi di Sri Lanka dan Jawa pada 1711. Sedangkan menurut Creutzberg & Van Laane (1987) kopi diperkenalkan ke Hindia Belanda pada 1669, tetapi biji kopi pertama itu mati karena banjir di Batavia menyebabkan kopi gagal dikirim.

Gelombang kopi berikutnya datang 1699 dan digunakan hingga Abad ke-21.

Lahan Lampung yang subur dan luas mengharuskan penanaman kopi secara besar-besaran oleh petani kecil yang tersebar. Perkebunan itu terus berkembang sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda sampai kemerdekaan Indonesia (Creutzberg & Van Laanen, 1987). Memasuki Abad ke-19, lada tidak lagi menjadi barang dagangan yang penting, meskipun tetap penting bagi Belanda.

Tidak seperti produk perkebunan yang baru diperkenalkan seperti kopi dan karet, lada Lampung awalnya tidak diproduksi oleh perusahaan perkebunan, tetapi ditanam sendiri oleh petani lokal untuk memenuhi kebutuhan ekspor Belanda ke pasar Eropa (Fortuin, 1923). Komoditas lain seperti kopi dan timah juga mengungguli lada dalam perekonomian global. Akibatnya, banyak petani lada yang beralih ke tanaman ekspor lainnya.

Pada awalnya, kawasan Lampung merupakan kawasan yang termasuk dalam kawasan pemukiman Palembang pada masa penjajahan Belanda. Bahan baku kopi memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Belanda membawa kopi dari Eropa ke pemukiman Palembang. Ketika produk kopi berkembang, tepatnya pada 1927, perkebunan kopi di lahan seluas 80.000 hektar bisa menghasilkan kopi. Tidak hanya sebatas itu, pemerintah Belanda memperluas lahan perkebunan kopi, yang tepatnya pada 1928 perkebunan kopi tersebut mampu menghasilkan kopi sebanyak 27.869 ton (*Landbouw: Tijdschrift der Vereeniging van Landbouwconsulenten in Nederlandsch-Indië,* 1930).

Dari sini dapat dilihat bahwa perkembangan perkebunan kopi mendatangkan keuntungan yang sangat besar bagi pemerintah kolonial. Hal ini sesuai dengan sistem politik daerah jajahannya yang menitikberatkan pada penghimpunan keuntungan

sebesar- besarnya bagi ibu pertiwi yaitu Kerajaan Belanda. Antara 1831 dan 1866 pengiriman uang mencapai *f* 500.000.000., yang digunakan pemerintah untuk membayar hutang dan memperbaiki infrastruktur di Kerajaan Belanda. Sudah pada 1870, keuntungan pemerintah Hindia Belanda pada satu komoditi yaitu tanaman kopi mencapai *f* 50.000.000 (Breman, 2014).

Productennoteringen van Djakarta 1/8

Koffie: Robusta Lampong V 505 G 500 Ready levering; Robusta Lampong V 507.50 K 500 G 505 Aug./Sept. levering; Robusta Lampong V 530 K 520 Sept./Oct. levering; Robusta Lampong V 545 K 540 Oct./Nov. levering; Robusta Lampong V 565 K 550 Nov./Dec. levering.

Citronella: A Contract V 25.50 G 25.— Aug./Sept. levering.

Tapioca: AAA Bandung V 290 franco wagon Djakarta/Tjirebon; AA Banudung V 280 franco wagon Djakarta/Tjirebon.

Gambar 7. Penjualan Kopi di Lampung

Sumber: *Productennoteringen van D Jakarta 1/8. "Algemeen Indisch dagblad: de Preangerbode" (delpher.nl)*

Arsip tersebut menjelaskan komoditas dengan harga dan jadwal pengiriman yang berbeda. Untuk kopi Robusta Lampung V, harga berkisar antara Rp505.000 hingga Rp565.000 per 500 gram, dengan pengiriman yang dijadwalkan dari Agustus hingga Desember, tergantung pada varian dan periode pengirimannya*. Citronella* tersedia dalam kontrak 25-50 kg dengan harga Rp25.000 per kg, dan pengiriman dijadwalkan pada Agustus/September. Sedangkan Tapioka AA Bandung dijual dengan harga sekitar Rp280.000 hingga Rp290.000 per ton, dengan pengiriman menggunakan wagon dari Jakarta/ Tegal atau Cirebon.

Pada 1929, daerah pemukiman Lampung menerima sekitar 4.604.000 dari pengiriman barang dagangan ke luar negeri, di mana penanaman kopi terus berlanjut, terutama setelah munculnya penyakit tanaman. Kopi menjadi flora utama di daerah Lampung, karena menurunnya popularitas lada di pasar internasional dan penyebaran hama yang mengurangi produksi lada di wilayah tersebut (Wellan, 1932). Berikut adalah hasil panen perkebunan kopi pada Tahun 1923-1929.

Tahun	Produksi Kopi (Dalam Kilogram)	Nilai Produksi (Dalam Ribuan Gulden)
1923	1.482	824
1925	2.142	1.959
1927	3.278	2.333
1929	6.526	4.604

Tabel 1. Produksi kopi di Lampung 1923-1929

Sumber: *Zuid Sumatra Economisch Overzicht Wagenigen 1983.*

Dari tabel di atas, terlihat bahwa hasil perkebunan kopi meningkat setiap tahunnya, yang menunjukkan perkembangan positif selama masa penjajahan Belanda. Antara 1830 hingga 1870, pemerintah kolonial menerapkan keputusan baru, yaitu sistem tanam paksa. Pada 1830, tanaman komersial lainnya seperti kopi, tebu, dan nila diperkenalkan. Karena lada tidak lagi menjadi komoditas utama, dalam sistem tanam paksa, lada diperlakukan sebagai tanaman yang membutuhkan budidaya dalam skala kecil.

Upaya memperkenalkan budidaya kopi di Lampung dimulai pada 1841, setelah survei umum dan penelitian tentang Lampung serta promosi budidaya yang bermanfaat untuk dikembangkan di daerah tersebut. Pelaksanaan penelitian ini adalah

kedatangan paramedis dari Jawa untuk melatih warga Lampung dalam bidang pertanian, khususnya beras dan kopi (Huitema, 1935).

Untuk kawasan inti penanaman kopi, khususnya Robusta di Lampung, terdapat tiga kawasan utama:

1. **Kawasan Kotabumi.** Terletak di perbatasan antara Bengkulu dan Martapura (Palembang), seluruh areal ini ditanami kopi Robusta dengan ketinggian antara 50-400 m. Areal ini mencakup Olokrengas, Banjarmasin, Kasui, Blambangan Umpu, dan bagian utara Bukit Punggur.
2. **Wilayah Utara.** Dari Talang Padang melalui dataran Ulu-Ulu dan Ulu Semuong hingga Way Tenong (batas Bengkulu). Di kawasan ini, kopi menjadi tanaman penting yang dikombinasikan dengan beberapa pohon lada,

dengan perbedaan ketinggian antara 500-800 m.

3. **Area Sepanjang Teluk Betung.** Termasuk Kalianda, Batu Sempuh, hingga Rajabasa, dengan ketinggian area mencapai 300 m.

Namun, proses penanaman kopi awal tidak berjalan semulus yang diharapkan. Populasi kopi yang ada saat itu hanya menjadi bagian kecil dari budidaya di abad ke-20. Tanaman kopi murni tidak ditemukan, dan pembukaan kebun yang dibantu oleh para pekerja dari Jawa mengalami kegagalan. Situasi politik dan ekonomi yang tidak stabil, struktur populasi yang kecil, dan infrastruktur yang sangat primitif menjadi faktor penyebabnya (Huitema, 1935).

Tahun	Jenis Kopi					
	Arabica	Liberia	Robusta	Andere	Ongepeld	Total
1900	-	-	-	-	-	5.593.936
1901	-	-	-	-	-	4.078.244
1902	-	-	-	-	-	4.740.937
1903	-	-	-	-	-	3.891.000
1904	-	-	-	-	-	4.900.000
1905	-	-	-	-	-	4.566.000
1906	-	-	-	-	-	2.343.000
1907	-	-	-	-	-	2.799.000
1908	-	-	-	-	-	4.495.000
1909	-	-	-	-	-	4.023.000
1910	-	-	-	-	-	4.001.000
1911	-	-	-	-	-	4.847.000
1912	-	-	-	-	-	7.204.000
1913	-	-	-	-	-	2.266.404
1914	-	-	-	-	-	6.207.002
1915	-	-	-	-	-	12.193.170
1916	-	-	-	-	-	8.449.566
1917	-	-	-	-	-	6.436.428
1918	-	-	-	-	-	12.860.512
1919	-	-	-	-	-	38.251.081
1920	-	-	-	-	-	23.630.432
1921	6.419.752	505.574	14.892.960	-	65.413	21.883.699
1922	5.856.187	431.145	19.481.204	-	2.588	25.771.124
1923	2.780.304	173.468	18.647.763	-	72.000	21.673.535
1924	2.484.286	179.563	30.510.901	-	-	33.174.750
1925	2.832.830	4.461	31.504.062	-	61.817	34.403.240
1926	3.789.330	5.494	41.413.738	-	11.319	45.219.881
1927	2.785.032	3.822	51.035.134	-	807	53.824.795
1928	3.511.558	1.595	64.808.804	496	30.485	68.352.938
1929	3.280.642	20.850	51.985.419	5.826	456	55.293.193
1930	2.950.907	20.850	47.113.036	2.550	25.967	50.131.356
1931	2.068.098	38.396	48.769.577	-	12.853	50.850.528
1932	1.834.786	-	64.563.746	-	4.037	66.402.569

Tabel 2. Data ekspor kopi penduduk Tahun 1900-1032

Sumber: *De Bevolkingskoffiecultuur Op Sumatra Met Een Inleiding Tot Hare Geschieden is Op Java En Sumatra 1935.*

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada 1900 hingga 1932 jenis kopi yang banyak diminati yaitu kopi dengan jenis Arabika dan Robusta. Kopi Robusta pada 1921 hingga 1932 mengalami peningkatan, sedangkan kopi Arabika pada 1921 hingga 1932 mengalami ketidakstabilan, namun jenis Arabika ini lebih unggul daripada jenis kopi lainnya. Dengan demikian ekonomi masyarakat Lampung pada saat itu mengalami peningkatan dengan adanya ekspor jeni-jenis kopi seperti *Arabica, Robusta, Liberia*, dan *Ongepeld.*

Dampak Sosial Ekonomi Perkebunan Kopi di Lampung

Perkebunan kopi di Lampung telah menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian daerah ini. Sejak lama, kopi tidak hanya menjadi komoditas unggulan, tetapi juga bagian integral dari kehidupan masyarakat. Adanya perkebunan kopi di Lampung,

dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan peningkatan pendapatan, terjadi perubahan signifikan dalam gaya hidup masyarakat. Mereka mulai mengakses pendidikan yang lebih baik, fasilitas kesehatan, dan teknologi.

Namun, perubahan ini juga membawa tantangan baru. Kesenjangan sosial mulai terlihat antara petani yang berhasil dan mereka yang tidak mampu bersaing di pasar. Masyarakat yang lebih kaya sering kali memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya, sementara yang lain tetap terjebak dalam kemiskinan. Selain itu, sistem perkebunan memperkenalkan berbagai pembaharuan dalam sistem ekonomi agraria yang berdampak besar bagi kehidupan masyarakat. Sistem perkebunan dicirikan oleh bentuk kegiatan pertanian padat modal yang kompleks dan berskala besar, penanaman lahan yang luas, organisasi tenaga kerja yang besar, pembagian kerja yang terperinci, sistem tenaga kerja

yang penting, penggunaan upah tenaga kerja, penggunaan teknologi sementara, sistem administrasi, dan budidaya tanaman komersial untuk ekspor (Evizal, 2014).

Bagi Indonesia, keberadaan perkebunan kopi memberikan pengaruh yang sangat menguntungkan, karena Indonesia merupakan negara penghasil kopi terbesar di Asia, sehingga tentunya ada keuntungan dari ekspor kopi salah satunya meningkatkan nilai tukar, itu buktinya kopi sangat penting dalam perekonomian nasional, dan dalam hal pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan serta kesempatan kerja. Pada 1961-1986, kopi merupakan 3,4% dari total nilai ekspor. Dari segi lapangan kerja, produk kopi telah menyerap tenaga kerja sebanyak 5 juta orang atau buruh perkebunan. Selain itu, dalam hal kesejahteraan manusia, petani kopi Indonesia menerima 61,11% dari harga (FBO). Bahkan pada

1983-1984, petani Indonesia memperoleh pendapatan tertinggi (Retnandari, 1991).

Salah satu dampak dari pekebunan kopi adalah perkebunan dibangun dengan membuka lahan hutan masyarakat. Bahkan para pekerja pun didatangkan dari luar daerah, sering kali dari pulau Jawa, untuk membentuk suatu komunitas yang berbeda baik secara bahasa maupun adat istiadat dari masyarakat sekitarnya. Masyarakat perkebunan benar-benar berbeda dengan masyarakat sekitar, baik secara sosial maupun ekonomi. Produk yang dihasilkan oleh perkebunan juga berbeda dengan produk yang dihasilkan oleh rakyat yaitu produksi produk yang ditujukan untuk pasar ekspor (Evizal, 2014).

Kesimpulan

Kopi menjadi komoditas penting pada masa VOC dan Hindia Belanda (1800-1942). Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, *Preangerstelsel* dan *Culturstelsel* membudidayakan kopi di Pulau Jawa. Pada masa politik etik budidaya kopi sampai ke Sumatera salah satunya meluas ke wilayah Lampung. Way Lima menjadi salah satu daerah di Lampung pada sekitar 1890-an yang mulai membuka perkebunan kopi, yang mana hal tersebut membuat perkebunan kopi di sana dapat dikatakan sudah tua, karena memang mulai dari pembukaan perkebunan kopi di Way Lima itulah mulai dibuka pula perkebunan kopi di berbagai daerah di Lampung.

Dipilihnya Way Lima sebagai daerah penanaman kopi tidak terlepas dari wilayah tersebut yang memiliki letak geografis yang subur, dengan kandungan tanah andesitnya tinggi, kemudian juga letak dari wilayahnya juga jauh dari pusat

pengamatan kota sehingga penanaman kopi di wilayah tersebut dapat dikatakan cukup berhasil pada saat itu.

Perkembangan perkebunan kopi mendatangkan keuntungan yang sangat besar bagi pemerintah kolonial. Hal ini sesuai dengan sistem politik daerah jajahannya yang menitikberatkan pada penghimpunan keuntungan sebesar-besarnya bagi ibu pertiwi yaitu Kerajaan Belanda. Budidaya kopi di Lampung dimulai pada 1841, setelah survei umum dan penelitian tentang Lampung serta promosi budidaya yang bermanfaat untuk dikembangkan di daerah tersebut. Pelaksanaan penelitian ini adalah kedatangan paramedis dari Jawa untuk melatih warga Lampung dalam bidang pertanian khususnya beras dan kopi. Awalnya kopi di Lampung dibuka di Way Lima yang kemudian menyebar ke wilayah lainya.

Perkebunan kopi di Lampung dapat menjadi sumber peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan peningkatan pendapatan, terjadi perubahan signifikan dalam gaya hidup masyarakat. Perubahan ini juga membawa tantangan baru. Kesenjangan sosial mulai terlihat antara petani yang berhasil dan mereka yang tidak mampu bersaing di pasar. Masyarakat yang lebih kaya sering kali memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya, sementara yang lain tetap terjebak dalam kemiskinan. Selain itu, sistem perkebunan memperkenalkan berbagai pembaharuan dalam sistem ekonomi agraria yang berdampak besar bagi kehidupan masyarakat.

Daftar Pustaka

Arifin, F. (2021). Hegemoni Kolonialisme Terhadap Kekuasaan di Nusantara: Strategi Politik Daendels Meruntuhkan Kesultanan Banten Tahun 1808-1811. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, *11*(1).

Breman, J. (2014). *Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa. Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa 1720-1870.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Broersma, R. (1916). *De Lampongsche Districten.* Batavia: Javasche Boekhandel & Drukkerij.

Budiman, H. G. (2012). Dinamika industri kopi bubuk di Lampung (1907-2011). *Patanjala*, *4*(3).

Creutzberg, P & Van Laanen, J. T. M.. (1987). *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.

De Indische Courant, 30 Oktober 1939.

Evizal, R. (2014). *Dasar-Dasar Produksi Perkebunan.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Fortuin. (1923). *De Amsterdamsche Guedenmarks.* Amsterdam: The Bussy.

Huitema, W. K. (1935). *De bevolkingskoffiecultuur op Sumatra: met een inleiding tot hare geschiedenis op Java en Sumatra*. (Doctoral dissertation, Veenman).

Mustafa, H. R., & Utami, S. (2022). Dari Ekspansi hingga Eksploitasi: Perkembangan Perkebunan Swasta Barat di Way Lima Lampung 1800-1932. *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities*, *3*(2).

Retnandari, N. D. (1991). *Respon Penawaran Komoditi Kopi*. (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

Rizkillah, M., Verianti, F., Rifqi, H., Perdana, Y. (2020). *Tenggelamnya Mutiara Hitam Lampung: Lada Ke Kopi Era Kolonial di Kabupaten*

Tanggamus. Lampung Selatan: Pustaka Ali Imron.

Wellan, J. W. J. (1932). *Zuid-Sumatra, Economische overzicht van de gewesten Djambi. Palembang, de Lampongsche Districten en Benkoelen, Wageningen.*

Profil Penulis

Aulia Putri Alaudi lahir di Kotabumi, 26 April 2004. Seorang mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Lampung. Memiliki motto hidup *"hidup berguna".* Penulis dapat dihubungi melalui e-mail auliaputrialaudi123@gmail.com dan HP 0857-8893-4524.

Selviyana Saputri lahir di Bandar Lampung, 27 September 2003. Seorang mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Lampung. Memiliki motto hidup *"di setiap kesulitan pasti ada kemudahan".* Penulis dapat dihubungi melalui e-mail selviyanasptr27@gmail.com dan HP 0896-1846-0751.

Sintia Dewi Perdana lahir di Tulang Bawang, 02 Maret 2004. Seorang mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Lampung. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail sintiadewiperdana@gmail.com dan HP 0851-3229-6307.

Dampak Transformasi Agraria di Hindia Belanda: Peran Sentral *Agrarische Wet* Tahun 1870

Dzulqarnaen Syajaah Saepudin, Yosua Eka Putra Hamonangan, Zaini Ahdan, Zulpan Maulana

Masuknya liberalisme ke dalam kebijakan kolonial belanda mempengaruhi adanya Undang-undang Agraria atau *Agrarische Wet.* Tahun 1870 terjadi perubahan dalam ekonomi maupun sosial yang terjadi di Hindia-Belanda pada abad ke-19. Undang-undang ini memungkinkan pihak swasta asing menyewa tanah milik pribumi, terutama untuk sektor perkebunan yang berkembang pesat.

Undang-undang Agraria dikeluarkan karena adanya pertentangan dari pihak swasta dan kelompok humanis di Belanda. Dengan adanya

Agrarische Wet, mereka dapat memanfaatkan secara bebas dari tanah di Hindia-Belanda tanpa bantuan dari pemerintah Kolonial, serta dapat memperoleh keuntungan besar dari hasil pertanian. Oleh karena itu, pemerintah Belanda memberlakukan Undang-undang Agraria untuk meliberalisasi ekonomi Hindia Belanda dengan menghapus sistem tanam paksa (Sitanggang dkk, 2024).

Undang-undang Agraria tahun 1870 menimbulkan pergeseran ekonomi di Hindia-Belanda. Untuk mendirikan bisnis dan mengelola tanah pribumi, para investor swasta diberikan hak kebebasan untuk mengaturnya. Meskipun demikian, undang-undang ini juga membatasi penjualan tanah pribumi kepada pihak asing untuk memastikan bahwa masyarakat lokal memiliki hak atas tanah.

Setelah masa kolonial berakhir, dibentuklah Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 dan membuat perubahan yang signifikan pada

struktur agraria Indonesia yang menggantikan Undang-undang Agraria tahun 1870 atau *Agrarische Wet*. Dibentuknya UUPA bertujuan untuk menghapus dualisme hukum agraria peninggalan kolonial dan bertujuan untuk menggantikan dengan sistem yang lebih adil. Di dalam UUPA diperkenalkan struktur berbagai jenis hak atas tanah seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Dengan diluncurkannya Reforma Agraria, berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi ketimpangan sosial dari penguasa dan masyarakat (Hasanah, 2013).

Transformasi Kepemilikan Tanah di Hindia Belanda

Terjadinya Revolusi Prancis di Eropa pada 1848 menyebabkan lahir dan berkembangnya paham liberalisme di dunia. Kemenangan partai liberalis membentuk pemikiran masyarakat Eropa, termasuk

Belanda yang merupakan salah satu negara yang terkena imbasnya pada saat itu. Paham liberalisme akhirnya berkembang di bidang ekonomi dan didukung oleh gerakan politik. Kaum oposisi di negeri Belanda yang fokus terhadap isu-isu kemanusiaan menentang pemerintah kolonial di negeri jajahannya yang sedang menjalankan sistem *Cultuurstelsel.* Mereka menganggap sistem ini bertentangan dengan nilai-nilai liberalisme (Tasnur dkk, 2022).

Cultuurstelsel atau sistem tanam paksa yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Johannes Van den Bosch diterapkan pada 1830-1870. Kondisi agraria saat itu mewajibkan para petani untuk menanam tanaman ekspor yang dijual dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah kolonial. Tanam paksa atau *Cultuurstelsel* pada dasarnya adalah penyatuan dari sistem penyerahan wajib dan sistem pajak tanah, kondisi pada saat itu pembayaran pajak

masih berupa tanah dalam bentuk natura bukan mata uang (Syahyuti, 2016).

Kondisi Agraria Hindia Belanda sebelum 1870 sangat dipengaruhi dengan sistem kepemilikan komunal, yang di mana kepemilikan tanah dimiliki oleh bersama dan diatur oleh adat. Hak atas tanah lebih sering didasarkan pada penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh keluarga atau kelompok tertentu, dan bukannya kepemilikan individu secara resmi. Masuknya Liberalisme di Indonesia tepatnya di periode 1870-1900 menyebabkan para pihak pemodal swasta diberikan kebebasan untuk mendirikan perusahaan dan menanamkan modalnya di Hindia Belanda yang berfokus terhadap sektor industri perkebunan, khususnya tanaman-tanaman yang memiliki ekspor tinggi seperti teh, kopi, gula, tembakau hingga kina (Daliman, 2012). Dengan Kemenangan pihak oposisi di Negeri Belanda yang notabenenya merupakan pengusaha swasta,

terbitlah Undang-undang Agraria tahun 1870. Tujuan awal dari pembentukan Undang-undang ini untuk menjaga serta melindungi hak atas tanah kaum pribumi dalam sistem sewa tanah yang berlaku sejak Tahun 1870 (Tasnur dkk , 2022).

Undang-undang Agraria tahun 1870 atau *Agrarische Wet* memperkenalkan konsep *Domein Verklaring* yang bertujuan untuk membatasi klaim pemerintah atas tanah pribumi. Konsep *Domein Verklaring* menyatakan bahwa tanah yang tidak memiliki bukti kepemilikan formal adalah milik negara. Sistem ini merugikan pribumi yang masih menggunakan sistem komunal atau kepemilikan bersama atau berdasarkan hak adat, sehingga banyak tanah-tanah yang tidak mempunyai hak milik, diklaim oleh pemerintah kolonial menjadi hak negara. Pemerintah kemudian menyewakan tanah-tanah hak negara tersebut kepada perusahaan-perusahaan swasta. Hal ini menyebabkan banyak

penduduk pribumi kehilangan akses tanah yang menjadi sumber penghidupan utama (Sitanggang dkk, 2024).

Dampak Kebijakan *Agrarische Wet* terhadap Masyarakat Lokal

Meskipun diwarnai berbagai macam masalah, telah terjadi pola penguasaan tanah komunal sampai penguasaan oleh satu individu dari zaman Pra Kolonial sampai masa sekarang. Ini dapat dilihat dari semakin hilangnya hak-hak kepemilikan tanah dan kebebasan dalam mengelola tanah, sehingga tanah dapat disewakan dan diperjualbelikan. Sebelumnya tanah dapat dikelola secara terus menerus oleh satu komunitas dan dapat diwariskan ke generasi selanjutnya, namun tidak dapat diperjual belikan. Jenis kepemilikan ini disebut dengan kepemilikan komunal yang berciri privat (Syahyuti, 2016).

Akibat dari terbitnya kebijakan ini adalah dihentikannya *Cultuurstelseel* secara berangsur-angsur, kemudian muncul pembukaan perusahaan asing yang masif menyebabkan terjadinya diversifikasi pekerjaan pribumi akibat sebagian tanahnya di sewakan, sebagian besar dari mereka memilih menjadi buruh pabrik milik asing. Masifnya aliran modal yang digelontorkan di Hindia Belanda, dapat dibuktikan dari besarnya pembiayaan yang dilakukan oleh bank milik pemerintah Belanda terhadap perusahaan-perusahaan swasta di Hindia Belanda (Tasnur dkk, 2022).

Agrarische Wet bila ditinjau ulang hanya memuat hal-hal umum khususnya berkaitan dengan agraria di Hindia Belanda. Seperti halnya Undang-undang di masa ini, *Agrarische Wet* bila diperinci lebih dalam dengan diterbitkannya *Agrarische Besluit* pada 1870, salah satunya berbunyi *"Alle grond waarop niet door andere recht van eigendom*

bewezen is, is domein van de staaf" yang berarti bahwa tanah yang tidak termasuk dalam kategori yaitu 3 jenis tanah pribumi maka dimiliki oleh pemerintah atau negara. Oleh karena itu tanah yang tidak jelas kepemilikannya akan menjadi milik negara (Breman, 1983).

Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Perusahaan swasta diuntungkan dengan timbulnya kebijakan *Agrarische Wet,* sebaliknya pribumi tidak merasakan dampak dari maraknya perusahaan di Hindia Belanda. Kebijakan ini memperparah derita pribumi yang menyebabkan banyak kemiskinan. Jumlah kemiskinan ini tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, sementara produksi pangan tidak mencukupi untuk memenuhinya (Utami, 2015).

Hal inilah yang menyebabkan paceklik, karena tanah subur yang dimiliki petani telah disewakan kepada para pengusaha swasta, sehingga menyisakan lahan yang kurang baik untuk digarap dan ditumbuhi tanaman pangan. Pembebasan dari derita 40 tahun tanam paksa hanyalah semu, mengingat pribumi masih dipaksa untuk membayar pajak kepada pemerintah kolonial, namun lahan yang digunakan sudah tidak bisa lagi menghasilkan. Sumber pribumi dirampas secara tidak langsung dengan adanya sistem sewa tanah dan sistem kepemilikan tanah yang dimiliki oleh individu (Ricklefs, 2007).

Berlakunya sistem liberal ini didukung oleh monetisasi di Hindia Belanda. Monetisasi di tanah-tanah partikelir yang sudah diperkenalkan sebelum diberlakukannya tanam paksa melalui komersialisasi tenaga kerja dan penjualan ekspor secara mikro oleh pribumi. Tetapi, monetisasi secara masif terjadi pada

abad ke-19 dengan adannya perkebunan swasta dan tanam paksa.

Sistem ekonomi yang baru diperkenalkan oleh kolonial menarik hati pribumi baik secara suka maupun tidak, karenanya pribumi bisa mendapatkan pendapatan. Selain itu pendapatan yang dihasilkan berupa uang membawa pribumi ke dalam sistem ekonomi uang. Hal ini kemudian memunculkan uang sebagai kebutuhan baru, sering kali dalam hal ini pribumi terpaksa untuk menjual atau menggadaikan tanah kepunyaan mereka sehingga terjadinya ketimpangan ekonomi (Utami, 2015).

Belum siapnya Pribumi untuk menggunakan sistem ekonomi uang menyebabkan masyarakat terjebak dalam rayuan kemudahan mendapatkan uang yang menyebabkan banyak penduduk pribumi terjerat hutang dan berbagai macam kejahatan seperti judi, minuman keras, candu, dan prostitusi. Dampak selanjutnya adalah terpinggirkannya

masyarakat pribumi yang belum mengenal uang sebagai alat tukar, sehingga tidak mampu memanfaatkan uang sebagai mestinya (Hasanah, 2013).

Dampak *Agrarische Wet* terhadap Struktur Agraria Pasca Kolonial

Lahirnya Undang-undang Agraria tahun 1870 atau *Agrarische Wet* menciptakan adanya konsep *Domein Verklaring* oleh pemerintah Hindia-Belanda dan menyebabkan adanya dualisme dalam UU Agraria tahun 1870 yang tidak menjamin kepastian hukum (Sitanggang, dkk, 2024). Mengingat sistem ini bersifat mengeksploitasi rakyat pribumi, hal ini menjadi dasar perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang berkesinambungan dengan penguasaan tanah.

Undang-undang Pokok Agraria sebagian besar dibentuk oleh hukum adat. Dalam asal 5 UU PA berbunyi *"Maka hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat".* Sebelum ada aturan perundang-undangan tahun 1960, pada saat itu hak-hak atas tanah diatur dalam beberapa ketentuan yaitu:

1. *Agrarische Wet (Staatsblad 1870 No. 55).*
2. *Wet op de staatsinrichthing van Nederlans Indie (Staatsblad 1925 No. 447).*
3. *Agrarische Besluit (Staatsblad 1870 No. 118).*
4. *Algemene Domeinverkalring (Staatsblad 1875 No. 119A).*
5. *Domeinverklaring* untuk Sumatera *(dalam pasal 1 Staatsblad 1874 No. 94f).*
6. *Domeinverklaring* untuk Manado *(Staatsblad 1877 No. 55).*
7. *Domeinverklaring* untuk *Residentie Zuideren Oosterfdeling Beluit (Staatsblad 1888 No. 58).*

8. *Koninklijk Besluit (Staatsblad 1872 No. 29).*
9. Buku ke II Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
10. Hukum Adat dan peraturan-peraturan lainnya (De Roo De La Faille, 1925).

Namun setelah terbentuknya ketentuan UU PA nomor 5 tahun 1960, hak-hak di atas tidak berlaku lagi, karena ketidaksesuaian dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 yaitu menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia, utamanya bagi petani (Isnaini & Lubis, 2022). Oleh karena itu, Undang-undang Agraria berdampak terhadap pembentukan Undang-undang Pokok Agraria 1960.

Struktur Agraria pada masa kolonial sangat berpihak pada pengusaha swasta atau pengusaha modal, yang membuat ketimpangan kepemilikan tanah bahkan sosial antara petani pribumi dan pengusaha asing. Ketidakadilan sistem kolonial

menjadi dasar terbentuknya Reforma Agraria yang berpihak kepada rakyat Indonesia, khususnya kepada petani penggarap. UU PA tahun 1960 merupakan hasil dari Reforma Agraria atau landreform, yang bertujuan untuk menghapus dualisme yang sudah ada sebelum kemerdekaan atau pada masa kolonial (Syahyuti, 2016).

Adapun konsep yang merespons ketidakadilan sistem agraria sebelumnya yaitu dengan adanya hak milik, hak guna usaha (yang merupakan adaptasi dari hak *Erpacht* atau hak sewa tanah), dan hak guna bangunan. Hak-hak ini didasari dari hukum adat, namun di sesuaikan dengan kebutuhan pada zaman dan pembangunan (Hasanah, 2013).

Kesimpulan

Pembentukan Undang-undang Agraria atau *Agrarische Wet* didasari oleh berkembangnya paham liberalisme di Hindia-Belanda. *Domein Veklaring* merupakan konsep dari *Agrarische Wet* yang menyatakan bahwa tanah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan dianggap sebagai hak milik negara. Sebelum adanya *Agrarische Wet,* banyak tanah pribumi masih bersifat komunal atau hak bersama yang mengakibatkan tanah-tanah pribumi diklaim oleh negara dan disewakan kepada perusahaan swasta.

Adanya kebijakan tersebut mengakibatkan dampak negatif terhadap masyarakat pribumi, banyak dari mereka yang mengalami kemiskinan, paceklik, dan hilangnya akses terhadap lahan sumber penghidupan bagi mereka masyarakat pribumi. Sistem *Erpacht* atau sewa tanah memaksa masyarakat lokal untuk bekerja di perusahaan swasta

atau malahan memaksa menjual tanah hak mereka. Sistem ini memberikan dampak ketimpangan pada aspek ekonomi dan sosial.

Pasca kemerdekaan, barulah dibentuk Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960 yang timbul atas ketidakadilan yang muncul pada era kolonial, dan menjadi dasar terbentuknya landreform atau Reforma Agraria. *Agrarische Wet* memunculkan dualisme yang sangat berpihak kepada perusahaan swasta. Dibentuknya UU PA tahun 1960 bertujuan untuk menghapus dualisme kepemilikan tanah yang akan lebih berpihak kepada petani lokal. UU PA tahun 1960 menyorot betapa pentingnya konsep hukum adat untuk mengatur hak-hak atas tanah, seperti hak milik dan hak guna bangunan yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia setelah kemerdekaan.

Daftar Pustaka

Breman, J. (1983). *Control of Land and Labour in Colonial Java. A case study of agrarian crisis and reform in the region of Cirebon during the first decades of the 20th century.* Vol. 101, Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-en Volkenkunde.

Daliman, A. (2012). *Sejarah Indonesia Abad 19-20.* Yogyakarta: Penerbit Ombak.

De Roo De La Faille, P. (1925). Javaansch grondenrecht in het licht van Lomboksche toestanden. *Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië*, (3/4de Afl).

Hasanah, U. (2012). Status kepemilikan tanah hasil konversi hak barat berdasarkan UU no. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria dihubungkan dengan PP No. 24 tahun

1997 tentang pendaftaran tanah. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, *3*(1).

Isnaini & Lubis, A., A. (2022). *Hukum Agraria Kajian Komprehensif.* Medan: Pustaka Prima.

Ricklefs, M. C. (2007). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2001.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sitanggang, M. B., Angelica, L., Prasetyo, A. G., Kurmiati, E. P., Kirana, M. L., & Pajrin, R. (2024). Sejarah Terbentuknya UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Implementasinya Ditinjau dari Awal Lahirnya Hukum Agraria di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, *4*(5), 115-125.

Syahyuti, S. (2001). Pengaruh Politik Agraria Terhadap Perubahan Pola Penguasaan Tanah Dan Struktur Pedesaan Di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi, 19*(1).

Tasnur, I., Apriyanto, J., & Arrazaq, N. R. (2022). Liberalisme dan Monetisasi Ekonomi di Hindia Belanda (1870-1900). *Keraton: Journal of History Education and Culture*, *4*(2).

Utami, I. W. P. (2015). Monetisasi dan perubahan sosial ekonomi Masyarakat Jawa abad XIX. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, *9*(1).

Profil Penulis

Dzulqarnaen Syajaah Saepudin lahir di Tasikmalaya, 05 Januari 2005. Seorang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Siliwangi. Memiliki motto hidup *"hilap deui"*. Penulis dapat dihubungi melalui surel ke dzulqarnaensyajaahs@gmail.com dan HP 0857-9781-5546.

Yosua Eka Putra Hamongan lahir pada 13 Januari 2004. Seorang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Siliwangi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail yosuaaxoca@gmail.com dan HP 0812-9774-5370.

Zaini Ahdan lahir di Bogor, 18 April 2004. Seorang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Siliwangi. Penulis memiliki motto hidup *"diedankeun, kagok edan!"*. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail ahdan995@gmail.com dan HP 0812-9041-4264.

Zulpan Maulana lahir di Tasikmalaya, 28 Juli 2005. Seorang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Siliwangi. Penulis memiliki motto hidup *"kela mikir heula".* Penulis dapat dihubungi melalui akun e-mail zulpanmaulana95@gmail.com dan HP 0896-0300-8204.

Indonesia dalam Pusaran Sejarah: Sebuah Kajian Historis Multidimensi

Editor:
Wahyu Agil Permana

Tarian *Jaran Kepang:* Menggali Jejak Sejarah Warisan Budaya Jawa yang Mendunia

Amanda Putri Rachel, Azizah, Halwa Khatami, Rifal Sulaiman

Jaran kepang atau yang lebih dikenal dengan nama kuda kepang atau kuda lumping merupakan sebuah kesenian rakyat yang sudah dikenal berbagai kalangan. *Jaran kepang* merupakan sebuah tarian sejarah yang telah menjadi integritas bangsa Indonesia, berasal dari Ponorogo, Jawa Timur *jaran kepang* hadir dengan penggambaran seni kehidupan manusia yang direpresentasikan dengan properti dan gerakan tari *jaran kepang*.

Mulanya, *jaran kepang* bukanlah kesenian rakyat, melainkan hanya sebuah *dolanan* atau permainan yang hadir karena terinspirasi dari kegiatan sekitar. Pada saat itu masyarakat Indonesia hidup di masa kerajaan dengan kegiatan seperti berkuda, berburu, dan lainnya. Selain itu, terdapat bukti lain seperti lagu *jaranan* yang merupakan salah satu tembang *dolanan* (sebuah lagu yang dinyanyikan anak-anak sembari bermain). *Jaranan* ini hadir bersamaan dengan lagu *Gundul-gundul pacul* yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga (Hardiarini & Firdhani, 2022).

Jaran kepang yang awalnya hanya sebuah *dolanan* atau permainan anak-anak mengalami perkembangan, di mana masyarakat agraris Jawa mulai menghubungkan *jaran kepang* dengan ritual-ritual keagamaan dan upacara adat seperti *selamatan* ataupun bersih desa. Masyarakat mulai memasukkan unsur magis, di mana penari *jaran*

kepang mengalami *ndadi* atau kesurupan roh leluhur, yang mana pada kenyataannya tidaklah mudah.

Penambahan unsur magis inilah yang menambah daya tarik serta mengubah pandangan masyarakat terhadap *jaran kepang* yang semula hanya *dolanan,* menjadi sesuatu yang sakral. Dengan berkembangnya *jaran kepang,* maka masyarakat mulai memandang *jaran kepang* sebagai sebuah seni pertunjukkan yang kaya akan makna dan tradisi (Kiswanto, 2019).

Jaran kepang merupakan sebuah pertunjukkan dengan kuda yang dibuat dari anyaman bambu. Menurut Mufrihah (2018) kuda secara metaforik dalam pertunjukan *jaran kepang* berfungsi untuk melanjutkan hubungan antara masyarakat pendukung dengan roh orang yang sudah meninggal. Dalam pertunjukan *jaran kepang,* aspek komunikasi yang digunakan ialah non verbal dan

verbal, pesan-pesan non verbal dalam pertunjukan *jaran kepang* ialah pesan kinesik (fasial, gestural, dan postural) yang mana ditunjukan penari melalui gerakan dan ekspresi wajah (Umran & Handayani, 2024).

Selanjutnya pesan artifaktual yang ditunjukan melalui pakaian, properti, dan riasan wajah. Terakhir yang termasuk pesan non verbal ialah pesan bau-bauan yakni kemenyan. Pada pesan verbal tari *jaran kepang* lebih sedikit daripada pesan non verbal. Menurut Mufrihah (2018) komunikasi verbalnya hanya tampak pada saat sinden menyanyikan lagu di pengantar pertunjukan. Setiap pesan verbal dan non verbal memiliki makna filosofisnya tersendiri.

Pada zaman modern ini, *jaran kepang* masih terus eksis, akan tetapi *jaran kepang* yang dipentaskan atau dipertunjukkan hanya sekadar hiburan semata. Sehingga diperlukan peran dari tokoh seniman, pemerintah, dan masyarakat untuk

terus menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya agar j*aran kepang* dapat menjadi upaya dalam integritas bangsa.

Filosofi dan Makna

A. Gerakan

Banyak masyarakat yang masih mengaitkan akan suatu tarian tradisional dengan hal mistis, karena pemikiran ini sudah tersebar dari zaman nenek moyang hingga saat ini. Namun, tidak semua tarian yang ditampilkan pada saat ini menggunakan jalinan dengan makhluk halus, tetapi hanya dengan sebuah taktik yang membuat para audiens tertarik meskipun tidak pakai hal-hal yang berbau mistis.

Secara umum, gerakan dalam tarian-tarian jawa banyak diambil dari gerakan pencak silat, terutama yang direpresentasikan

dalam gerakan *jaranan* ini. Setiap gerakan yang ditampilkan dalam tarian *jaranan* memiliki makna simbolik yang membuat satu penampilan itu menghasilkan sebuah cerita yang mencerminkan sebuah pelajaran bagi kehidupan manusia (Sumanto, 2022). Berikut adalah beberapa contoh makna yang terkandung dalam setiap macam gerakan yang ada di *jaran kepang* terutama *jaranan buto* dan *jaranan dor.*

a. Jaranan Buto

Alur cerita dari pertunjukkan *jaranan buto* ini menggambarkan kehidupan seorang raksasa (dalam bahasa jawa disebut *buto*) yang memiliki kepribadian/sifat seorang ksatria pemberani yang bertarung melawan musuh. Dalam penampilan tarian *jaranan buto* terbagi menjadi beberapa

babak yang memiliki makna masing-masing.

1. Babak pembukaan (*bukak kalangan*)

   Tahap ini menjadi penanda akan permulaan suatu pertunjukkan *jaranan buto.* Gerakan yang ditampilkan pada babak ini yaitu seorang pawang muncul dengan membawa sebuah cambuk atau *pecut* yang digerakkan dengan cara mencambuk ke tanah. Makna dibalik gerakan ini menjadi simbol akan suatu permohonan agar terlindungi dari rintangan atau gangguan selama pertunjukkan berlangsung, baik dari makhluk yang nyata maupun tak nyata (Kiswanto, 2019).

2. Awalan (*blendro*)

   Pada babak awalan ini terbagi dari lima macam gerakan, yaitu junjungan

(sebuah gerakan dengan cara mengangkat tangan dan kaki), *lenggang* (suatu gerakan berjalan tanpa adanya aturan), *nyirik* (dalam bahasa jawa artinya menyeret, gerakan menyeret kaki ke samping kanan dan kiri secara bergantian yang sering dilakukan dalam tarian jaran kepang), *pacak ngoko* (gerakan dengan cara mengangkat tangan secara bergilir), *dan sendi* (gerakan terakhir pada babak ini yang mengartikan untuk pertukaran penari). Macam-macam gerakan pada babak ini bermakna kepribadian seorang ksatria yang pemberani dan memiliki kegigihan dalam berperang melawan musuh (Umran & Handayani, 2024).

3. Tahapan inti (*buthonan*)

    Gerakan yang dilakukan pada sesi ini menggambarkan aktivitas pada saat berperang dan akan mencapai kemenangan ataupun keberhasilan.

4. Babak akhir (*kesurupan atau ndadi*)

    Dalam tahapan ini, para penari kerasukan roh makhluk halus dan akan menggerakkan tubuhnya mengikuti alunan gamelan dengan tidak sadarkan diri. Babak ini juga merupakan klimaks atau puncak dari pertunjukan jaran kepang. Para penari akan menarik perhatian audiens dengan memakan sesuatu yang tidak lazim dimakan oleh manusia pada umumnya, seperti beling (kaca), ayam mentah, sesajen, maupun rumput sekalipun. Selain itu, ada juga para penari yang melakukan aksi

dengan jalan diatas tumbuhan berduri dan bara api, serta badan yang dicambuk berkali-kali.

Makna dibalik atraksi tersebut bahwa setiap manusia memiliki hawa nafsu, dan bagaimana setiap orang dapat mengendalikan hawa nafsunya masing-masing. Jika manusia tidak bisa menahan, maka tubuh mereka akan dikuasai oleh setan yang mengendalikan hawa nafsu tersebut. Selain itu, fenomena kesurupan ini juga sebagai representasi dari sikap melawan akan suatu penindasan (Mufrihah, 2018).

b. Jaranan Dor

Pertunjukan *jaranan dor* ini memiliki tahapan yang hampir sama dengan *jaranan buto,* yaitu pada babak

pembukaan dan awalan. Adapun babak inti yang dimainkan dalam jaranan ini adalah dengan menampilkan sebuah atraksi kesurupan dan para penonton akan bersorak sambil bertepuk tangan, yang dimana pada babak ini juga merupakan daya tarik penting dari *jaranan dor*. Penari yang kesurupan roh tadi akan mencari dan menangkap asal sumber bunyi yang dihasilkan dari para penonton tersebut. Di tahapan inilah letak keterhubungan komunikasi antara penari dan audiens.

Babak selanjutnya yaitu *caplokan,* dengan cara menyatukan mulut barongan yang terbuat dari kayu dan menghasilkan bunyi seperti "tak..tak..tak". Hal tersebut dilakukan untuk mengendalikan penari yang

sedang kesurupan. Dan tahapan terakhir dari *jaranan dor* ini adalah dengan dimainkannya gamelan yang menghasilkan suara kalem dan sederhana dengan iringan dari alat musik *tanjidor* atau *dor* yang merupakan instrumen penting dari *jaranan dor* (Sendy, 2017).

B. Properti

Pada tarian *jaran kepang,* para penari membutuhkan berbagai properti untuk mendukung gerakan dan karakter dalam tarian yang ditampilkan. Properti ini membantu menyampaikan pesan kepada penonton. Berikut ini beberapa properti yang digunakan.

a. Jaran Kepang

Jaran kepang merupakan salah satu properti utama yang digunakan dalam pertunjukan. Nama *jaran kepang* berasal dari bahasa Jawa *jaran* yang berarti kuda dan *kepang* yang berarti anyaman. Jadi, *jaran kepang* ini adalah anyaman bambu yang dibentuk seperti kuda (Radhia, 2016).

b. Cambuk atau *Pecut*

Cambuk menjadi pelengkap dalam tarian jaran kepang yang terbuat dari bahan yang dijalin yang kemudian dililit dan dipilin. Cambuk ini menghasilkan suara keras saat dikibas yang menggambarkan seperti manusia yang sedang menunggangi kuda.

c. Barongan

Barongan adalah tokoh dalam mitologi Jawa yang telah mengalami akulturasi dengan budaya Bali. Ia digambarkan sebagai raja para roh dan dilambangkan sebagai pelindung dan ditampilkan dalam bentuk kucing dan naga.

Menurut Klinsando dkk (2023) karakter *barongan kucingan* adalah sosok angkara murka yang ditaklukkan dan dibawa ke arah kebaikan. Barongan kucing dimainkan dengan cara digigit dalam topeng tersebut. Sedangkan karakter *barongan naga* merupakan simbol tokoh yang jahat (Shofa, 2020). Visual topeng Barongan memiliki bentuk yang menyeramkan dengan taring yang panjang, matanya terbelalak

lebar, dan apabila topeng tersebut dimainkan, mulut poteng akan terbuka seakan-akan ingin melahap apa saja yang berada di sekitarnya.

d. Celengan

Celengan adalah properti yang digunakan dalam pertunjukan *jaran kepang.* Istilah *celengan* berasal dari bahasa Jawa, *celeng,* yang berarti babi hutan. Menurut Rahayu (2017) *celeng* dalam pertunjukan digambarkan sebagai musuh dari *jaran kepang.* Sama halnya seperti *jaran kepang, celeng* juga digunakan sebagai properti tunggangan.

C. Alat Musik

Alat musik dimainkan untuk menciptakan iringan suara dalam tarian yang akhirnya

menghasilkan irama yang memperkuat suasana serta mengatur tempo dari tarian. Berikut alat musik yang digunakan dalam pertunjukkan *jaran kepang.*

a. Kendang

   Kendang adalah salah satu alat musik yang menghasilkan ritme sebagai pemimpin jalannya irama dalam tarian. Suara yang dihasilkan pada kendang berfungsi sebagai penentuan gerakan tari.

b. Gong

   Gong memiliki peran penting dalam menghasilkan suara menggema, karena ukuranya sama dengan penco benang yang memberikan penekanan suara pada setiap tarian. Gong memiliki ukuran yang berbeda-beda, sehingga nada yang dihasilkan juga akan berbeda.

c. Saron

Saron adalah alat musik yang menghasilkan suara dengan cara dipukul. Sama halnya dengan bonang dan demung, saron juga terdiri dari laras slendro dan pelog. Perbedaan antara demung dan saron adalah pada ukurannya, demung lebih besar daripada saron (Pujiningtyas, 2019).

D. Pakaian

Pakaian atau busana menjadi salah satu unsur penting dalam pementasan *jaran kepang*, serta menjadi ciri khas antara sanggar satu dengan lainnya. Busana yang dipakai biasanya representasi dari pakaian para prajurit Jawa zaman dahulu, yaitu pakaian berlengan panjang atau pendek dengan paduan rompi (Kuswarsantyo, 2009). Namun,

ada juga sebagian penari yang tidak mengenakan pakaian atau bertelanjang dada.

Kostum bagian bawah mengenakan celana pendek di bawah lutut dengan paduan beberapa hiasan warna-warni dan kain ikat celup (kain motif batik). Pada bagian kepala, biasanya penari menggunakan mahkota dan juga pengikat kepala ataupun blangkon. Aksesoris lain yang digunakan ada gelang tangan dan kaki, ikat pinggang, dan lainnya. Biasanya pakaian penari *jaranan* menggunakan warna merah yang memiliki makna keberanian, karena prajurit perang zaman dahulu harus memiliki sifat pemberani (Kristiantoro dkk, 2020).

Perkembangan Jaran Kepang dari Masa ke Masa

Jaran kepang sudah mengalami perkembangan bahkan sejak zaman dulu. Menurut Kuswarsantyo (2009) ada tiga kategori format penyajian atau pengemasan kesenian *jaran kepang* sesuai fungsinya di tengah-tengah masyarakat. Pertama, sebagai sarana ritual yang hanya dapat dijumpai setahun sekali untuk acara-acara seremonial tertentu. Kedua, sebagai hiburan yang dapat dijumpai ketika ada orang punya hajat. Ketiga, untuk festival yang telah diformat dengan koreografi dan aturan tertentu oleh panitia penyelenggara. Temuan tersebut mengindikasikan transformasi *jaran kepang* sesuai dengan dinamika zaman secara modern, namun bukan berarti meninggalkan bentuk dan fungsi lamanya.

Perkembangan yang terjadi membuat beberapa aspek dari tarian *jaran kepang* ini berubah, baik dari segi gerakan, musik, hingga fungsinya.

Berikut adalah beberapa perkembangan atau transformasi kesenian jaran kepang dari masa ke masa.

A. Jaran Kepang Klasik

Jaran kepang klasik ini diperkirakan sudah ada sejak zaman kerajaan Hindu-Budha, tepatnya sebelum abad ke-15. *Jaran kepang* pada periode ini sangat dihormati sebagai seni yang sakral dan dan menjadi bagian dari ritual masyarakat agraris. Gerakannya tidak terlalu berlebihan dan sangat mengikuti aturan.

Ciri khas yang paling menonjol dari *jaran kepang* klasik adalah tujuan diadakannya yaitu dianggap membawa keberkahan dan melindungi dari roh jahat. Berbeda dengan *jaran kepang* kekinian, yang digelar hanya untuk hiburan umum tanpa keterikatan dengan adat atau kepercayaan lokal (Kiswanto, 2019).

B. Jaran Kepang Pegon

Jaran kepang pegon memiliki beberapa aspek yang berbeda dari *jaran kepang* sebelumnya. Busana dan beberapa gerakan telah berkembang, berbeda dengan *jaran kepang* klasik karena terdapat indikasi bahwa *jaran kepang pegon* ini merupakan hasil akulturasi antara *wayang wong* dan *jaran breg.* Menurut Sugiarto & Yanuartuti (2022) *jaran kepang pegon* berbeda dari jaranan pada umumnya, karena menggunakan selendang sebagai properti utama serta penggunaan busananya mirip dengan *wayang wong* lengkap dengan *probo* dan *irah-irahan.*

Salah satu keunikan dari jaran kepang pegon ini juga terletak pada iringan musiknya yang menggunakan kembangan *slompret* dari awal sampai akhir pertunjukan dan tidak diselingi dengan lagu populer.

C. Jathilan

Jathilan berasal dari Yogyakarta dan Jawa Tengah. *Jathilan* diperkirakan berkembang selama periode Mataram, yakni abad ke-17-18. Tarian pada *jathilan* ini lebih difokuskan pada estetika gerakan dengan iringan musik gamelan yang lembut. Unsur *trance* tetap ada, namun tidak sekuat gaya *jaran kepang* yang dulu. *Jathilan* juga terkenal karena mengisahkan tentang perjuangan Raden Fatah dan Sunan Kalijaga dalam melawan penjajahan Belanda (Hardiarini & Firdhani, 2022).

Versi lain juga mengisahkan tentang prajurit keraton yang sedang mengadakan latihan perang *(gladen)* di bawah pimpinan Sultan Hamengku Buwono I. Ada dua pakem yang ditampilkan, yaitu pakem lama yang dinamakan *jathilan pung jroll* dan pakem baru

yang lebih dikenal dengan *jathilan kreasi baru* (Kiswanto, 2019).

D. Jaran Kepang Sentherewe dan Campursari

Jaran kepang sentherewe berasal dari daerah Tulungagung, Jawa Timur. *Jaran kepang sentherewe* ini mulai dikenal pada akhir abad ke-19. Ciri khasnya yang energik, unsur *trance*-nya yang kuat, serta gerakannya yang kasar dan cepat menggambarkan dinamika sosial masyarakat pesisir Jawa Timur pada saat itu (Kuswarsantyo, 2009).

Sedangkan *jaran kepang campursari* mulai populer pada akhir abad ke-20, karena memadukan musik tradisional dengan alat musik modern. *Jaran kepang campursari* memiliki perubahan hampir pada semua aspek yang membangun pertunjukan kesenian tersebut. Mulai dari urutan penyajian, gerakan tarian yang spontan, tata rias dan busana,

penambahan alat musik campursari, tata suara, tempat pentas, hingga penonton yang dulunya bersifat pasif, kini berubah menjadi aktif (Radhia, 2016).

Memperkuat Integritas Bangsa

Upaya mewujudkan integritas bangsa melalui kesenian rakyat *jaran kepang* dapat dilakukan dengan keterlibatan banyak pihak seperti, seniman, pemerintah kota, dan masyarakat. Kota Batu merupakan salah satu daerah yang menjadi contoh bagaimana *jaran kepang* berfungsi sebagai alat untuk menjaga integritas bangsa, dengan pelaksanaan festival *jaran kepang* yang diadakan setiap tahunnya.

Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan festival *jaran kepang* menghadirkan kebersamaan dan keberagaman antar masyarakat dengan latar belakang yang berbeda. Selain itu, lembaga

kebudayaan dan dinas pariwisata semestinya berperan aktif serta berkolaborasi dalam melestarikan khazanah kebudayaan lokal. Festival seperti *jaran kepang* juga dapat memberikan pelajaran akan pentingnya untuk mengenal dan melestarikan kebudayaan lokal (tradisional) sebagai harta paling berharga bagi suatu bangsa.

Kesimpulan

Tarian *jaran kepang* merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Pada awalnya, tarian *jaran kepang* ini merupakan permainan atau *dolanan* anak-anak yang terinspirasi dari kehidupan masyarakat sekitar zaman dahulu. Namun, seiring berkembangnya zaman, kesenian ini sering dipadukan dengan unsur mistis dan ritual keagamaan yang mencerminkan tradisi masyarakat di Jawa.

Dalam permainan *jaran kepang,* unsur gerakan, properti, alat musik, dan pakaian memiliki makna filosofi mendalam yang mencerminkan nilai-nilai seperti keberanian dan perjuangan dalam pengalaman hidup yang tidak selalu mudah. *Jaran kepang* dapat dijadikan sebagai upaya integritas bangsa untuk memperkuat kebersamaan dan keberagaman antar masyarakat. Kesenian ini juga menanamkan akan pentingnya untuk mengenal kebudayaan lokal guna menumbuhkan rasa bangga terhadap kebudayaan lokal.

Daftar Pustaka

Hardiarini, C., & Firdhani, A. M. (2022). Kesenian Kuda Lumping: Tinjauan Studi Multiperspektif. *Indonesian Journal Of Performing Arts Education*, *2*(1).

Kiswanto, K. (2019). Transformasi Multipel dalam Pengembangan Seni Kuda Kepang. *Dance and Theatre Review: Jurnal Tari, Teater, Dan Wayang*, *2*(1).

Klinsando, A. H., Ponimin, P., & Anggriani, S. D. (2023). Bentuk dan Teknik Penggarapan Topeng Barongan Kucingan di Tulungagung. *JoLLA: Journal of Language, Literature, and Arts*, *3*(2).

Kristiantoro, E. L., Purwanto, P., & Gunadi, G. (2020). Kajian Estetika Visual Tata Busana dan Properti Kesenian Jaran Kepang Turonggo Jati Desa Jebengplampitan Kecamatan Sukoharjo

Kabupaten Wonosobo. *Eduarts: Jurnal Pendidikan Seni*, *9*(1).

Kuswarsantyo. (2009). *Art For Art dan Art For Mart: Orientasi Pelestarian Dan Pengembangan Seni Pertunjukan Tradisional.* Jakarta Selatan: Wedatama Widya Sastra.

Mufrihah, D. Z. (2018). Fungsi dan Makna Simbolik Kesenian Jaranan Jur Ngasinan Desa Sukorejo Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar. *Mudra Jurnal Seni Budaya*, *33*(2).

Pujiningtyas, O. (2019). *Eksistensi Kesenian Jaranan Guyubing Budaya Kelurahan Blitar Kecamatan Sukorejo Kota Blitar*. (Doctoral dissertation, ISI Surakarta).

Radhia, H. A. (2016). Dinamika Seni Pertunjukan Jaran Kepang di Kota Malang. *Jurnal Kajian Seni*, *2*(2).

Rahayu, L., E. (2017). *Narasi Pentas Pertunjukan Jaranan Samboyo Putro di Desa Ngetrep*

Kabupaten Nganjuk. (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

Sendy, R. (2017). *Dinamika Kesenian Jaranan Dor Anusopati Candi Rejo (ACR) Di Desa Kidal Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang*. (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

Shofa, C. N. (2020). Jepaplok: Koreografi Penggambaran Hewan Mitologi Jawa. *Joged*, *16*(2).

Sugiarto, M. O. S., & Yanuartuti, S. (2022). Akulturasi Pertunjukan Jaranan Pegon di Trenggalek. *Jurnal Seni Tari*, *11*(1).

Sumanto, E. (2022). Filosofi dalam Acara Kuda Lumping. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, *5*(1).

Umran, L. M., & Handayani, R. (2024). Analisis Makna Simbolik Tari Kuda Lumping Jaranan Buto sebagai Identitas Etnis Jawa di Kecamatan

Konda. *Newcomb: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media*, *1*(2).

Profil Penulis

Amanda Putri Rachel lahir di Bangko, 30 November 2004. Seorang mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Brawijaya. Memiliki motto hidup *"terbentur, terbentur, terbentuk".* Penulis dapat dihubungi melalui e-mail amandaputrir@student.ub.ac.id dan HP 0821-8304-4913.

Azizah lahir di Tulungagung, 09 April 2006. Seorang mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Brawijaya. Memiliki motto hidup *"ikhtiar adalah kunci kesuksesan".* Penulis dapat dihubungi melalui e-mail azizah09@student.ub.ac.id dan HP 0822-3127-3628.

Halwa Khatami lahir di Surabaya, 23 September 2004. Seorang mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Brawijaya. Penulis memiliki motto hidup *"whatever life throws at you, i can always count on Allah".*

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail halwakhatami@student.ub.ac.id dan HP 0896-1452-4107.

Rifal Sulaiman lahir di Jeddah, 11 September. Seorang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Brawijaya. Penulis memiliki motto hidup *"small steps lead to big changes".* Penulis dapat dihubungi melalui e-mail rifalsulaiman11@student.ub.ac.id dan HP 0877-3195-2958.

Batik Indonesia dari Masa ke Masa: Dinamika Batik dari Kolonial hingga Global

Fadela Nurul Aisyah, Suci Saras Wati, Ilham Fadlillah

Batik merupakan warisan khazanah kebudayaan lokal yang terkenal hingga global, karena aspek seni motifnya. Batik tidak hanya didefinisikan sebagai kain bergambar seperti yang digunakan dalam industri tekstil. Batik merupakan proses pewarnaan kain menggunakan lilin dan fiksasi warna yang menghasilkan motif yang unik dan menarik (Siregar dkk, 2020). Pada awalnya, seni batik hanya digunakan pada lingkungan keraton. Hal ini sebagai salah satu cara untuk menunjukkan eksistensi aristokrat dalam karya seni yang dibuat.

Namun seiring perkembangan zaman, seni batik sudah tersebar luas di masyarakat bahkan telah menjadi mata pencaharian masyarakat (Kustiyah, 2017).

Asal usul batik sendiri masih menjadi misteri dan terus diperdebatkan hingga hari ini. Pada 1677, ada bukti sejarah, bahwa sutera dikirim dari Cina ke Jawa, Sumatra, Persia, dan Hindustan. Selain itu, batik juga dikirim ke Malabar dari Jawa pada 1516 dan 1518. Dalam catatan tersebut, disebutkan tentang kain-kain berwarna-warni yang disebut tulis. Batik klasik atau batik murni merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut batik tulis (Kustiyah, 2017).

Pada akhir abad ke-18, batik menjadi populer. Jenis batik cap menandai masa industrialisasi. Ada jenis batik baru yang muncul sejak teknik otomatisasi dimasukkan ke dalam era industrialisasi dan globalisasi, yaitu batik *printing*. Percetakan batik

berdampak pada banyak sektor industri batik, karena prosesnya yang cepat dan harganya yang relatif lebih murah daripada batik tulis. Akibatnya, industri batik tradisional, khususnya di pulau Jawa, mengalami penurunan yang cepat. Batik sering dipakai di acara resmi, keluarga, dan tempat kerja karena kainnya yang nyaman (Trixie, 2020).

Menurut Widadi (2019) kain batik berbentuk kain panjang seperti sarung lalu dikembangkan menjadi bahan busana, hingga menjadi produk batik yang digunakan untuk produk Interior. Ketidakpastian tentang definisi batik menyebabkan banyak perubahan dalam proses pembuatan kain batik. Proses pewarnaan kain batik dimulai dengan melekat lilin batik pada kain sebagai perintang warna. Kemudian, jika diinginkan, kain dapat diwarnai secara langsung menggunakan pewarnaan kain *silk screen* atau pewarnaan digital *silk screen*

untuk membuat motif batik pada kain yang disebut tekstil bermotif batik.

Oleh karena itu, proses pembuatan batik yang mulanya hanya mencelupkan kain ke dalam larutan pewarna untuk pada kedua belah sisi, berubah menjadi proses menyablon (menggambar) yang menempelkan pewarna pada satu sisi kain sehingga warna tidak tembus.

Menurut Simanjuntak dkk (2023) sejarah batik menunjukkan bahwa batik hanya milik kelompok dan individu tertentu. Tidak mudah bagi masyarakat umum untuk mendapatkan akses terhadap bagaimana batik berkembang di masa lalu, karena adanya pengaruh sistem sosial dan politik yang ada selama masa kolonialisme dan keraton.

Namun seiring berjalannya waktu, batik telah berkembang menjadi bagian integral dari masyarakat dan identitas bangsa Indonesia yang tidak dapat dipisahkan. Kita dapat memahami bahwa

batik tidak hanya milik golongan, komunitas, atau kelompok etnis tertentu di dunia modern. Masyarakat Jawa tidak hanya menjadi "pemilik pertama" batik Indonesia. Pada akhirnya, Batik dapat berkembang menjadi bagian penting dari Indonesia, yang dapat dikembangkan oleh semua orang karena merupakan bagian dari jati diri Indonesia yang beragam dan kompleks.

Di era modern, batik dapat memperkuat dan mempertahankan identitas budaya dan nasional Indonesia. Baju batik adalah alat penting untuk menunjukkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia internasional di era globalisasi yang cenderung menciptakan sekat atau batas budaya. Batik dapat menjangkau generasi muda dengan desain yang modern dan inovatif. Ini juga menjadi salah satu cara penting untuk mengatasi warisan budaya yang berharga (Gugat dkk, 2023). Tidak hanya itu, batik juga memiliki makna filosofis yang

mendalam. Motif batik sering kali mencerminkan keindahan alam, legenda, kepercayaan, dan nilai sosial budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Eksistensi Batik di Indonesia

Batik di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan sangat dipengaruhi oleh latar belakang bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan dengan banyak kerajaan sebelum menjadi negara kesatuan. Pada awalnya, batik mulai dikenal sejak era Kerajaan Majapahit yang terkenal dengan tradisi membatik yang telah tersebar luas di Nusantara dan terus mengalami perkembangan hingga era Kerajaan Mataram, Surakarta, dan Yogyakarta (Ulum, 2009).

Batik menyebar melalui perpaduan budaya. Dulunya hanya keluarga kerajaan dan para pengikutnya yang memakai batik. Namun seiring banyaknya pengikut kerajaan yang tinggal di luar

keraton dan bergaul dengan masyarakat, seni batik kemudian ditiru oleh masyarakat. Akhirnya membatik menjadi tradisi sehari-hari bagi wanita zaman dulu. Pekerjaan membatik masih lebih sering dilakukan oleh wanita, sementara penggambaran motif cenderung dilakukan oleh laki-laki. Kejadian yang serupa juga terjadi di hampir semua wilayah di Indonesia (Rosalina & Martineli, 2013).

Penyebaran batik di Nusantara dimulai dari daerah Mojokerto dan Tulungagung sebagai dasar dari Kerajaan Majapahit. Tulungagung memiliki catatan sejarah istimewa mengenai keberadaan batik. Pada zaman kejayaan Majapahit di bawah pimpinan Patih Gajah Mada, Bonorowo dikuasai oleh Adipati Kalang yang tidak bersatu di bawah pemerintahan Majapahit. Patih Gajah Mada berkomitmen untuk menyatukan nusantara di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit dan memerangi Bonorowo yang mengakibatkan

terjadinya peperangan. Adipati Kalang meninggal dalam pertempuran di Desa Kalangbret. Sejak itu, Bonorowo menjadi wilayah Majapahit sehingga banyak keluarga dan pasukan Majapahit yang tinggal di sana (Yulianto dkk, 2019).

Batik juga sering dikaitkan dengan para pelayan kerajaan, sehingga keterampilan membatik mulai dikuasai oleh penduduk Bonorowo dan dijadikan sebagai sumber penghasilan utama bagi mereka. Selama perkembangannya, batik Bonorowo sangat dipengaruhi oleh desain dari Solo dan Yogyakarta dikarenakan pelarian pengikut Pangeran Diponegoro setelah kalah dalam perang melawan Belanda (Wulandari, 2022).

Kemampuan membatik masyarakat berkembang pesat pada masa itu, sehingga menjadikan batik sebagai komoditas usaha yang bergengsi. Selain kepopuleran batik di kalangan pegawai kerajaan, batik juga membutuhkan

keterampilan yang tinggi dan proses yang rumit, sehingga membuat harga batik menjadi cukup mahal untuk dijadikan sebagai sumber penghasilan. Majunya kerajaan-kerajaan Islam ikut mempercepat penyebaran budaya membatik di masyarakat, menjadikan batik terkenal di berbagai wilayah (Yulianto dkk, 2019).

Pada akhir abad 19, batik pernah menjadi pusat perhatian dan mempengaruhi seni Eropa, bahkan menjadi inspirasi bagi seniman-seniman dunia di Eropa. Terdapat catatan sejarah mengenai batik di Eropa yang ditulis oleh tokoh-tokoh Eropa yang pernah tinggal di Indonesia pada masa kolonial. Thomas Stamford Raffles dalam bukunya yang berjudul *The History Of Java*, karya menggambarkan pengalamannya ketika menjadi gubernur Jawa dari 1811 hingga 1816 sebagai orang Inggris pertama yang membawa benda seni Indonesia ke Eropa, termasuk batik. Di Eropa, Raffles dianggap sebagai

orang pertama yang menulis tentang batik dan teknik batik secara sangat rinci dan komprehensif. Koleksi batik Nusantara yang dimiliki oleh Raffles akhirnya dibeli oleh British Museum pada 1859 (Adisasmito, 2018).

Pada masa setelah kebangkrutan VOC yang menyebabkan banyak orang Belanda bermigrasi ke Indonesia, penambahan jumlah pemukiman Eropa meningkatkan permintaan kain batik. Hal ini dikarenakan batik cocok dengan tata busana wanita Belanda di daerah tropis. Pada mulanya, batik Belanda menampilkan variasi corak seperti garis-garis dan lingkaran, serta tema cerita rakyat populer seperti *Little Red Riding Hood* dan *Snow White* dengan tujuh kurcaci.

Namun, perkembangan zaman yang lebih menekankan pada identitas yang jelas, pola-pola yang mencerminkan hal tersebut tidak lagi terlihat. Mereka telah digantikan oleh pola yang sangat

dipengaruhi oleh gaya Belanda seperti rangkaian bunga, buket besar, atau burung bangau di tengah tumbuhan air (Suyani, 2013).

Pada saat penjajahan Jepang, para pengusaha didorong untuk memproduksi batik sesuai dengan keinginan militer Jepang sebagai hadiah. Beberapa batik dibuat di bawah perintah dan pengawasan ketat pemerintah Jepang dengan pola baru yang mirip dengan kain-kain tradisional Jepang yang dikenal sebagai batik Jawa *Hokokai* (Wulandari, 2022). Batik yang diciptakan pada masa itu memiliki pengaruh budaya Jepang yang kuat pada pola dan warnanya, meskipun pada aplikasinya tetap menampilkan pola ornamen asli dari batik Jawa.

Bentuk ragam hias bunga sakura, krisan, dahlia, dan anggrek, serta tambahan kupu-kupu diatur di atas latar belakang pola motif Jawa, seperti parang, lereng, dan ceplok. Sesekali, burung merak muncul karena melambangkan keindahan dan keanggunan

di Jepang. Rona yang bervariasi, seperti kuning, ungu, merah muda, dan merah, secara terang menunjukkan keindahan dan kekhasan Jepang. Salah satu penataan yang sangat jelas menunjukkan pengaruh Jepang adalah pola pinggiran yang terdiri atas berbagai hiasan bunga dan kupu-kupu yang diatur dari pojok atas ke arah bawah atau pojok bawah ke arah samping, mirip dengan tata susun pada baju kimono (Suyani, 2013).

Sementara pada masa kini, batik sudah banyak perubahan karena globalisasi. Banyak sekali budaya-budaya asing yang masuk dan menjadi *trend* di Indonesia yang menjadikan batik harus beradaptasi kembali dengan berkembangnya zaman. Misalnya, seperti maraknya cara berpakaian *crop top* yang akhirnya membuat para produsen batik harus menyesuaikan permintaan pasar dan kemauan konsumen.

Hal ini yang kemudian dianggap menghilangkan nilai-nilai yang terkandung dalam seni batik itu sendiri (Wihardi dkk, 2015). Meskipun demikian, masih banyak juga orang yang tetap mempertahankan keaslian dari batik dengan cara menjaga warisan yang telah ditinggalkan dari generasi sebelumnya untuk dilanjutkan oleh generasi selanjutnya dan tetap melestarikan batik sebagai warisan tak benda milik Indonesia.

Evolusi Motif Batik Indonesia

A. Motif Batik Semarang

Batik Semarang diproduksi dengan motif dan ikon kota Semarang. Munculnya batik di Semarang dipengaruhi oleh batik Belanda pada abad 17-18 yang pada awalnya batik hanya diperuntukkan bagi masyarakat Belanda. Namun, kini batik Belanda dapat dinikmati oleh masyarakat lebih luas. Produksi batik dilakukan

di daerah pesisir utara seperti Pekalongan dan Semarang (Doellah, 2002).

Masuknya batik Belanda ke Semarang mempengaruhi masyarakat lokal dalam membuat batik khas Semarang. Batik Semarang mengalami perubahan motif dan nilai-nilai dari masa ke masa. Sejak abad ke-20, aktivitas membatik semakin terlihat. Pada 1970-an, Batik *Kerij Tan Kong Tien* membawa kejayaan pada batik Semarang, namun krisis moneter pada 1998 menyebabkan penurunan (Asikin, 2008).

Motif batik Semarang mirip dengan batik di kota-kota pesisir utara pulau Jawa, dengan ciri-ciri bebas, ragam hias flora dan fauna, dan warna cerah. Namun, terdapat perbedaan pada warna dasar batik dan motif batik karena pengaruh budaya Cina. Batik Semarang memiliki motif fauna seperti merak dan jago,

sementara batik di kota lain menonjolkan motif flora seperti buket dan bunga cempaka. Pembatik di Semarang tidak memiliki motif baku dan lebih ekspresif dalam menciptakan karya (Heringa & Harmen, 1997).

Motif batik Semarang mengalami perubahan karena faktor demografi wilayahnya dan permintaan pasar yang mempengaruhi eksistensi batik. Kain batik ini mencerminkan nilai budaya dan interaksi Semarang dengan bangsa lain. Perubahan motif bertujuan agar lebih sesuai dengan preferensi pasar nasional dan internasional, dengan motif yang lebih modern dan sesuai selera pasar.

a. Motif Warak Ngendog

   Motif ini merupakan kreasi Neni Asmarayani pada 1970, yang tercipta batik tersebut dikarenakan atas dasar kesukaan. Pada kegiatan pembuatannya

melibatkan pelukis dan seniman yang terkenal pada masanya. Motif tersebut memiliki makna yaitu *Warak* yang berarti gambaran hewan mitologi hasil perpaduan tiga unsur akulturasi budaya, yaitu: Jawa, Tionghoa, dan Arab. Kemudian *Ngendog* dalam bahasa Jawa yang artinya bertelur. Motif ini berwarna khusus seperti merah, putih, kuning, dan hijau. Fungsi dari motif ini adalah sebagai ciri khas dari kota Semarang (Rahmawati & Afrizal, 2023).

Gambar 8. Motif warak ngendog

Sumber: Rahmawati & Afrizal 2023

b. Motif Franquemont

Motif ini diciptakan oleh Carolina Josephina van Franquemont pada 1850-1860. Batik dengan motif Belanda ini dikembangkan pada masa penjajahan Belanda oleh perempuan Belanda maupun Indo-Eropa. Motif batik ini dikenal sebagai batik *Prankemon* yang memiliki berbagai ragam motif seperti motif dongeng, wayang, puisi, dan naturalis. Namun, sebagian besar motif batik ini memiliki khas menggambarkan sebuah karangan bunga, ilustrasi dongeng dan hiasan latar Eropa (De Carlo, 2020).

Gambar 9. Motif franquemont

Sumber: thephrase.id

Motif *Franquemont* terkenal pola bermotif Eropa, China, dan pesisir utara khususnya Madura dan pola dari keraton. Motif batik menampilkan tokoh wayang, naga, Dewi Shih Wang Mu, pohon persik, dan garuda. Motif batik *Franquemont* memiliki fungsi untuk menampilkan figur dan atribut dari berbagai dongeng Eropa.

Motif batik Belanda ini masih terus berkembang hingga masa penjajahan Jepang. Akan tetapi, setelah kependudukan Jepang selesai, batik tersebut tidak ada lagi yang meneruskan usahanya. Motif batik ini media cetak di atas plastik stiker khusus tahan air (Syifaa, 2023).

c. Motif Merak Jeprak

Motif batik *Merak Jeprak* merupakan hasil kreasi Tan Kong Tien, seorang lelaki keturunan Tinghoa yang memulai usaha batik pada abad ke-20. Motif batik ini menggambarkan seekor burung merak yang sedang mengembangkan secara penuh untuk menunjukkan keindahannya.

Pola ini terinspirasi dari perilaku burung merak ketika masa berahi untuk

menarik pasangannya. Motif ini mempunyai simbol keagungan, keindahan, dan semangat menggapai tujuan. Motif ini dilukis masih menggunakan canting, bilah kayu, atau kuas (Afreliyanti, 2014).

Gambar 10. Motif merak jeprak

Sumber: momtraveller.com

B. Motif Batik Minang

Eksistensi batik Indonesia juga berkembang di Sumatera, salah satunya adalah batik Minang yang ditemukan di Sumatera Barat. Tidak diketahui kapan dan siapa yang memulai seni membatik di Minangkabau. Akan tetapi, dahulunya ada seni membatik yang disebut *Batik Tanah Liek*. Batik ini dibuat dengan menggunakan pewarnaan tanah liat. Batik *Tanah Liek*, batik ini sempat hilang selama penjajahan Jepang, namun diperkenalkan kembali pada 1994 oleh seorang tokoh bernama Wirda Hanim.

Gambar 11. Motif tanah liek

Sumber: homecare24.id

Menurut Yanuarmi (2010) batik di Minangkabau awalnya digunakan sebagai pelengkap untuk *pakaian Panghulu* dan Bundo *Kanduang* yang hanya dipakai selama upacara adat dan peristiwa tertentu lainnya. Pada pakaian *Panghulu,* batik dihiasi pada bagian kepala yang disebut *saluak*. Sementara pada pakaian *Bundo Kanduang,* batik dihiasi dengan selendang atau *sisampiang.* Motif batik *Tanah*

Liek terinspirasi dari alam dan ornamen kuno yang terdapat pada ukiran kayu rumah gadang (Dahlia & Izzati, 2021).

a. Motif Itik Pulang Patang

    Motif ini termasuk motif fauna yang menyuguhkan suatu susunan bentuk harmonis dan selaras, yang diambil dari gerak irama bebek ketika berbaris pulang dari tempat mencari makan. Motif ini menggunakan media ukiran kayu dan kain songket. Motif *Itik Pulang Patang* juga memiliki fungsi sebagai ornamen bangunan tradisional Minangkabau, dan sebagai corak motif pada songket.

    Itik Pulang Patang mengandung makna suatu kelegaan setelah berhasil menyelesaikan suatu tugas yang berat. Filosofi yang terkandung dalam motif ini yakni, dalam hidup bermasyarakat

haruslah seiring dan sejalan, mematuhi aturan yang berlaku serta mengajarkan bahwa manusia dan alam selalu berdampingan dan saling membutuhkan satu sama lain (Afrianti dkk, 2023).
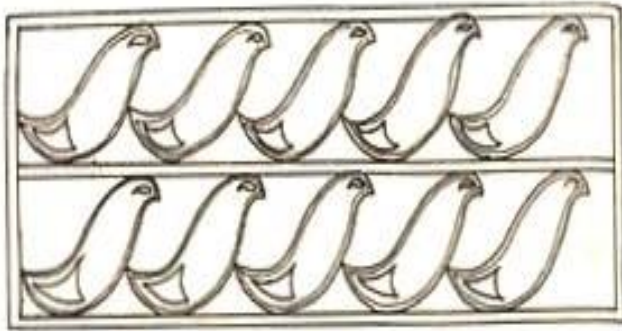
Gambar 12. Motif itik pulang patang

Sumber: *budaya-Indonesia.org*

b. Motif Markisa

Motif ini terinspirasi dari buah markisa yang dahulu banyak tumbuh di hutan Kabupaten Solok, terutama di daerah Alahan Panjang, Danau Kembar,

dan daerah sekitarnya. Kreasi motif ini diciptakan guna mempertahankan identitas Kabupaten Solok sebagai penghasil buah markisa terbaik di Sumatera Barat. Sampai saat ini, motif ini masih terus dilestarikan untuk mempertahankan dan memperkenalkan buah markisa sebagai ikon dan simbol kekayaan alam kabupaten Solok kepada khalayak luas melalui motif batik markisa (Dahlia & Izzati, 2021).

Gambar 13. Motif markisa
Sumber: Dahlia & Izzati 2021

C. Motif Batik Kalimantan Timur

Hampir setiap wilayah Indonesia memiliki batik khas yang dipengaruhi oleh ragam hias lokal. Ragam hias atau setiap motif yang tertuang pada kain batik memiliki makna dan kekhasan tersendiri. Munculnya batik Kalimantan bermula dari permintaan Putri Junjung Buih kepada Patih Lambung Mangkurat sebagai syarat untuk menikah, yaitu mewarnai kain tenun dan kain calap (Jannah, 2017).

Batik Kalimantan memiliki motif dengan bentuk yang tegas, dengan warna yang kuat yang menjadi ciri khas. Warna yang banyak digunakan pada kain batik Kalimantan adalah hijau, merah jambu, jingga, dan merah.

Batik Kalimantan memiliki keunikan bentuk dan filosofi antara sejarah, kehidupan alam, dan manusia. Adapun motif batik yang ada di

Kalimantan Timur diwarani dengan ragam hias Suku Dayak, flora dan fauna endemik, serta bentuk geometris yang menunjukkan potensi lokal Kalimantan. Batik Kalimantan Timur dikembangkan dengan keunikan dan keindahannya yang mengangkat potensi lokal menjadi ide penciptaan desain motif batik (Ratnadewi 2023).

a. Motif Tengkawang Ampiek

Motif ini berasal dari ukiran kayu yang disebut *Ampiek* (Bahasa Kutai) dan *Tengkawang,* yaitu sejenis meranti merah *(Dipterocarpaceae)*. Hal ini dikarenakan tumbuhan tersebut banyak digunakan oleh Suku Dayak sebagai bahan makanan, kosmetik, dan obat-obatan. Makna dan fungsi dari motif ini adalah sebagai lambang kesuburan dan kebaikan alam

semesta yang menjadi aspek penting bagi Suku Dayak (Ratnadewi, 2023).

Gambar 14. Motif tengkawang ampiek

Sumber: j*urnalkaltim.com*

b. Motif Burung Enggang

Motif ini terinspirasi dari Burung Enggang. Makna motif Burung Enggang adalah sebagai simbol tradisional yang diagungkan, berdasarkan makna yang dimaknai oleh manusia dan kelompoknya. Beberapa makna dalam

motif batik burung enggang antara lain memiliki nilai kesetiaan, berkah, kepemimpinan, kharismatik dan keindahan (Legi, 2018).

Gambar 15. Motif burung enggang

Sumber: *bdgconnex.net*

Kesimpulan

Batik di Indonesia memiliki sejarah panjang yang dipengaruhi oleh latar belakang negara ini sebagai negara kepulauan dengan banyak kerajaan sebelum menjadi negara kesatuan. Majapahit sebagai kerajaan yang kaya dan sukses selama berabad-abad, dikenal karena tradisi batiknya yang menyebar luas di nusantara dan terus berkembang hingga Kerajaan Mataram, Surakarta, dan Yogyakarta. Awalnya, batik hanya diperuntukkan bagi keluarga kerajaan dan pengikutnya. Seni batik menyebar melalui integrasi budaya dan akhirnya menjadi tradisi sehari-hari bagi wanita pada zaman dahulu.

Penyebaran batik dimulai di daerah-daerah seperti Mojokerto dan Tulungagung. Melalui berbagai periode sejarah, batik berkembang sebagai respons terhadap pengaruh yang berubah, seperti penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, dan

globalisasi yang mengadaptasi motif dan gaya, sambil tetap melestarikan esensi warisan Indonesia. Evolusi dan keragaman motif batik di Semarang, Minang, dan Kalimantan Timur mencerminkan budaya dan tradisi setempat, yang menampilkan hubungan rumit antara seni, sejarah, dan identitas dalam warisan batik Indonesia yang kaya.

Daftar Pustaka

Adisasmito, N. D. (2018). Historiografi Globalisasi Batik Masa Kolonial dan Tantangan Global Era Kontemporer. *Jurnal Budaya Nusantara*, *1*(2).

Afreliyanti, S. (2014). Mengungkap Sejarah Dan Motif Batik Semarang Serta Pengaruh Terhadap Masyarakat Kampung Batik Tahun 1970-1998. *Journal of Indonesian History*, *3*(2).

Afrianti, D., Sutajaya, I. M., & Suja, I. W. (2023). Makna dari Ukiran Bermotif'Itiak Pulang Patang'dalam Budaya Minangkabau. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *7*(3).

Asikin, S. (2008). *Ungkapan Batik di Semarang: Motif Batik Semarang*. Semarang: Citra Prima Nusantara.

Dahlia, P., & Izzati, F. I. (2021). Makna Simbolis Motif Batik Produk Rumah Batik Minang di Nagari Panyakalan Kabupaten Solok Sumatera Barat. *Deskovi: Art and Design Journal*, *4*(1).

De Carlo, I. (2020). *Batik Pedia-Kumpulan Istilah Penting dalam Dunia Batik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Doellah, H. S. (2002). *Batik: Pengaruh zaman dan lingkungan*. Solo: Danar Hadi.

Gugat, T. D., Permatasari, S., & Sugihartono, A. (2023). Branding UMKM Bismatik sebagai Project Based Learning. *SENADA: Semangat Nasional Dalam Mengabdi*, *3*(3).

Heringa, R., & Harmen C., V. (1997). *Batik from the North Coast of Java.* Los Angeles: Los Angeles Country Museum of Art.

Jannah, A. N. (2017). *Batik Dan Sasirangan Sebagai Ide Dasar Penciptaan Busana Pesta Wanita Remaja*. (Doctoral Dissertation, ISI Surakarta).

Kustiyah, I. E. (2017). Batik sebagai identitas kultural bangsa Indonesia di era globalisasi. *Gema*, *30*(52).

Legi, P. K. (2018). *Satwa Langka Kalimantan (Enggang dan Ruai) Dalam Karya Anyaman Manik Dan Sulam Tapis*. (Doctoral Dissertation, ISI Yogyakarta).

Rahmawati, A. (2023). *Eksistensi dan Karakteristik Batik Motif Warak Ngendog di Kampung Batik Semarang dalam Era Modern*. (Doctoral Dissertation, ISI Surakarta).

Ratnadewi, R. (2023). *Motif Batik Kalimantan Timur Bersama Turtle Graphics*. Yogyakarta: Zahir Publishing.

Rosalina, M., & Martineli, I. (2013). Pemaknaan Motif Batik Jogja dan Batik Solo. *Jurnal Komunikasi Universitas Tarumanagara*, *5*(1).

Simanjuntak, T. R., Yanuartha, R. A., Wijanarka, T., & Hergianasari, P. (2023). Analisis Sosiologi Terhadap Warisan Budaya Dan Identitas Lokal Batik Sangiran. *Jurnal Neo Societal*, *8*(4).

Siregar, A. P., Raya, A. B., Nugroho, A. D., Indana, F., Prasada, I. M. Y., Andiani, R., & Kinasih, A. T. (2020). Upaya pengembangan industri batik di Indonesia. *Dinamika Kerajinan Dan Batik*, *37*(1).

Suyani, S. (2013). Pengaruh Budaya Asing Terhadap Perkembangan Batik Pekalongan. *Corak: Jurnal Seni Kriya*, *2*(1).

Syifaa, A. (2023). *Keunikan Motif Batik Belanda yang Dikembangkan Perempuan Indo-Eropa.* The Phrase.

Trixie, A. A. (2020). Filosofi Motif Batik Sebagai Identitas Bangsa Indonesia. *Folio*, *1*(1).

Ulum, I. (2009). Batik dan Kontribusinya terhadap Perekonomian Nasional. *Bestari*, *42.*

Widadi, Z. (2019). Pemaknaan Batik Sebagai Warisan Budaya Tak Benda. *Pena: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, *33*(2).

Wihardi, D., Pratikto, R. G., & Kristanty, S. (2015). Pergeseran Makna Motif Batik Yogyakarta-

Surakarta. *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*, *5*(2).

Wulandari, A. (2022). *Batik Nusantara: Makna filosofis, cara pembuatan, dan industri batik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Yanuarmi, D., & Irawan, I. (2010). *Batik Tanah Like Painan Pesisir Selatan: Ide Kreatif Penciptaan Seni.* Puslit P2M. STSI Padang Panjang.

Yulianto, E., Prabawanto, S., Sabandar, J., & Wahyudin, W. (2019). Pola Matematis dan Sejarah Batik Sukapura: Sebuah Kajian Semiotika. *JP3M (Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pengajaran Matematika)*, *5*(1).

Profil Penulis

Fadela Nurul Aisyah lahir di Purwodadi, 22 Juni 2004. Seorang mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Lampung. Penulis memiliki motto hidup *"jadilah seperti rumput liar, walaupun dipotong tetap akan tumbuh kembali".* Penulis dapat dihubungi melalui e-mail fadelanurul66@gmail.com dan HP 0815-3225-7060.

Suci Saras Wati lahir di Bandarlampung, 03 Januari 2005. Seorang mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Lampung. Penulis memiliki motto hidup *"be yourself, chase your dreams, and just never say never".* Penulis dapat dihubungi melalui akun e-mail sucisaraswati605@gmail.com dan HP 0887-4776-7397.

M. Ilham Fadlillah lahir di Gading Rejo, 09 Januari 2005. Seorang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Lampung.

Penulis memiliki motto hidup *"jika kamu hidup dari apa yang kamu cintai, maka kamu akan mencintai hidup".* Penulis dapat dihubungi melalui e-mail ilhamfadlillah09@gmail.com dan HP 0895-3600-05238.

Indonesia dalam Pusaran Sejarah: Sebuah Kajian Historis Multidimensi

Editor:
Wahyu Agil Permana

Eksploitasi Kolonial dan Keterasingan Penduduk Lokal: Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit di Sumatera Timur Tahun 1915-1938

Muhammad Bimvanka Ridho Abdhillah,
Muhammad Izzul Islami Mahfud, Aldino Billy Paringga, Alfan Mawlana

Wilayah Sumatera Timur begitu baik untuk mendukung industri perkebunan. Pemerintah Hindia-Belanda tidak begitu saja meletakan Sumatera Timur sebagai wilayah yang menopang industri perkebunan mereka. Kondisi geografis di wilayah tersebut juga turut mendukung pembukaan lahan perkebunan secara masif, secara geografis Sumatera Timur berada di antara garis Khatulistiwa

dan garis Lintang Utara, kondisi iklim tropik di wilayah ini dipengaruhi oleh letak topografi dengan adanya daerah dataran tinggi, antara lain dataran tinggi Karo, pegunungan Simalungun, dan pegunungan Habinsaran. Bentang alam seperti ini membuat tanah di Sumatera Timur memiliki kualitas yang tidak bisa diragukan lagi, tidak bisa dipungkiri hal ini mendorong pengusaha Eropa untuk segera merintis *Onderneming* di Sumatera Timur pada Tahun 1863 (Itawan, 2020).

Sementara itu Sumatera Timur juga memiliki ciri iklim yang khas, yakni terjadi fenomena angin yang bertiup sangat kencang antara bulan Juli-September. Kondisi wilayah Sumatera Timur sebelumnya dipenuhi oleh berbagai jenis hutan, meliputi hutan pasang surut, hutan rawa-rawa, hingga hutan hujan tropis. Pada mulanya masyarakat lokal Sumatera Timur sangat bergantung terhadap hutan-hutan tersebut sebagai pemenuhan

kebutuhan hidup mereka, biasanya hutan-hutan yang dipenuhi semak belukar dimanfaatkan oleh masyarakat lokal Sumatera Timur sebagai lahan pertanian, dengan cara membakar semak belukar tersebut pada musim kemarau dan mulai ditanami padi pada musim hujan. Biasanya pada tahun kedua atau ketiga pasca panen, lahan-lahan tersebut ditanami umbi-umbian, sayur-sayuran bahkan pohon pisang (Reid, 2014).

Penetapan undang-undang agraria 1870 atau lebih dikenal dengan ekonomi liberal oleh pemerintah Kolonial, perlahan mengubah kondisi lanskap Sumatera Timur yang tadinya terdiri dari hutan hujan tropis, hutan rawa, hingga hutan pasang surut, menjadi perkebunan. Nienhuys sebagai orang pertama yang merintis perkebunan tembakau di Deli. Perjalanannya bersama Sultan Deli pada Agustus 1862-Maret 1863 membuat Nienhuys

meminta izin terhadap majikannya untuk mendirikan perkebunan di Wilayah ini (Itawan, 2020).

Beriringan dengan peristiwa tersebut, perusahaan asal Perancis dan Swiss di Singapura memberikan kredit kepada Nienhuys. Hal ini tentu sangat berdampak bagi perkembangan perkebunan tembakaunya, terlebih lagi perusahaan tersebut membeli tembakau Nienhuys dengan harga 25 gulden per pikul. Keberhasilan perkebunan tembakau di Deli dan Serdang membawa gairah perusahaan lainya untuk membuka perkebunan di Sumatera Timur. Perusahaan seperti *Deli Maatschappij*, *Senembah Maatschappij*, hingga *Amsterdam Maatschappij* mulai mengekspansi hampir seluruh hutan-hutan di Sumatera Timur (Ikhsan, 2021).

Pengusaha *onderneming* Sumatera Timur tidak hanya memusatkan satu komoditas saja, selain tembakau masih banyak lagi komoditas yang

menghasilkan keuntungan besar bagi pemerintah kolonial tanaman seperti tebu, kopi, teh dan tidak terkecuali kelapa sawit, berhasil membawa Sumatra Timur dari wilayah yang diabaikan oleh pemerintah kolonial Belanda menjadi salah satu pusat ekonomi paling penting di luar Jawa pada akhir Abad ke-19.

Kepentingan pemerintah kolonial mengenai pertumbuhan industri perkebunan memunculkan aturan-aturan yang terkait dengan tata kelola perkebunan di Hindia Belanda, salah satunya adalah kontrak kerja buruh perkebunan. Buruh-buruh perkebunan tersebut merupakan orang Melayu dan Batak karo yang tidak memiliki lahan untuk melakukan aktivitas pertanian, di luar dari orang Melayu dan Batak karo pengusaha perkebunan juga kerap kali mendatangkan buruh-buruh dari Jawa bahkan orang China (Itawan, 2023).

Terlepas dari kemajuan Industri perkebunan, kehidupan buruh perkebunan yang berbanding terbalik dengan tuan kebun, pertentangan kerap terjadi bahkan buruh tersebut tidak jarang diperlakukan buruk oleh tuan kebun.

Latar Belakang Ekspansi Perkebunan Sawit di Sumatera Timur

Kedatangan pemerintah Kolonial Hindia Belanda tidak terlepas dari kebutuhan industrialisasi perkebunan pada abad ke-19. Tanaman kelapa sawit merupakan salah satu komoditi yang menjadi fokus pemerintah kolonial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kelapa sawit awalnya didatangkan dari Kebun Raya Amsterdam dan Bourbon di kepulauan Mauritius pada 1848, dengan total empat bibit tanaman kelapa sawit, kemudian di tempatkan di Kebun Raya Buitenzorg (Treub, 1982).

Pegawai sekaligus kurator di Kebun Raya Buitenzorg yakni Johannes Elias Teysmann, memiliki peran penting bagi masifnya budidaya kelapa sawit. Teysmann memperkirakan tanaman ini suatu saat memiliki daya ekonomi tinggi. Pada 1850, dia memberitakan tentang koleksi baru tanaman palem Kebun Raya Buitenzorg. Palem ini merupakan komoditas penghasil minyak utama di Guinea. Tahun-tahun setelahnya, Teysmann melakukan eksperimen terhadap komoditas kelapa sawit dengan menanamnya secara luas, meskipun Teysmann belum mengetahui secara pasti hasil minyak dari kelapa sawit akan lebih banyak dari minyak pohon kelapa (Adam, 2020).

Pemerintah Hindia-Belanda mulai memunculkan minatnya untuk memproduksi minyak kelapa sawit pada 1857, setelah mereka mengetahui hasil komoditi ini mulai digandrungi di Eropa sebagai bahan baku sabun dan lilin, dan pada tahun

yang sama ahli kimia asal Belanda J.E. de Vrij mengirimkan surat penelitian kepada menteri kolonial P. Mijer untuk melakukan penelitian tentang komoditas ini. J.E. de Vrij mulai datang ke Hindia-Belanda 1858 dan melakukan penelitiannya bersama Teysmann hingga 1860 di berbagai tempat seperti Banyumas dan Palembang.

Selama tiga tahun J.E. de Vrij di Hindia-Belanda membawa hasil baik bagi pemerintah Kolonial, kelapa sawit dapat dibudidayakan secara baik di Jawa maupun Sumatera, meski pengusaha perkebunan di Jawa tidak tertarik membudidayakan komoditas ini karena mereka mengira perkebunan kelapa sawit tidak merogoh untung sebesar minyak kelapa. Percobaan budidaya kelapa sawit tidak menemui titik keberhasilan hingga 1870. Karena memiliki batang pohon yang unik, sepanjang 1870 pemerintah kolonial meletakan kelapa sawit sebagai

pelengkap estetika di sepanjang jalan kota-kota kolonial (Hunger, 1924).

Seiring Teysmann mengampanyekan kelapa sawit karena daya ekonominya, pada 1871 dia mengalihkan penanaman kelapa sawit dari Jawa ke Sumatera. Pada Tahun yang sama pula dia membawa bibit ini ke Bangka dan Belitung. Hebatnya lagi Teysmann mendorong penguasa lokal untuk mendistribusikan bibit sawit kepada seluruh penduduknya (Adam, 2020).

Lebih jauh lagi awal percobaan penanaman kelapa sawit juga dilakukan di daerah Riau dan Deli pada 1875. Sama kasusnya dengan di Jawa, kelapa sawit di sini belum mendapatkan tempat oleh para pengusaha *Onderneming* Sumatera, mereka lebih memusatkan terhadap tanaman-tanaman keras lain seperti tebu, kopi, teh dan karet, pasca merosotnya harga tembakau karena kualitas daunnya semakin memburuk dan sering mengalami gagal panen pada

1890. Sepanjang abad 19, kelapa sawit masih difungsikan seperti halnya di Jawa, yakni sebagai pelengkap keindahan di sekitar jalan perkebunan.

Kelapa sawit mulai dikomersialkan pertama kali dalam skala setelah 1910. Meningkatnya permintaan pasar terhadap komoditas ini sebagai bahan baku sabun dan minyak goreng, mendorong pengusaha *Onderneming* membudidayakan perkebunan ini di Sumatera Timur. Sebelumnya pemenuhan kebutuhan minyak kelapa sawit ditopang oleh industri perkebunan sawit di Afrika selatan.

Pada 1911, kelapa sawit pertama kali dikomersialkan dalam skala besar di tanah Sumatera Timur oleh pengusaha asal Belgia Adrien Hallet, membuka 6.500 hektar hutan Asahan pantai Timur Sumatera, di tahun yang sama pengusaha asal Jerman, K. Schadt, menanam 2000 kelapa sawit di Tanah Itam Ulu (Pelzer, 1985). Pengusaha *Onderneming* kelapa sawit meletakkan tanah liparit

bekas perkebunan tembakau sebagai penopang daya produksi tanaman ini. Perkebunan ini menjadi semakin masif pada tahun-tahun setelahnya, karena permintaan minyak kelapa sawit meningkat di pasaran Eropa.

Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 1915-1938

Keberhasilan dari pengusaha asal Belgia dan Jerman yakni Adrien Hallet dan K. Schadt mulai menjadi sorotan pengusaha Onderneming dan pemerintah kolonial. Mereka mulai gencar melakukan ekspansi secara masif pada kurun waktu abad ke-20. Atas keberhasilan ini, membuat pemerintah Hindia-Belanda mulai fokus melakukan pengembangan komoditas kelapa sawit di Sumatera Timur.

Total lahan seluas 60% diubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Persentase yang sangat besar menjadi bukti terhadap masifnya perkembangan perkebunan di Sumatera Timur. Hal ini berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal, alih fungsi lahan merupakan langkah besar dari pemerintah kolonial Hindia-Belanda guna mendapatkan keuntungan yang banyak dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi (Rutgers & Blommendaal, 1922).

Pada perkembangannya, banyak sekali hutan-hutan yang di tebang dan dialih fungsikan menjadi perkebunan sawit. Dapat dikatakan bahwa deforestasi hutan-hutan Sumatera Timur seperti hutan hujan tropis menjadi warisan fundamental dari ekspansi kolonial di wilayah ini.

Namun demikian, hal ini tidak dimaknai secara negatif oleh perusahaan perkebunan maupun pemerintah kolonial. Bagi tuan kebun, menebang

hutan lalu diganti menjadi perkebunan adalah sebuah pencapaian luar biasa, karena menjadi titik awal untuk mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat melalui komoditi yang ditanam pada lahan yang telah dibabat habis (Itawan, 2020).

Perusahaan seperti Deli *Maatschappij* dan Senembah *Maatschappij* merupakan penguasa sektor perkebunan di Sumatera Timur. Meski kedua perusahaan tersebut berbeda dalam mode produksinya, keduanya berperan penting bagi industrialisasi perkebunan, terutama kelapa sawit. Deli *Maatschappij* yang merupakan perusahaan milik Nienhuys, seorang pengusaha asal Belanda yang meletakkan karet, tebu nila, dan kelapa sawit sebagai komoditas utama pasca kemunduran komoditas tembakau.

Hal ini ditandai dengan dibukanya konsesi lahan perkebunan kelapa sawit seluas 3.294 hektar pada 1915 di Sumatera Timur (N.*V. Deli*

Maatschappij Hoe Zij Ontstond En Groeide, 1931). Deli *Maatschappij* menghimpun 31 perusahaan lain pada 1931, pada tahun tersebut tercatat 31 perusahaan ini antara lain gabungan dari 26 perusahaan tembakau, 4 perusahaan karet, dan 1 perusahaan kelapa sawit (Supriyadi, 2023).

Tahun	Teh	Kelapa Sawit
1915	3,237	3,294
1920	10,009	8,462
1925	12,835	29,402
1930	21,273	61,229
1935	-	74,919
1938	21,588	92,307
1945	-	73,621

Tabel 3. Indeks teh dan kelapa sawit di Sumatera Timur dan Aceh Tahun 1915-1945

Sumber: De Indische Archipel, hal. 593

Tentunya dengan skala yang sedemikian besar, Deli *Maatschappij* mendapati kendala dalam perekrutan tenaga kerja, karena kuli Melayu dan Batak karo tidak cukup untuk menunjang produksi

kelapa sawit. Maka dari itu, pengusaha Onderneming mendatangkan tenaga kerja dari luar Sumatera Timur. Seiring berjalannya waktu, kuli Jawa dan China didatangkan oleh tuan kebun demi memenuhi kebutuhan produksi perkebunan kelapa sawit.

Jumlah kuli Jawa terus meningkat, baik karena perjanjian secara kontrak maupun datang mencari lapangan pekerjaan sendiri. Terhitung total jumlah kuli Jawa dan China sepanjang 1913-1930 mencapai 118.517-234.554 jiwa kuli Jawa, sedangkan untuk kuli China sebanyak 53.617-26.037 jiwa. Tidak bisa dipungkiri juga konfrontasi antara buruh perkebunan dengan tuan kebun kerap terjadi. Pendisiplinan yang dilakukan oleh tuan kebun menimbulkan pengekangan terhadap kuli perkebunan, bahkan para kuli tersebut tidak jarang mendapatkan perlakuan buruk dari tuan kebun (Ramayanti, 2018).

Tahun	Jumlah Kuli Cina	Jumlah Kuli Jawa
1883	21.136	1.711
1893	41.700	18.000
1898	50.846	22.256
1906	53.105	33.802
1913	53.617	118.517
1920	27.715	209.459
1930	26.037	234.554

Tabel 4. Jumlah Kuli Cina dan Jawa di Sumatera Timur Tahun 1883-1930

Sumber: Plantation Agricultural and Export Growth an Economic Histoty of East Sumatra, 1863-1942

Penurunan jumlah kuli Cina yang terjadi pada 1920 tidak luput dari dugaan terhadap buruknya kualitas kondisi kerja yang ada di Sumatera Timur. Selain itu, meningkatnya kebutuhan akan tenaga kerja, menjadi faktor utama dalam bertambahnya jumlah kuli Jawa yang lebih mudah didatangkan daripada dari Cina (Itawan, 2020). Meningkatnya kebutuhan akan tenaga kerja tidak terhindarkan, melihat jumlah konsesi lahan perkebunan Deli

Maatschappij yang terus meningkat seiring waktu. Pada 1939, jumlah konsesi lahan perkebunan kelapa sawit di Sumatera Timur mencapai 489 konsesi dengan total luas areal yaitu 1.064.066,25 hektar (Sakina, 2012).

Dampak Ekspansi Perkebunan Sawit terhadap Masyarakat Lokal

Ekspansi besar-besaran yang telah dilakukan oleh pemerintah Kolonial di wilayah Sumatera Timur mempengaruhi berbagai kondisi kehidupan masyarakat lokal, baik dari segi ekonomi, politik, kebudayaan bahkan lingkungan. Perubahan tersebut dipicu oleh berkembangnya perkebunan kelapa sawit secara masif.

Di sisi lain, masifnya ekspansi perkebunan tersebut juga menyebabkan peningkatan pada kondisi demografi di wilayah ini. Hal ini dikarenakan kebutuhan akan tenaga kerja perkebunan kelapa

sawit meningkat sepanjang 1924. Oleh karena itu pengusaha onderneming mendatangkan tenaga kerja dari luar Sumatera (Supriyadi, 2023).

Pemerintah kolonial menarasikan perkembangan perkebunan di Sumatera Timur dengan pernyataan kemakmuran dan kejayaan, fotografi merupakan upaya propaganda yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda, pada dasarnya fotografi adalah penanda memori yang tidak terlepas dari unsur budaya, sosial, ekonomi, politik.

Dalam konteks ekspansi kolonial di Sumatera Timur, narasi visual dalam berbagai objek fotografi perkebunan membawa kepentingan propaganda ekspansi kolonial tentang kolonialisme dan kemakmuran (Itawan, 2023). Hal ini sekaligus senjata bagi tuan kebun untuk menarasikan keberhasilan perkebunan kelapa sawit di Sumatera Timur. Terjadinya disrupsi dari berbagai aspek mulai dari,

perubahan lingkungan hidup, bentang alam, hingga aspek sosial. Hal ini berimplikasi terhadap kondisi kehidupan masyarakat lokal. Dalam banyaknya dokumentasi visual yang didapat, tergambar pola kolonial bahwa perilaku dari kolonial dipoles sedemikian rupa agar mendapat kesan perlakuan baik, tanpa mempertimbangkan kehidupan sosial dan lingkungan hidup masyarakat Sumatera Timur.

Gambar 16. Hukum gantung buruh perkebunan

Sumber: *Breman, Menjinakkan Sang Kuli 2024*

Perlakuan buruk pada kuli merupakan strategi kolonial untuk meningkatkan jumlah komoditas. Proses tersebut berimplikasi terhadap para buruh yang bekerja di bawah rumpun industri perkebunan kelapa sawit. Sikap buruk dari tuan kebun dapat dilihat dari pola perekrutan buruh perkebunan hingga pengupahan. Para pengusaha Onderneming menggunakan cara yang licik untuk menjebak masyarakat Sumatera Timur, bahkan luar Sumatera untuk bekerja di bawah kendali perkebunan kolonial.

Tuan kebun menjebak kuli tersebut dengan cara menampilkan pementasan wayang, lalu ditodong dan digiring ke sebuah kapal dari pelabuhan *Straits Settlements,* lalu mereka dibawa ke Deli untuk dijadikan kuli. Buruknya dalam melakukan kerja-kerjanya, tuan kebun memforsir tenaga kerja mereka hingga menyebabkan penurunan daya produktivitas usia (Breman, 2024).

Dalam struktur perkebunan kolonial terkhusus perkebunan kelapa sawit di Sumatera Timur memiliki ciri superioritas antara orang kulit putih dengan buruh perkebunan. Undang-undang tentang Kontrak Kerja No. 421 tahun 1915 hanya menguntungkan bagi industrialisasi perkebunan kolonial. Posisi patron-klien memunculkan dehumanisasi kepada buruh perkebunan yang mayoritas merupakan orang pribumi.

Stereotip pemalas bahkan umpatan-umpatan muncul dari mulut tuan kebun yang mengatakan perilaku kuli perkebunan tersebut seperti binatang. Bukan menjadi rahasia lagi, tindakan kekerasan fisik juga kerap dilakukan oleh tuan kebun kepada buruh perkebunan, tindakan hukuman yang diberlakukan seperti hukuman gantung, cambuk hingga besi panas turut dilayangkan di beberapa bagian tubuh buruh perkebunan yang dirasa mengganggu

keamanan dan kinerjanya kurang maksimal (Ramayanti, 2018).

Salah satu kasus kekerasan yang dilakukan oleh tuan kebun terhadap kuli perkebunan, seperti yang diungkapkan oleh Van Kol di Parlemen Hindia-Belanda, bahwa salah satu contoh perlakuan tidak manusiawi itu terjadi oleh salah satu kuli yang disentuh dengan sepotong besi panas oleh seorang dokter, dengan alasan percobaan fisiologi. Buruh tersebut dituduh mengganggu ketenteraman kerja, sehingga cara tersebut ditujukan supaya buruh tersebut mau untuk mengakuinya.

Tidak berhenti di sini, wujud tindakan kekerasan dan tidak manusiawi terjadi kepada mayat kuli kontrak yang meninggal di rumah sakit, dibuang begitu saja di padang alang-alang (Breman, 2024). Dari berbagai kondisi tersebut, tidak bisa dielakkan lagi nasib buruk pribumi khususnya masyarakat lokal Sumatera Timur merupakan kondisi yang tidak

disorot oleh pemerintah Hindia-Belanda. Mereka tidak lagi merasakan limpahan hasil alamnya karena ulah industri perkebunan, tidak terkecuali kelapa sawit.

Kesimpulan

Mulai masifnya ekspansi perkebunan di Sumatera Timur tak lepas dari dampak penjajahan pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Berkembangnya perkebunan kelapa sawit menjadi bukti yang terekam secara jelas dan pasti mengenai pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada masa kolonial. Dibalik pertumbuhan ekonomi yang baik, masyarakat lokal harus menghadapi realitas yang berat, lahan-lahan yang dijadikan untuk industrialisasi perkebunan kelapa sawit membuat masyarakat Sumatera Timur harus kehilangan ruang hidupnya, hutan-hutan yang menopang kehidupan mereka, diubah menjadi perkebunan.

Dengan kondisi tersebut, akhirnya masyarakat lokal mulai beralih profesi menjadi buruh. Situasi semakin memburuk setelah pengesahan UU Agraria 1870, karena masyarakat lokal semakin tersudut dan

ketidakadilan terhadap masyarakat lokal juga membuat kondisi semakin parah.

Keterasingan yang dirasakan oleh masyarakat Sumatera Timur terpampang jelas ketika perubahan konsepsi lahan pertanian berganti menjadi industri perkebunan, kehidupan yang adil dan sejahtera hanyalah janji politik yang dilontarkan pemerintah kolonial melalui UU Agraria 1870. Pada kenyataannya, masyarakat lokal harus mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari petinggi pemerintahan. Mereka terasingkan melalui kondisi kepemilikan tanah, lalu merambat sampai ke kondisi sosial, budaya, hingga ekonomi.

Penindasan dan diskriminasi tidak hanya dialami oleh buruh lokal, melainkan buruh-buruh yang didatangkan dari Jawa juga turut merasakan hal tersebut. Banyak buruh perkebunan yang didatangkan dari luar pulau Sumatera melalui cara yang kotor, seperti dijebak lalu di bawa ke Sumatera

Timur. Tindakan yang melanggar nilai kemanusiaan dilakukan demi meraup keuntungan yang besar bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit pada masa Kolonial Hindia-Belanda. Penindasan dan ketidakadilan adalah gambaran kehidupan buruh pada masa industrialisasi perkebunan kelapa sawit di Sumatera Timur. Kapitalisme kolonial telah membelenggu kebebasan hidup masyarakat lokal dan buruh-buruh yang didatangkan dari luar Sumatera.

Daftar Pustaka

Adam, L. (2020). *Cultivating Power: Buitenzorg Botanic Garden and Empire-Building in the Netherlands East Indies, 1745-1917*. (Doctoral dissertation, Northwestern University).

Breman, J. (2024). *Menjinakkan Sang Kuli: Politik Kolonial pada Awal Abad Ke-20.* Jakarta: Pustaka Utama Graffiti.

Hunger, F. W. T. (1924). *De oliepalm (Elaeis guineensis): historisch onderzoek over den oliepalm in Nederlandsch-Indië*. Brill Archive.

Ikhsan, E. (2021). *Konflik Tanah Ulayat dan Pluralisme Hukum*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Itawan, D. (2020). Dari Hutan Purba Menjadi Perkebunan: Fotografi, Propaganda Kemakmuran, dan Perubahan Lanskap di Sumatera Timur, 1860an-1930an. *Jurnal Sejarah*, *3*(2), 28-48.

Itawan, D. (2020). *Eksploitasi Kolonial dan Perubahan Lingkungan di Sumatera Timur, 1860an-1930an*. (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

Itawan, D. (2023). Ekspansi Perkebunan dan Pertumbuhan Penduduk di Sumatra Timur, 1863-1942. *Handep: Jurnal Sejarah dan Budaya*, *6*(2).

N.V. Deli Maatschappij Hoe Zij Ontstond En Groeide, 1931. Arsip Perusahaan No VI, KITLV Leiden.

Pelzer, K. J. (1985). *Toean keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatra Timur 1863-1947.*

Ramayanti, A. (2018). Kehidupan Kuli Perempuan di Perkebunan Tembakau Deli Sumatera Timur Tahun 1870-1930. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, *6*(2).

Reid, A. (2014). *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680 Jilid 1: Tanah di Bawah Angin*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Rutgers, A. A. L., & Blommendaal, H. N. (1922). *Investigations on Oilpalms Made at the General Experiment Station of the AVROS*. Ruygrok.

Sakina, N. (2012). *Kehidupan Kuli Kontrak Orang Cina di Perkebunan Sumatera Timur, 1870-1930.* Skripsi: Universitas Indonesia.

Supriyadi, P. H. D. (2023). Dampak Sosial-Ekonomi Perkembangan Industri Perkebunan di Sumatera Timur pada Tahun 1863-1930. *Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah*, *14*(1).

Treub, M. (1892). *S'Lands Plantentuin the Buitenzorg: 18 Mei 1817-18 Mei 1892.* Landsdrukkerij.

Profil Penulis

Muhammad Bimvanka Ridho Abdhillah lahir di Lamongan, 07 Mei 2005. Seorang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Jember. Penulis memiliki motto hidup *"sejarah dunia adalah sejarah pertentangan kelas".* Penulis dapat dihubungi melalui e-mail bimvanka@gmail.com dan HP 0858-5321-3626.

Muhammad Izzul Islami Mahfud lahir di Banyuwangi, 07 Desember 2004. Seorang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Jember. Penulis memiliki motto hidup *"muda berkelana, tua bersahaja".* Penulis dapat dihubungi melalui email izulmahfud8@gmail.com dan No. HP 082141360532.

Aldino Billy Paringga lahir di Banyuwangi, 30 Agustus 2004. Seorang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Jember. Penulis memiliki motto hidup *"hidup yang tidak*

dipertaruhkan, tidak akan pernah dimenangkan—Sutan Sjahrir". Penulis dapat dihubungi melalui e-mail billyparingga7@gmail.com dan HP 0852-3104-2382.

Alfan Mawlana lahir di Jember, 24 Mei 2004. Seorang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Jember. Penulis memiliki motto hidup *"the only thing we learn from history is that we learn nothing from history—G.W.F Hegel".* Penulis dapat dihubungi melalui e-mail alfanmawlana@gmail.com dan HP 0896-6813-4795.

Mewarisi Ketidakadilan: Bagaimana Kebijakan Ekonomi Kolonial Mengukir Struktur Sosial dan Ekonomi di Indonesia

Pitri Hendriyani, Wahyuni Putri, Yulita Angela Kusuma

Sejarah Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pengalaman panjang masa kolonialisme, terutama di bawah pemerintahan Belanda yang berlangsung selama lebih dari tiga abad. Kebijakan ekonomi kolonial yang diterapkan oleh Belanda tidak hanya memberikan dampak pada aspek politik dan ekonomi, tetapi juga mengubah struktur sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia secara mendalam. Pengaruh kolonialisme ini tidak hanya meninggalkan jejak sementara, tetapi membentuk tatanan

masyarakat yang berkelanjutan hingga memasuki era kemerdekaan dan bahkan memengaruhi kondisi sosial ekonomi saat ini (Sachari, 2007).

Kolonialisme Belanda memperkenalkan berbagai kebijakan ekonomi yang berfokus pada eksploitasi sumber daya alam, termasuk sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*) yang mewajibkan petani untuk menanam komoditas tertentu untuk diekspor. Kebijakan ini mengakibatkan pergeseran signifikan dalam pola produksi dan struktur tenaga kerja, di mana masyarakat lokal dieksploitasi demi kepentingan penjajah (Aditya dkk, 2024).

Dampak dari sistem ini adalah ketidakadilan sosial dan ekonomi yang semakin parah, di mana penduduk pribumi mengalami marginalisasi dan eksploitasi dalam sistem yang dibentuk oleh Belanda. Eksploitasi sumber daya manusia dan alam yang berlangsung secara terstruktur ini telah memperdalam jurang antara kelompok-kelompok

sosial, yang akhirnya membentuk ketidakadilan sosial yang diwariskan (Kartodirdjo, 1992)

Pada abad ke-16, sejak kedatangan bangsa Eropa khususnya Belanda, Indonesia mengalami transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Penjajahan membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan, struktur ekonomi, dan hierarki sosial. Kolonialisme tidak hanya memperkenalkan sistem ekonomi yang berorientasi pada ekspor, tetapi juga menciptakan struktur sosial baru yang memperdalam kesenjangan antara penduduk pribumi dan pendatang Eropa. Dampak dari kolonialisme ini mencakup penanaman konsep ekonomi yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya dengan mengesampingkan kesejahteraan rakyat setempat (Booth, 2007).

Saat ini, banyak aspek ketidakadilan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat Indonesia, dapat ditelusuri kembali hingga kebijakan-kebijakan

kolonial tersebut. Dengan mempelajari bagaimana kebijakan ekonomi kolonial membentuk struktur sosial dan ekonomi Indonesia, kita dapat memahami akar ketimpangan dan mencari cara untuk mengatasi warisan ketidakadilan yang masih terasa.

Pemahaman tentang warisan kolonial menjadi penting dalam konteks pembangunan dan kebijakan sosial ekonomi. Ketidakadilan struktural yang ada saat ini, seperti kesenjangan sosial dan ekonomi, ketimpangan akses terhadap sumber daya, dan masih adanya kemiskinan struktural, dapat dikaitkan dengan pengaruh kebijakan ekonomi kolonial yang telah membentuk landasan dari ketidakmerataan sosial ekonomi di Indonesia (Aditya dkk, 2024).

Kebijakan Tanam Paksa dan Dampaknya terhadap Masyarakat Lokal

Pada abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda menerapkan sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*), yang memaksa petani pribumi untuk menanam tanaman ekspor seperti kopi, gula, dan nila di tanah mereka. Sistem ini dirancang untuk mengoptimalkan keuntungan kolonial dengan menempatkan kontrol penuh atas hasil komoditas, sementara petani pribumi hanya menerima upah rendah dan terbatasnya hak untuk mengolah tanahnya secara mandiri.

Cultuurstelsel berdampak terhadap penurunan ketahanan ekonomi masyarakat lokal, memaksa mereka bergantung pada produksi ekspor daripada produksi subsisten yang sebelumnya mengutamakan kebutuhan lokal (Suryahani dkk, 2024).

Akibat kerugian ekonomi langsung, sistem tanam paksa juga menyebabkan perubahan sosial mendalam. Budaya gotong royong dan kemandirian desa-desa yang sebelumnya mandiri mulai tergerus. Banyak keluarga petani menghadapi kemiskinan yang berlarut-larut, karena tingginya beban pajak yang diterapkan kolonial untuk menutup biaya administrasi sistem ini. Akibatnya, kesenjangan antara elite kolonial yang hidup makmur dan masyarakat pribumi yang tertindas menjadi semakin dalam (Muttaqin, 2015).

Struktur Sosial dan Dampaknya terhadap Mobilitas Sosial

Belanda memperkenalkan sistem hierarki sosial yang membedakan lapisan masyarakat berdasarkan ras dan status ekonomi. Orang Eropa berada di puncak struktur ini, diikuti oleh elite pribumi yang bekerja untuk pemerintahan kolonial, sementara

masyarakat pribumi kebanyakan tetap berada di lapisan bawah sebagai pekerja pertanian atau buruh kasar. Struktur ini tidak hanya menguntungkan kolonial tetapi juga membentuk ketergantungan elit pribumi terhadap kebijakan kolonial, yang memperkuat kontrol kolonial dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan dan administrasi (Suryahani dkk, 2024).

Setelah masa kolonial, struktur hierarki ini telah melekat pada tatanan sosial Indonesia. Mobilitas sosial masih terbatas karena akses ke pendidikan dan sumber daya ekonomi tetap sulit bagi mayoritas masyarakat miskin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan dalam akses pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik masih tampak pada era modern, yang mengakibatkan terbentuknya kelas elite ekonomi dan pendidikan yang didominasi kelompok tertentu saja (Robison, 2009).

Ketergantungan Komoditas Ekspor dan Kerentanan Ekonomi

Sejak masa kolonial, Indonesia telah diarahkan sebagai penghasil komoditas ekspor yang dibutuhkan pasar Eropa. Pola ketergantungan ini berlanjut hingga kini, dengan ekspor komoditas primer seperti minyak sawit, karet, dan batu bara sebagai sumber utama pendapatan negara.

Sekitar 40% dari pendapatan ekspor Indonesia berasal dari sektor komoditas ini, menjadikannya rentan terhadap fluktuasi harga pasar global. Ketika harga komoditas seperti batu bara menurun di pasar internasional, Indonesia mengalami penurunan signifikan pada pendapatan negara yang memengaruhi kestabilan ekonomi secara keseluruhan (Sadiah & Ginting, 2024).

Ketergantungan ini juga menghambat diversifikasi ekonomi Indonesia. Dengan minimnya perkembangan sektor industri manufaktur, ekonomi

Indonesia belum mampu beralih ke sektor yang bernilai tambah tinggi. Dampak dari ketergantungan ini adalah meningkatnya angka pengangguran dan ketidakstabilan ekonomi, terutama di wilayah-wilayah yang mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan (Van Niel, 2023).

Konflik Agraria

Salah satu warisan paling nyata dari kolonialisme adalah ketidakmerataan distribusi lahan. Pada masa kolonial, lahan-lahan luas yang subur di Indonesia, diberikan kepada perusahaan-perusahaan Eropa untuk perkebunan, sementara masyarakat pribumi diisolasi ke lahan yang lebih kecil dan kurang subur (Putro, 2022). Saat ini, pola kepemilikan lahan yang timpang tersebut tetap bertahan, di mana perusahaan besar, termasuk perusahaan multinasional, masih menguasai sebagian besar lahan perkebunan di Indonesia.

Akibatnya, konflik agraria sering terjadi, terutama di daerah pedesaan dan hutan yang memiliki potensi ekonomi tinggi. Masyarakat adat dan petani kecil sering kali berjuang mempertahankan lahan mereka dari ekspansi perkebunan atau tambang. Konflik ini tidak hanya mengakibatkan kerugian ekonomi bagi masyarakat lokal tetapi juga seringkali melibatkan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (Booth, 2007).

Kesimpulan

Kebijakan ekonomi kolonial Belanda, terutama sistem tanam paksa, membawa dampak jangka panjang yang memengaruhi struktur sosial dan ekonomi di Indonesia. Sistem ekonomi kolonial menciptakan ketergantungan pada komoditas ekspor, menguntungkan kolonial tetapi merugikan masyarakat lokal.

Ketidakadilan sosial dan ekonomi yang diwariskan dari masa kolonial masih tampak dalam bentuk kesenjangan akses pendidikan, kesehatan, dan distribusi kekayaan di Indonesia. Struktur ketergantungan pada komoditas ekspor terus berlangsung hingga kini, menghambat perkembangan sektor industri dan meningkatkan kerentanan ekonomi.

Daftar Pustaka

Aditya, F., Pratama, R. S., Siagian, S. Z., Daely, V. G., & Yunita, S. (2024). Pengaruh Kolonialisme terhadap Struktur Sosial dan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *8*(2).

Booth, A. E. (2007). *Colonial legacies: Economic and social development in East and Southeast Asia*. University of Hawai'i Press.

Kartodirdjo, S. (1992). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru.* Jakarta: Gramedia.

Muttaqin, F. (2015). *Sejarah Pergerakan Nasional*. Bandung: Penerbit Humaniora.

Putro, F. W. (2022). Perkembangan Pabrik Gula Ketanen Tahun 1840-1930. *Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah*, *12*(3).

Robison, R. (2009). *Indonesia: The rise of capital*. Equinox Publishing.

Sachari, A. (2007). *Budaya Visual Indonesia: Membaca Makna Perkembangan Gaya Visual*

Karya Desain di Indonesia Abad Ke-20. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Sadiah, F. U., & Ginting, A. L. (2024). Pengaruh Perdagangan Internasional Ekspor Migas dan Non Migas terhadap Perdagangan di Indonesia. *Economie: Jurnal Ilmu Ekonomi*, *6*(1).

Suryahani, I., Nurhayati, N., & Gunawan, E. R. S. (2024). *Buku Referensi Dinamika Global Perekonomian Indonesia*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.

Van Niel, R. (2023). *The Emergence of the Modern Indonesian Elite*. Brill.

Profil Penulis

Pitri Hendriyani lahir di Nanga Silat, 28 Februari 2004. Seorang mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan di Universitas PGRI Pontianak. Penulis memiliki motto hidup *"santai dalam langkah, namun serius dalam tujuan".* Penulis dapat dihubungi melalui e-mail fitriandriani2112@gmail.com dan HP 0857-8767-8152.

Wahyuni Putri lahir di Bukit Lipis, 27 Juni 2002. Seorang mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan di Universitas PGRI Pontianak. Penulis memiliki motto hidup *"tidak ada hal yang sia-sia dalam belajar, karena ilmu akan bermanfaat pada waktunya".* Penulis dapat dihubungi melalui e-mail wxyuneei@gmail.com dan No. HP 0821-5445-9672.

Yulita Angela Kusuma lahir di Sintang, 23 Juni 2004. Seorang mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan di Universitas PGRI Pontianak. Penulis memiliki motto hidup *"bukan sekadar menang,*

tetapi proses belajar dan berkarya yang berharga". Penulis dapat dihubungi melalui e-mail angelakusuma2004@gmail.com dan HP 0895-3261-98857.

Indonesia dalam Pusaran Sejarah: Sebuah Kajian Historis Multidimensi

Editor:
Wahyu Agil Permana

Transformasi Koperasi Indonesia: dari Era Kolonial hingga Modern

Silvia Andriani, Mutia Maharani, Wasipa Shuhra

Koperasi memiliki sejarah panjang yang dimulai pada akhir abad ke-19, di mana organisasi ini muncul sebagai respons terhadap eksploitasi ekonomi yang dialami oleh rakyat Indonesia di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Salah satu tokoh penting yang berperan dalam pembentukan koperasi adalah R. Aria Wiriatmadja, yang mendirikan koperasi simpan pinjam pada 1896 di Purwokerto. Awalnya, koperasi ini didirikan untuk membantu para guru keluar dari jerat utang rentenir. Sejak saat itu, koperasi terus berkembang dan menjadi salah satu pilar penting ekonomi kerakyatan di Indonesia (Pohan dkk, 2018).

Di era globalisasi saat ini, koperasi memiliki potensi besar dalam mendukung inklusi keuangan, terutama di kalangan masyarakat yang kurang terjangkau oleh sistem perbankan formal. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM, menunjukkan bahwa pada 2023, terdapat sekitar 127.846 koperasi aktif di Indonesia, dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yang mencapai 5,1% pada 2021. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi tetap menjadi bagian penting dari ekonomi Indonesia (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023).

Namun, koperasi juga menghadapi tantangan besar di era modern ini, seperti perubahan dinamika ekonomi, persaingan dengan perusahaan swasta yang lebih besar, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital. Menurut Ndraha (2024), salah satu tantangan utama yang dihadapi koperasi adalah rendahnya adopsi teknologi, yang

berdampak pada kurangnya daya saing koperasi di pasar modern. Selain itu, koperasi harus berhadapan dengan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung transformasi digital, serta terbatasnya akses terhadap sumber daya keuangan (Sepriano dkk, 2023).

Koperasi memiliki peran yang strategis dalam menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan sosial. Mempelajari transformasi koperasi dari masa kolonial hingga era modern, memberikan perspektif yang lebih luas tentang dinamika ekonomi Indonesia dan bagaimana koperasi dapat beradaptasi untuk tetap relevan di tengah perubahan zaman (Alhusain dkk, 2019).

Dengan didukung oleh data yang relevan, penelitian ini bertujuan untuk memahami tantangan dan peluang yang dihadapi koperasi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat peran koperasi di masa depan.

Koperasi pada Masa Kolonial

Koperasi di Indonesia muncul sebagai respons terhadap dominasi ekonomi kapitalis yang dikuasai oleh kolonial Belanda. Tujuan didirikannya, yaitu untuk melawan kemiskinan dan eksploitasi yang dialami rakyat pribumi. Namun, kurangnya pendidikan ekonomi dan pengetahuan tentang sistem koperasi menghambat perkembangannya (Jahar, 2015).

Pada awalnya, pemerintah kolonial tidak mendukung koperasi, karena dianggap sebagai ancaman terhadap kepentingan mereka. Namun, tokoh nasionalis, Haji Samanhudi, yang mendirikan Serikat Dagang Islam melihat koperasi sebagai sarana kemandirian ekonomi.

Pada 1927, pemerintah kolonial mulai mendirikan bank rakyat *(Volksbank)* sebagai pengakuan pentingnya ekonomi lokal, namun langkah ini lebih bertujuan untuk mengendalikan

ekonomi rakyat. Keterbatasan modal dan lemahnya manajemen koperasi, membuat banyak koperasi gagal karena menjadi alat kontrol pemerintah tanpa meningkatkan kesejahteraan rakyat (Hilman, 2012).

Transformasi Koperasi setelah Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan 1945, koperasi mengalami transformasi sebagai upaya membangun ekonomi nasional yang mandiri dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, koperasi menghadapi berbagai masalah, seperti kurangnya pendidikan, manajemen, ketergantungan pada modal luar, dan partisipasi anggota yang rendah. Banyak koperasi hanya berfungsi secara formal, tanpa efektivitas nyata, koperasi sering kali dijadikan alat politik untuk menggalang dukungan, bukan untuk pengelolaan ekonomi jangka panjang (Masngudi, 1990).

Pemerintah juga membirokratisasi koperasi dan mengabaikan prinsip otonomi. Meskipun ada upaya intensif pada 1950-an, termasuk Kongres Koperasi Indonesia pertama pada 1947, koperasi tetap kesulitan berkembang, karena modal terbatas dan ketidakstabilan ekonomi. Pada akhir dekade 1960-an, setelah kejatuhan Orde Lama, koperasi lebih difokuskan sebagai alat politik yang menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat (Pratiwi dkk, 2023).

Dinamika Koperasi pada Era Orde Baru

Pada era Orde Baru, koperasi dijadikan salah satu pilar ekonomi nasional bersama sektor swasta dan BUMN, sesuai dengan visi pembangunan yang dipelopori oleh Presiden Soeharto. Menurut Hasang & Nur (2020), pemerintah Orde Baru menginginkan koperasi menjadi alat pembangunan ekonomi yang efisien dan berfungsi untuk mendukung modernisasi

pertanian, perdagangan, dan usaha kecil. Namun, koperasi kehilangan otonomi, karena birokratisasi tinggi dan dominasi pemerintah, menjadikannya instrumen kebijakan tanpa partisipasi aktif anggota.

Banyak koperasi didirikan secara administratif tanpa melihat kebutuhan dari masyarakat, sementara koperasi juga sering disalahgunakan untuk kepentingan politik lokal. Meski ada bantuan kredit dari pemerintah, koperasi sulit berkembang secara mandiri karena kurangnya pelatihan dan manajemen profesional.

Selain itu, terdapat beberapa koperasi yang berhasil berkembang dengan baik, terutama di sektor pertanian, dimana koperasi membantu meningkatkan produktivitas melalui program-program seperti Kredit Usaha Tani. Namun, keberhasilan ini lebih bersifat sporadis dan tidak merata. Pada akhir era ini, banyak koperasi terbebani utang dan kalah bersaing dengan sektor swasta,

meninggalkan tantangan besar untuk diperbaiki pada era reformasi (Matdoan, 2017).

Koperasi di Tengah Globalisasi

Setelah Reformasi 1998, koperasi di Indonesia memasuki babak baru dalam menghadapi tantangan globalisasi dan liberalisasi ekonomi. Era ini ditandai dengan upaya restrukturisasi koperasi agar lebih mandiri, demokratis, dan berorientasi pada prinsip ekonomi pasar yang kompetitif.

Salah satu tantangan utama koperasi di era modern adalah bagaimana tetap relevan di tengah arus globalisasi yang semakin membuka pasar bagi sektor swasta dan internasional. Menurut Dzikrullah & Chasanah (2024), koperasi harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, meningkatnya persaingan dari perusahaan swasta, dan perubahan preferensi konsumen yang cenderung menginginkan pelayanan yang lebih efisien dan profesional.

Permasalahan yang dihadapi koperasi pada awal era reformasi adalah citra negatif yang diwariskan dari era Orde Baru, di mana koperasi dianggap sebagai instrumen politik dan bukan sebagai lembaga ekonomi yang kuat. Banyak koperasi yang tidak mampu bertahan di tengah keterbukaan ekonomi, karena lemahnya struktur internal, minimnya inovasi, serta rendahnya partisipasi anggota. Selain itu, banyak koperasi mengalami kesulitan dalam bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar, terutama karena akses terhadap modal yang terbatas dan keterlambatan dalam mengadopsi teknologi modern (Riswanto dkk, 2024).

Namun, era globalisasi juga memberikan peluang bagi koperasi untuk berkembang, terutama melalui integrasi dengan ekonomi digital. Koperasi yang mampu memanfaatkan teknologi informasi, seperti *E-commerce* dan platform digital, mulai

menunjukkan peningkatan kinerja dan partisipasi anggota (Dwipradnyana dkk, 2020).

Beberapa koperasi bahkan berhasil mengembangkan model bisnis yang lebih modern, dengan fokus pada sektor-sektor strategis seperti koperasi simpan pinjam, koperasi pertanian berbasis teknologi, serta koperasi jasa yang terintegrasi dengan pasar internasional. Koperasi yang berorientasi pada inovasi dan profesionalisme dalam manajemen, lebih mampu bertahan dan berkembang di era globalisasi (Muljono, 2012).

Kesimpulan

Koperasi memiliki peran signifikan dalam sejarah ekonomi Indonesia. Koperasi mulai diperkenalkan sebagai bentuk perlawanan ekonomi terhadap dominasi ekonomi kolonial. Koperasi terus berkembang dan menjadi pilar penting dalam

ekonomi kerakyatan, khususnya dalam memberdayakan masyarakat lokal. Pada masa kemerdekaan, koperasi turut berkontribusi dalam membangun ekonomi nasional. Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti manajemen yang tidak efisien, keterbatasan modal, dan rendahnya daya saing, koperasi tetap relevan di era globalisasi dan digitalisasi.

Inovasi teknologi dan adopsi model bisnis baru, memungkinkan koperasi untuk beradaptasi dengan dinamika pasar modern. Dengan peningkatan pendidikan koperasi dan dukungan kebijakan yang kuat dari pemerintah, koperasi dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Alhusain, A. S., Mauleny, A. T., Sayekti, N. W., & Lisnawati, S. S. (2019). *Koperasi Dalam Sistem Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Dwipradnyana, I., Pratiwi, A., & Diatmika, I. (2020). Strategi Pengembangan Koperasi Di Era Digital Pada Koperasi Yang Ada Di Provinsi Bali. *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan*, *17*(2).

Dzikrullah, A. A., & Chasanah, U. (2024). Optimalisasi Peran Koperasi dalam Mendukung UMKM: Meningkatkan Akses Modal, Penguasaan Teknologi, dan Ekspansi Pasar. *Investi: Jurnal Investasi Islam*, *5*(1).

Hasang, I., & Nur, M. (2020). *Perekonomian Indonesia*. Malang: Ahlimedia Book.

Hilman, R. (2012). Transformasi Koperasi Pasca-Kemerdekaan: Dari Gerakan Ekonomi ke Alat Politik. *Jurnal Ekonomi Rakyat, 5*(1).

Jahar, A. S. (2015). Transformasi Gerakan Ekonomi Islam Kontemporer. *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, *39*(2).

Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). *Data koperasi aktif di Indonesia tahun 2023*.

Masngudi, H. (1990). *Penelitian tentang sejarah perkembangan koperasi di Indonesia.* Jakarta: Badan Penelitian Perkembangan Koperasi.

Matdoan, A. (2017). Tantangan Koperasi dalam Perkembangannya di Era Global. *Jurnal Cita Ekonomika*, *11*(1).

Muljono, D. (2012). *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Ndraha, A. B., Zebua, D., Zega, A., & Zebua, M. K. (2024). Dampak ekonomi digital terhadap pertumbuhan UMKM di era industri 4.0. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, *1*(1).

Pohan, I. A., Krisdayanti, A. E., & Simanjuntak, D. B. (2018). Rekonstruksi Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, *4*(1).

Pratiwi, A. D., Maulina, A., Amalia, A., & Rega, M. F. R. (2023). Pengaruh Perencanaan Pembangunan Era Orde Lama pada Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *Journal of Economics Development Issues*, *6*(1).

Riswanto, A., Joko, J., Napisah, S., Boari, Y., Kusumaningrum, D., Nurfaidah, N., & Judijanto, L. (2024). *Ekonomi Bisnis Digital: Dinamika Ekonomi Bisnis di Era Digital*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.

Sepriano, S., Hikmat, A., Munizu, M., Nooraini, A., Sundari, S., Afiyah., & Indarti, C. (2023). *Transformasi Administrasi Publik Menghadapi Era Digital*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.

Profil Penulis

Silvia Andriani lahir di Minas, 26 April 2001. Seorang mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Padang. Penulis memiliki motto hidup *"dimulai dengan niat, dilakukan dengan semangat".* Penulis dapat dihubungi melalui akun e-mail silviaandriani2604@gmail.com dan HP 0852-7438-8734.

Mutia Maharani lahir di Labuhan, 06 Agustus 2002. Seorang mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Padang. Penulis memiliki motto hidup *"buatlah jalanmu sendiri, jangan ikuti jejak orang lain".* Penulis dapat dihubungi melalui akun e-mail maharanimutia002@gmail.com dan HP 0857-6262-5274.

Wasipa Shuhra lahir di Simpang Kalam, 01 September 2004. Seorang mahasiswi yang sedang

menempuh pendidikan di Universitas Negeri Padang. Penulis memiliki motto hidup *"jika orang lain bisa, maka kamu juga harus bisa".* Penulis dapat dihubungi melalui akun e-mail wasipashuhra01@gmail.com dan HP 0853-6385-2710.

PENERBIT CV. INSPRO PUSTAKA
MENCARI NASKAH

- **KRITERIA & KETENTUAN NASKAH**
  - ✓ Naskah ditulis di Ms.Word (docx) dengan format:
    - Ukuran Kertas A4
    - Font Calibri ukuran 12pt
    - Line spacing 1,5 lines
    - Margin – Normal
    - Minimal 50 halaman dilengkapi dengan Kata Pengantar dan Bionari Penulis

- **SYARAT**
    - Naskah pribadi dan belum pernah dipublikasikan/ dicetak
    - Naskah sudah selesai 100%
    - Tidak mengandung SARA dan LGBT

Apabila memiliki naskah yang sesuai dengan kriteria. Silahkan submit sekarang juga melalui :

Email : naskahinspro@gmail.com

Subyek : **NAMA PENULIS – JUDUL - DOMISILI**

KAMI MENERIMA NASKAH FIKSI SEMUA GENRE

DAN NASKAH NON FIKSI

BERMINAT?

HUBUNGI KAMI:

PENERBIT CV. INSPRO PUSTAKA

Email: inspropustaka@gmail.com

WhatsApp: 0822-6989-2019

Instagram: @inspro_pustaka

Website: www.inspropustaka.com